

**LAPORAN PERKEMBANGAN  
PEREKONOMIAN DAERAH (LPPD)  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Triwulan III - 2006**

**Kantor Bank Indonesia  
Medan**

**Visi Bank Indonesia:**

“Menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil”.

**Misi Bank Indonesia:**

“Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan”.

**Nilai-nilai Strategis Organisasi Bank Indonesia:**

“Nilai-nilai yang menjadi dasar organisasi, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku yang terdiri atas Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas dan Kebersamaan”.

**Visi Kantor Bank Indonesia Medan:**

“Mewujudkan Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya melalui peningkatan perannya sebagai *economic intelligence* dan unit penelitian”.

**Misi Kantor Bank Indonesia Medan:**

“Berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ekonomi, moneter, perbankan, sistem pembayaran secara efektif dan efisien dan peningkatan kajian ekonomi regional serta koordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait”.

**Kalender Publikasi****Periode Publikasi**

LPPD Triwulan I  
LPPD Triwulan II  
LPPD Triwulan III  
LPPD Triwulan IV

**Publikasi**

Pertengahan Mei  
Pertengahan Agustus  
Pertengahan November  
Pertengahan Januari

---

**Penerbit:**

Seksi Kajian Ekonomi dan Moneter

Bidang Ekonomi dan Moneter

Kantor Bank Indonesia Medan

Jl. Balai Kota No.4

MEDAN, 20111 Indonesia

Telp : 061-4150500 psw. 1729

Fax : 061-4152777

Homepage : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Email : [yosamartha@bi.go.id](mailto:yosamartha@bi.go.id)

[dsyakobi@bi.go.id](mailto:dsyakobi@bi.go.id)

---

## KATA PENGANTAR



Penyusunan buku “Laporan Perkembangan Perekonomian Daerah Triwulan III-2006 Provinsi Sumatera Utara” merupakan salah satu Program Kerja Bank Indonesia Medan yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang berkualitas dan terkini tentang perekonomian Sumatera Utara.

Laporan ini memuat analisis mengenai perkembangan di bidang ekonomi, moneter, perbankan dan sistem pembayaran pada triwulan III-2006 yang berdimensi regional.

Secara umum indikator ekonomi makro Sumatera Utara pada triwulan III mengalami perkembangan positif sebagaimana ditunjukkan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kestabilan Inflasi. Sementara itu, beberapa indikator di sektor riil seperti penyaluran kredit, pengangguran dan kemiskinan relatif belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, sehingga senantiasa memerlukan perbaikan dalam edisi berikutnya. Oleh karena itu, saran dan kritik guna meningkatkan kualitas analisis kajian sangat diharapkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Besar harapan kami agar laporan ini dapat memberikan masukan yang berharga mengenai kondisi perekonomian di Sumatera Utara bagi seluruh *stakeholders* Bank Indonesia.

Demikianlah kami sampaikan perkembangan perekonomian Sumatera Utara triwulan III-2006 serta prospek pada triwulan berikutnya.

Medan, November 2006

BANK INDONESIA MEDAN

**Romeo Rissal**

Pemimpin

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	ii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>iii</b>
<b>Data Indikator Ekonomi Makro Sumatera Utara dan Nasional</b>	<b>ix</b>
<b>Boks – 1 Perkembangan Indikator Kesejahteraan Sumatera Utara</b>	
<b>BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	<b>1</b>
1.1. Sisi Produksi.....	1
1.2. Sisi Penggunaan.....	19
<b>Boks – 2 Prospek Agribisnis Jagung di Sumatera Utara</b>	
<b>Boks – 3 Pembinaan Pariwisata Sumatera Utara</b>	
<b>Boks – 4 Survei Penjualan Eceran</b>	
<b>Boks – 5 Pembinaan Infrastruktur Sumatera Utara</b>	
<b>Boks – 6 Siapkah Sumatera Utara Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia ?</b>	
<b>BAB II PERKEMBANGAN INFLASI REGIONAL</b>	<b>27</b>
2.1 Kondisi Umum.....	27
2.2 Inflasi Sumatera Utara .....	28
2.3 Disagregasi Inflasi Sumatera Utara .....	29
2.4 Inflasi Kelompok Barang .....	31
2.5 Inflasi Pada Kota Perhitungan Inflasi Sumatera Utara .....	35
<b>Boks – 4 Determinan Inflasi Sumatera Utara Triwulan III - 2006</b>	
<b>Boks – 5 Survei Konsumen</b>	
<b>BAB III PERKEMBANGAN PERBANKAN, MONETER, DAN SISTEM PEMBAYARAN</b>	<b>37</b>
3.1 Perkembangan Perbankan .....	37
3.1.1 Perkembangan Bank Umum .....	37
3.1.2 Perkembangan Bank Umum Syariah .....	46
3.2 Perkembangan Sistem Pembayaran .....	47
<b>Boks – 9 UMKM</b>	
<b>Boks – 10 Perkembangan Bank Syariah di Sumatera Utara</b>	
<b>Boks – 11 Mensinergikan UMKM dan Bank Umum Syariah di Sumatera Utara</b>	
<b>Boks – 12 Analisis Resiko Perbankan</b>	
<b>BAB IV PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH</b>	
4.1 Prospek Ekonomi.....	57
4.2 Prospek Inflasi .....	58
<b>Boks – 13 Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD)</b>	
<b>Boks – 14 Penukaran Uang Kecil Menjelang Lebaran</b>	
<b>Boks – 15 Rekomendasi Kebijakan</b>	

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## TRIWULAN III-06

### I. GAMBARAN UMUM

Menginjak triwulan III-2006, perekonomian Sumatera Utara secara umum mengalami perkembangan yang cukup baik. Percepatan pertumbuhan yang terjadi pada triwulan II kembali berlanjut dan bahkan mengalami peningkatan yang cukup besar, didukung tidak saja oleh hampir seluruh sektor ekonominya, namun juga ditunjang beberapa sektor andalannya yang kembali mencatat pertumbuhan positif seperti pertanian, perdagangan dan industri.

Kestabilan tingkat harga yang cukup baik selama tahun 2006 masih terus bertahan dan terus mencatat inflasi yang relatif rendah. Di tengah-tengah minimnya kemampuan daya beli masyarakat yang baru berangsur pulih, *permintaan terhadap barang masih relatif minim sehingga sektor jasa mengalami peningkatan yang relatif lebih besar.* Pada sektor keuangan, indikator utama perbankan masih mencatat pertumbuhan yang positif, meskipun masih pada level pertumbuhan yang relatif lambat, terutama jika dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya. Respon penurunan suku bunga kredit perbankan sudah terlihat, namun masih sangat kecil. Selain membutuhkan jeda waktu penyesuaian, perbankan terlihat masih sangat berhati-hati untuk melakukan ekspansi kredit, terutama mengingat sensitifitas kemampuan daya beli masyarakat serta masih tingginya jumlah kredit bermasalah.

Pasca kenaikan BBM pada bulan Oktober tahun 2005 lalu, indikator kesejahteraan masyarakat Sumut belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi Mei 2006, pendapatan perkapita provinsi Sumut tahun 2005 adalah sebesar US\$1.150, sedikit di bawah nasional sebesar US\$1.302, sedangkan provinsi NAD relatif lebih baik yakni US\$1.326. Jumlah rumah tangga miskin di Sumut sebanyak 944.487 rumah tangga atau 34,81% dari total rumah tangga. (Kondisi tersebut jauh meningkat dibandingkan persentase konsep penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan tahun 2004 sebesar 14,93% untuk provinsi Sumut dan 28,47% untuk provinsi NAD). Kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Utara pada Februari 2006 juga belum menunjukkan arah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional, tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara cukup tinggi mencapai 14,82%, jauh lebih tinggi dari angka Februari 2005 yang sebesar 10,98%.

## II. ASESMEN MAKROEKONOMI REGIONAL

Perkembangan ekonomi Sumut pada triwulan III-2006 yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar Rp20.630,85 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan kinerja yang cukup baik yaitu dengan pertumbuhan sebesar 3,01% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sementara jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2005 meningkat sebesar 6,50%. Secara tahunan, *Pertumbuhan yang cukup fantastis terjadi pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 13,49%, sektor keuangan sebesar 16,67% serta sektor jasa sebesar 13,62%*. (Tabel -1)

Tabel - 1. PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 (% , y-o-y)

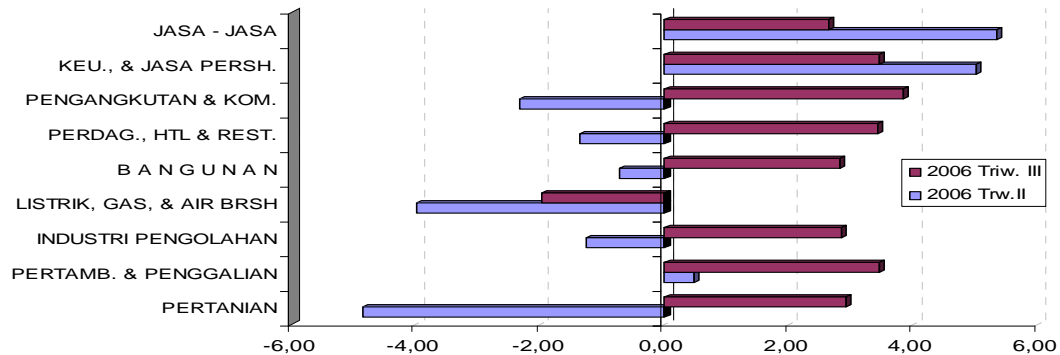
LAPANGAN USAHA	Tahun 2005				2006		
	Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV	Triw.I	Trw.II	Triw. III
1. PERTANIAN	-0,27	1,25	-2,68	6,59	-3,22	2,85	2,64
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	-0,75	3,36	5,53	1,77	1,02	1,10	4,13
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	5,59	4,84	6,78	2,30	4,24	2,37	1,67
4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH	6,93	-0,45	-4,38	-2,64	-0,17	0,24	-0,91
5. B A N G U N A N	35,73	26,07	14,84	-2,19	-2,08	-1,55	3,19
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN REST.	17,08	8,25	7,23	4,90	5,01	10,71	13,49
7. PENGANGKUTAN DAN KOM.	10,10	8,55	8,64	8,46	8,87	7,28	8,24
8. KEUANGAN, & JASA PERSH.	7,54	5,99	4,95	5,91	8,02	12,57	16,67
9. JASA - JASA	2,04	3,20	5,57	6,15	9,73	14,08	13,62
<b>P D R B</b>	<b>7,33</b>	<b>5,61</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>2,89</b>	<b>5,70</b>	<b>6,50</b>

Secara triwulanan (qtq), pertumbuhan sebesar 3,01% pada triwulan laporan terjadi di hampir semua sektor ekonomi. Peningkatan terbesar terjadi di sektor keuangan dan jasa perusahaan (4,11%), pengangkutan dan komunikasi (3,91%), serta sektor pertambangan dan penggalian (3,45%). Pertumbuhan yang moderat terjadi pada sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa, masing-masing dengan level pertumbuhan di bawah tiga persen. Tingginya angka pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor tersebut merupakan indikasi yang menggembirakan dan diharapkan dapat merefleksikan kecenderungan mulai berjalannya proses pemulihan serta membaiknya iklim dunia usaha.

Sektor pertanian yang masih mendominasi struktur perekonomian di Sumut mulai mencatat pergerakan yang positif 2,92% setelah terpuruk pada triwulan II-2006 yang lalu sebesar -4,86%. *Merebaknya minat masyarakat untuk mengalih-fungsikan lahan pertanian yang digunakan untuk tujuan lain sehingga terdapat pergeseran pola produksi tampaknya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja sektor tersebut pada triwulan laporan. Faktor iklim yang kurang mendukung selama semester I juga relatif membaik dengan meningkatnya curah hujan di Sumut.* Sub sektor perkebunan yang diharapkan menjadi sektor primadona dalam mendukung ekspor, sampai dengan akhir triwulan III-2006 juga mampu mencatat pertumbuhan yang cukup

baik mencapai 3,67%. Maraknya isu flu burung yang diperkirakan telah mengakibatkan turun drastisnya produksi sub sektor peternakan sebesar -12,47% dan -4,13% pada triwulan I dan triwulan II masih cukup terasa dengan kembali mencatat pertumbuhan negatif 0,79%. Tercatat hingga pertengahan September 2006, jumlah ternak unggas (ayam) yang telah dimusnahkan di Sumut sebanyak 76.514 ekor yang berasal dari 16 kabupaten/kota di Sumut.

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi III-2006



Industri pengolahan merupakan salah satu sektor unggulan yang menjadi barometer perkembangan perekonomian di Sumut setelah sektor pertanian. Dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2005 sebesar 3,21%, pertumbuhan di sektor ini relatif lebih rendah yaitu 2,51%. Kontribusi sektor tersebut terutama didominasi oleh sub sektor industri makanan, minuman dan tembakau dengan pangsa sebesar 10,64%. Satu-satunya sub sektor yang mengalami pertumbuhan negatif dialami oleh sub sektor barang kayu dan hasil hutan. Upaya pemberantasan *illegal logging* membuat sebagian besar usaha di bidang perkayuan terhenti sehingga produktivitasnya kembali menurun 1,06%.

Sementara itu, pertumbuhan sektoral yang negatif terjadi pada sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 1,94%. Turunnya kinerja sektor Listrik, Gas dan Air Bersih tersebut merupakan dampak dari sangat terbatasnya ketersediaan Kapasitas Produksi Listrik yang dimiliki oleh pihak PLN-Medan pada khususnya dan Sumut pada umumnya. Pengoperasian mesin pembangkit PLN pada kapasitas yang maksimal selama piala dunia sepakbola dan puasa menyebabkan tidak adanya mesin cadangan yang dapat diandalkan selama proses pemeliharaan hingga bulan Desember 2006. Konsekuensinya, pemadaman bergilir di Sumut akan semakin intensif.

Secara umum, kinerja pertumbuhan ekonomi secara tahunan (yoy) di lihat dari perkembangan sektoral terus menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sebagaimana yang telah diperkirakan sebelumnya, indikasi percepatan pertumbuhan PDRB yang mulai terlihat pada triwulan II

menjadi kenyataan dengan *kelompok sektor tersier sebagai lokomotif utama seperti perdagangan, keuangan dan jasa*.

Dari sisi investasi, perkembangan yang terjadi hanya menunjukkan sedikit peningkatan yang ditandai dengan kenaikan nilai dan peringkat realisasi investasi baik PMDN dan PMA dibandingkan triwulan sebelumnya. Bahkan jika dibandingkan dengan provinsi NAD, realisasi investasi Sumut juga relatif lebih baik. Selama kurun waktu Juli – Agustus, total realisasi PMDN adalah senilai Rp.56,6 miliar, sementara realisasi PMA senilai US\$.13,1 juta.

### III. ASESMEN KEUANGAN DAERAH (APBD)

Perkembangan ekonomi yang cukup baik pada triwulan laporan tersebut juga di dukung percepatan realisasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut yang hingga posisi Agustus telah mencapai Rp1.058,94 miliar (46,67%) dari total APBD Sumut tahun 2006 senilai Rp2.268,99 miliar. Kondisi tersebut tidak berbeda jauh dengan provinsi NAD yang hingga posisi Juni 2006 telah merealisasikan 45,56% dari total anggarannya sebesar Rp7.606,96 miliar.

### IV. ASESMEN INFLASI

Perkembangan tingkat harga secara umum pada triwulan III tahun 2006 (posisi September) terus bergerak membaik dan mencatat inflasi yang cukup rendah. Inflasi tahunan Sumut (*year on year*) adalah sebesar 16,36%, menurun dibandingkan posisi triwulan II sebesar 18,53%. Kondisi tersebut juga melanjutkan *trend* penurunan inflasi yang cukup signifikan sejak posisi akhir tahun 2005 sebesar 22,51%.

Tabel - 2. Perkembangan Inflasi Sumatera Utara

INFLASI		2004	2005				2006		
		12	3	6	9	12	3	6	9
NASIONAL	yoy	6,40	8,81	7,43	9,07	17,12	15,74	15,53	14,54
	ytd	6,40	3,19	4,28	6,40	17,12	1,97	2,87	4,05
	qtq	2,62	3,19	1,05	2,03	10,08	1,97	0,87	1,16
	mom	1,04	1,91	0,50	0,69	(0,04)	0,02	0,45	0,38
SUMUT	yoy	6,77	8,93	8,34	10,80	22,51	20,40	18,53	16,36
	ytd	6,77	2,98	4,94	7,97	22,51	1,20	1,53	2,55
	qtq	2,63	2,98	1,91	2,88	13,47	1,20	0,33	1,00
	mom	1,42	1,59	0,58	0,44	(0,28)	0,46	0,15	0,47

Secara akumulatif, inflasi Sumut hingga posisi September tahun 2006 adalah 2,55%, masih cukup rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 4,05%. Rendahnya akumulasi inflasi Sumatera Utara terutama terjadi di kota Sibolga yang mencatat inflasi 0,53%, sementara kota dengan inflasi tertinggi terjadi di Padang Sidempuan yakni sebesar 4,86%.

Berdasarkan sumbangannya, tekanan inflasi melalui inflasi inti pada triwulan ketiga tahun 2006 tetap dominan. Kelompok komoditas *volatile food* sedikit meningkat yang ditandai oleh kenaikan harga bahan makanan pada



bulan Juli, sementara tekanan komoditas *administered price* yang besar pada triwulan sebelumnya selama triwulan laporan bergerak cukup stabil.

Berdasarkan kelompok barang dan jasa, inflasi pada triwulan III tahun 2006 di dominasi oleh kenaikan pada kelompok barang pendidikan, rekreasi, dan olahraga serta bahan makanan masing-masing sebesar 6,07% dan 1,94%. Sementara kelompok bahan lainnya relatif stabil dengan kisaran inflasi di bawah 1%, kecuali Sandang serta Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yang mencatat deflasi 0,02%.

## **V. ASESMEN KEUANGAN (PERBANKAN SUMUT)**

Indikator utama bank umum konvensional di Sumut memasuki triwulan III tahun 2006 mulai menunjukkan peningkatan berarti, meskipun relatif belum ekspansif. Peningkatan tersebut tercermin dari kenaikan ketiga indikator utama yaitu asset, kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga masing-masing dengan pertumbuhan sebesar 9,73% menjadi Rp68,19 triliun, 7,33% menjadi Rp37,72 triliun, dan 6,74% menjadi Rp55,60 triliun selama tahun 2006.

Perkembangan LDR cenderung menurun yakni sebesar 66,64% dari posisi triwulan sebelumnya 68,62% akibat masih rendahnya penyaluran kredit perbankan. Jumlah kredit bermasalah juga belum menunjukkan gejala positif dan bahkan kembali meningkat menjadi 10,71% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 10,14% dan kondisi akhir tahun yang sebesar 9,31%. Jumlah kredit bermasalah yang bersifat struktural di sektor korporasi mengakibatkan penyelesaian permasalahan kredit menjadi terhambat. Kondisi tersebut diperparah dengan masih minimnya ekspansi kredit sehingga rasio NPL kembali meningkat.

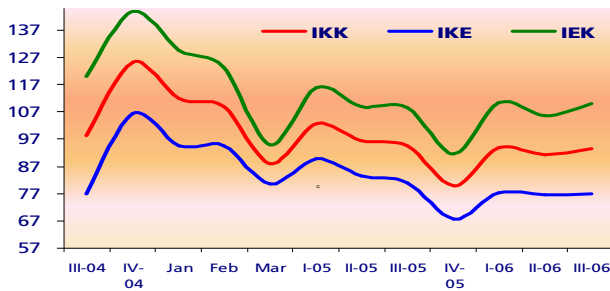
Meskipun belum memberikan dampak yang cukup signifikan, *trend* penurunan BI Rate cukup mempengaruhi tingkat suku bunga perbankan yang mulai bergerak menurun dibandingkan triwulan II lalu. Tercatat suku bunga deposito menurun dari 10,63% pada posisi akhir tahun 2005 menjadi 10,23% pada triwulan II dan kembali menurun menjadi 9,92% pada triwulan laporan. Kondisi tersebut diikuti oleh penurunan suku bunga kredit menjadi 14,74% dibandingkan posisi triwulan sebelumnya sebesar 14,94%, namun masih lebih tinggi dibandingkan posisi akhir tahun 2005 yang sebesar 14,71%. Tingginya jumlah kredit bermasalah diperkirakan menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan masih tingginya resiko pasar, sehingga perbankan cenderung lambat dalam merespon penurunan BI Rate.

## **VI. OUTLOOK**

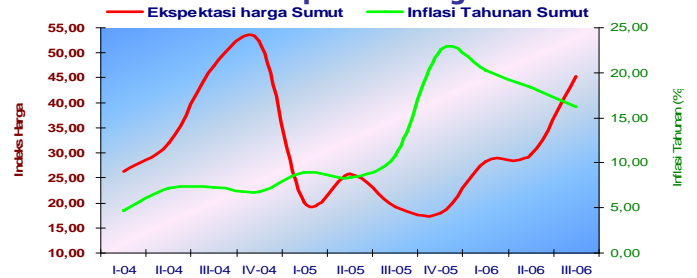
Perkembangan ekonomi Sumatera Utara yang terus membaik pada triwulan III diharapkan dapat berlanjut pada triwulan IV mendatang. Secara sektoral, beberapa sektor andalan Sumut dalam kondisi normal umumnya telah

mencapai puncaknya pada triwulan III. Namun mengingat proses pemulihan baru mencapai momentum positif pada triwulan II yang lalu, peningkatan produktivitas pada sektor andalan khususnya industri pengolahan serta perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan masih dapat berlanjut dan memiliki ruang yang cukup besar untuk kembali mencatat pertumbuhan yang cukup baik.

**Grafik 6. Keyakinan Konsumen**



**Grafik 7. Ekspektasi Harga**



Pembangunan beberapa proyek strategis di bidang agrobisnis yang telah dicanangkan pada awal triwulan III yang lalu memang belum akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan daya beli dan permintaan pasar. Namun kondisi tersebut tentunya akan meningkatkan optimisme pasar terhadap kondisi moneter yang stabil, ekspektasi konsumen yang terus menguat, serta tingkat suku bunga yang semakin rendah.

Meskipun secara fundamental proses pemulihan mulai berjalan, namun tidak bisa dipungkiri kemampuan daya beli masyarakat masih rendah. Selain itu, tingginya pengangguran, lambatnya perbaikan daya dukung ekonomi seperti jalan dan pasokan energi dapat menjadi kendala utama dalam mendorong produktivitas ekonomi Sumut. Dari sisi perbankan, penyerapan kredit di triwulan mendatang diperkirakan masih jauh di bawah pencapaian posisi yang sama tahun sebelumnya, sementara proses penyesuaian (*time lag*) suku bunga kredit terhadap penurunan BI Rate masih akan terus berlangsung.

## **BOKS - 1**

### **Perkembangan Indikator Kesejahteraan Sumut**

#### **I. Target Pembangunan Ekonomi.**

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah *“Terwujudnya Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke Bhinnekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”*.

Kemampuan masyarakat Sumatera Utara diwujudkan melalui agenda pemerintah daerah melalui upaya Membangun Ekonomi Daerah Termasuk Pengentasan Kemiskinan. Pengentasan kemiskinan merupakan hakikat dasar pembangunan ekonomi dan masyarakat. Konsekuensinya, segala pembangunan yang diselenggarakan pemerintah daerah dengan dukungan seluruh pelaku ekonomi pada akhirnya bermuaran pada semakin meningkatnya kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut.

Salah satu upaya pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah adalah dengan mengeluarkan dan mengefektifkan Undang-undang Otonomi daerah No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut merupakan penyempurnaan dari UU sebelumnya dalam mengatur tentang pelimpahan wewenang (desentralisasi) di bidang administrasi dan politik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sekaligus dalam mendistribusikan kebijakan fiskal di daerah yang logikanya lebih memahami kebutuhan pembangunan masyarakat di daerah nya masing-masing (*money follow function*).

Secara nasional, peningkatan kesejahteraan penduduk melalui pembangunan ekonomi dalam kurun waktu 2004-2009 juga difokuskan kepada masalah-masalah pokok yang mengakibatkan masih rendahnya kesejahteraan rakyat, yang masih tertinggal jauh dibanding negara-negara Asia lainnya yang mengalami krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Salah satu agenda penting pembangunan pemerintah dalam RPJM periode 2004-2009 adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu membuka lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa sasaran pokok yang ingin dicapai pemerintah selama tahun 2004-2009 adalah:

- 1) Menurunnya persentase penduduk miskin dari 16,7 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009;

- 2) Menurunnya persentase pengangguran terbuka dari 9,9 persen pada tahun 2004 menjadi 5,1 persen tahun 2009;
- 3) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.

Sementara di tingkat provinsi, RPJM Sumut periode 2004-2009 ditekankan pada pencapaian indikator pada tabel berikut :

**Tabel 1. Target Pembangunan Ekonomi Sumut 2006-2009 RPJM**

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN			
			2006	2007	2008	2009
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,49	7,02	7,54	7,79
2.	Inflasi	%	7,00	6,50	6,50	6,00
3.	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	1.638.650	1.548.638	12.760.000	1.306.000
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	11,50	11,00	10,50	10,00
5.	IPM		71,40	72,00	72,70	73,40
<i>Sumber : BPS</i>						
<i>Merupakan angka proyeksi dengan tahun dasar baru 2004</i>						

Dari target pembangunan ekonomi Sumut berdasarkan RPJM 2006-2009 di atas, terlihat bahwa secara umum, dalam jangka pendek, yakni dari tahun 2005 ke 2006, perlu dilakukan pembenahan yang cukup besar sehingga asumsi posisi indikator makro dan kesejahteraan pada tahun 2006 dapat tercapai sebagai dasar pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2009. Sedangkan dari sisi jangka menengah, asumsi pencapaian target pembangunan ekonomi Sumut relatif moderat dibandingkan nasional yang relatif lebih agresif.

Salah satu aspek penting untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan tersedianya data kemiskinan serta indikator lainnya yang terkait. Ketersediaan data tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui permasalahan kemiskinan dalam perencanaan program dan sekaligus untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan/sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan pada tingkat nasional dan daerah. Perkembangan data kemiskinan serta beberapa indikator yang terkait dapat dilihat dari uraian berikut:

## II. Perkembangan Indikator Makro dan Indikator Kesejahteraan Sumut.

### II.1. Penduduk Miskin

**Tabel 3.**  
**Jumlah Rumah Tangga dan Rumah Tangga Miskin Hasil Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 \*) dirinci menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara**

<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah RT</b>	<b>Jumlah RT Miskin</b>	<b>Persentase RTM thd RT</b>
<b>Kabupaten</b>			
01. Nias	81,242	61,313	75.47
02. Madina	93,010	41,818	44.96
03. Tapsel	142,604	65,712	46.08
04. Tapteng	61,708	35,853	58.10
05. Taput	57,930	24,731	42.69
06. Tobasa	41,156	18,529	45.02
07. Labuhan Batu	202,968	57,333	28.25
08. Asahan	233,731	61,885	26.48
09. Simalungun	191,663	65,240	34.04
10. D a i r i	58,381	30,311	51.92
11. K a r o	87,016	31,665	36.39
12. Deli Serdang	338,225	92,891	27.46
13. Langkat	214,372	96,935	45.22
14. Nias Selatan	49,975	39,328	78.70
15. Humbahas	37,417	15,705	41.97
16. P. Bharat	8,591	5,599	65.17
17. Samosir	28,097	17,164	61.09
18. Sergai	140,623	45,658	32.47

<b>Kota</b>			
1. Sibolga	17,214	4,542	26.39
2. Tj. Balai	32,965	9,269	28.12
3. P. Siantar	48,434	11,908	24.59
4. T. Tinggi	30,821	5,261	17.07
5. Medan	426,539	87,876	20.60
6. Binjai	51,038	7,656	15.00
7. P. Sidempuan	37,632	10,305	27.38
<b>Sumatera Utara</b>	<b>2,713,352</b>	<b>944,487</b>	<b>34.81</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan:

\*) Hasil PSE'05 *Census Date* 31 Mei 2006

- Kol (3) adalah jumlah RT penerima KKB tahap awal dan susulan.

Kol (4) adalah jumlah kol (4)/kol (3) x 100%

Data jumlah rumah tangga miskin yang diperoleh berdasarkan hasil sensus data per 31 Mei 2006 tersebut merupakan konsep yang berbeda dengan

konsep kemiskinan pada tahun 2004 yang menggunakan konsep kemiskinan jumlah penduduk. Berdasarkan data jumlah penduduk miskin tahun 2004, penduduk miskin di provinsi Sumut adalah sebesar 1,8 juta jiwa atau 14,93% dari total jumlah penduduk. Sedangkan dengan menggunakan konsep rumah tangga, maka jumlah rumah tangga miskin di Sumut pada tahun 2005 adalah sebanyak 944.487 dengan rasio 34,81% dari total jumlah rumah tangga.

Mekipun berangkat dari konsep yang berbeda, namun berdasarkan logika umum, kita dapat mengasumsikan bahwa jumlah penduduk miskin di tahun 2005, khususnya pasca bencana tsunami dan ledakan inflasi di tahun 2005, telah mengalami peningkatan yang cukup besar. Kondisi tersebut tentunya sangat memprihatinkan. Namun berangkat dari kondisi tersebut, hal lain yang lebih penting untuk mendapatkan perhatian adalah proses upaya serta perkembangan indikator kemiskinan selama tahun 2006 yang diharapkan dapat kembali mendorong daya beli masyarakat sehingga dapat bangkit dari keterpurukan tersebut.

## II.2. Indeks Pembangunan Manusia<sup>1</sup>

**Tabel 2.**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara 2004-2005**

Propinsi/ Kabupaten/Kota	IPM		Peringkat Kab/ Kota		Perubahan Peringkat
	2004	2005 <sup>*)</sup>	2004	2005 <sup>*)</sup>	
<b>Sumatera Utara</b>	<b>71.4</b>	<b>72.0</b>			
01. Nias	65.0	66.1	24	24	Tetap
02. Mandailing Natal	67.5	68.8	23	22	<b>Naik</b>
03. Tapanuli Selatan	71.0	72.2	11	11	Tetap
04. Tapanuli Tengah	68.4	68.9	21	21	Tetap
05. Tapanuli Utara	70.9	72.1	13	12	<b>Naik</b>
06. Toba Samosir	73.8	74.5	5	3	<b>Naik</b>
07. Labuhan Batu	70.6	71.1	15	17	<b>Turun</b>
08. Asahan	69.7	70.1	19	19	Tetap
09. Simalungun	70.5	71.3	16	15	<b>Naik</b>
10. Dairi	69.9	70.5	18	18	Tetap
11. Karo	72.3	73.5	8	6	<b>Naik</b>
12. Deli Serdang	71.6	72.4	10	9	<b>Naik</b>
13. Langkat	70.7	71.3	14	14	Tetap
14. Nias Selatan	63.1	63.9	25	25	Tetap
15. Humbang Hasundutan	69.1	69.8	20	20	Tetap
16. Pakpak Barat	68.3	68.7	22	23	<b>Turun</b>
17. Samosir	71.7	72.2	9	10	<b>Turun</b>
18. Serdang Bedagai	70.0	71.2	17	16	<b>Naik</b>
71. Kota Sibolga	72.9	73.2	6	8	<b>Turun</b>
72. Kota Tanjung Balai	71.0	71.6	12	13	<b>Turun</b>
73. Kota Pematang Siantar	75.4	75.8	1	1	Tetap
74. Kota Tebing Tinggi	74.0	74.3	3	5	<b>Turun</b>
75. Kota Medan	74.7	75.4	2	2	Tetap
76. Kota Binjai	74.0	74.4	4	4	Tetap
77. Kota Padang Sidempuan	72.6	73.3	7	7	Tetap

Catatan: \*) angka sementara

Sumber : BPS-SU

Berdasarkan hasil perhitungan IPM tahun 2004 dan 2005 pada Tabel 1 disajikan perkembangan IPM untuk setiap Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara. Dari hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa kondisi pencapaian pembangunan manusia pada tahun 2005 lebih baik dibandingkan dengan kondisi di tahun 2004. IPM Sumatera Utara tahun 2005 sebesar 72,0 meningkat dari 71,4 di tahun 2004.

<sup>1</sup> Disarikan dari Penyampaian Perkembangan IPM oleh BPS-SU

Sementara itu jika dilihat per Kabupaten/ Kota kondisi pencapaian pembangunan manusia di tahun 2005 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh skor IPM setiap kabupaten Kota di tahun 2005 lebih tinggi dari tahun 2004. Kabupaten/ Kota yang mengalami peningkatan IPM terbesar dari tahun 2004 ke 2005 adalah Kabupaten Mandailing Natal (1,3) dan terkecil Kota Sibolga (0,3).

Dilihat dari sisi peringkat IPM Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar merupakan daerah dengan IPM tertinggi sebesar 75,8 disusul oleh Kota Medan dengan IPM sebesar 75,4. Sedangkan IPM terendah diduduki oleh Kabupaten Nias Selatan dengan IPM sebesar 63,9 dan Kabupaten Nias sebesar 66,1. Peringkat Kabupaten/ Kota ini tidak berbeda dengan kondisi pada tahun 2004.

### II.3. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator utama yang sangat berperan terhadap pengukuran tingkat kemiskinan. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya.

Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

**Tabel 4.**  
**Perkembangan Inflasi Sumut**

INFLASI		2005		2006								
		9	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUMUT	yoy	10,80	22,51	18,92	21,57	20,24	18,45	18,92	18,43	17,37	16,25	16,29
	ytd	7,97	22,51	(0,12)	0,69	1,15	0,68	1,31	1,49	2,18	2,04	2,54
	qtq	2,88	13,47	1,53	0,40	1,15	0,80	0,62	0,34	1,49	0,72	1,04
	mom	0,44	(0,28)	(0,12)	0,81	0,46	(0,47)	0,63	0,18	0,67	(0,13)	0,49



Berdasarkan perkembangan inflasi selama tahun 2006, pergerakan tingkat harga secara umum di Sumut relatif stabil dengan tingkat volatilitas yang sangat baik dibandingkan tahun 2005 yang lalu. Hingga posisi bulan September 2006, akumulasi inflasi (*year to date*) adalah sebesar 2,54%, atau jauh di bawah pencapaian pada tahun 2005 yang sebesar 7,97%. Kondisi tersebut semakin baik mengingat dengan trend yang relatif stabil tersebut, tingkat inflasi hingga akhir tahun 2006 diperkirakan akan berada di bawah 1 digit dengan kisaran  $\pm 6,5\%$ .

Yang perlu mendapat perhatian lebih jauh adalah bagaimana agar perkembangan tingkat harga yang sangat baik tersebut dapat dipertahankan, terutama mengingat potensi kenaikan kelompok barang *administered price* oleh pemerintah akan mengambil porsi yang lebih besar pada tahun 2007. Dengan tingkat harga yang stabil dan dalam level yang cukup rendah tersebut, daya beli masyarakat yang belum pulih diharapkan berangsur-angsur pulih dan dapat lebih meringankan hidup masyarakat yang sudah terhimpit beban hidup yang besar sejak lonjakan inflasi di tahun 2005 lalu.

# BAB I

## PEREKONOMIAN SUMATERA UTARA TRIWULAN III TAHUN 2006

### 1.1 SISI PRODUKSI<sup>2</sup> (PDRB SEKTORAL)

#### A. Gambaran Umum

Kinerja perekonomian Sumatera Utara pada triwulan III-2006 dibanding dengan triwulan sebelumnya yang digambarkan oleh PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, mengalami peningkatan sebesar 3,01%, setelah pada triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan negatif 1,37%. Berdasarkan pengolahan dan penghitungan hasil pengamatan Survei Indikator Ekonomi Triwulanan Sumut serta berbagai data/indikator ekonomi yang ada, PDRB Sumut atas dasar harga konstan 2000 triwulan III-2006 sebesar Rp.23.381,19 miliar, sementara pada triwulan II-2006 sebesar Rp.22.697,61 miliar. Berdasarkan harga berlaku, PDRB Sumatera Utara sebesar Rp.42.350,27 miliar, atau meningkat sebesar 4,74 % dari triwulan sebelumnya sebesar Rp.40.435,07 miliar.

Tabel 1.1.  
Nilai PDRB Sumatera Utara Menurut Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha  
Triwulan II - III Tahun 2006 \*) (Rp Miliar.)

Sektor Ekonomi/ Lapangan Usaha	ADHB		ADHK 2000	
	Triw. II'06	Triw. III'06	Triw. II'06	Triw. III'06
1. Pertanian	12.210,12	12.657,26	5.482,86	5.643,21
2. Pertambangan dan Penggalian	778,52	814,41	303,22	313,68
3. Industri Pengolahan	9.782,10	10.282,60	6.081,09	6.233,58
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	463,27	459,22	208,7	204,65
5. Bangunan	1.579,76	1.634,26	1.130,25	1.162,16
6. Perdag., Hotel dan Restoran	7.257,22	7.722,16	4.800,10	4.969,75
7. Pengangkutan dan Komunikasi	2.946,88	3.100,38	1.494,93	1.553,35
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan	2.073,18	2.198,93	1.209,70	1.259,48
9. Jasa-Jasa	3.344,01	3.481,05	1.986,77	2.041,32
<b>PDRB Sumatera Utara</b>	<b>40.435,07</b>	<b>42.350,27</b>	<b>22.697,61</b>	<b>23.381,19</b>

*Keterangan : \*) Angka Sementara*

Peningkatan sebesar 3,01% pada triwulan III-2006 disebabkan oleh adanya peningkatan di hampir semua sektor ekonomi. Peningkatan terbesar terjadi di sektor keuangan dan jasa perusahaan, diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertambangan dan penggalian, yang mana pertumbuhan untuk tiap

<sup>2</sup> Hasil Survei Indikator Ekonomi Triwulanan Sumut, kerjasama Bank Indonesia Medan dan BPS-SU.

sektor tersebut berada di atas tiga persen. Sementara yang mengalami pertumbuhan di bawah tiga persen antara lain sektor pertanian, sektor bangunan, sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan. Selanjutnya penurunan pertumbuhan masih terjadi pada sektor listrik, gas dan air bersih.

Tabel 1.2.  
Laju Pertumbuhan PDRB Triwulanan Sumut Atas Dasar Harga Konstan 2000  
Menurut Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha  
Triwulan II - III Tahun 2006 \*) (%)

Sektor Ekonomi/ Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan		Trw. III'06 thd.III'05	Struktur	
	Trw. II'06	Trw.III'06		Trw.II'06	Trw.III'06
1. Pertanian	-4,86	2,92	2,65	30,2	29,89
2. Pertambangan dan Penggalian	0,48	3,45	4,13	1,93	1,92
3. Industri Pengolahan	-1,26	2,51	1,67	24,19	24,28
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	-3,99	-1,94	-0,91	1,15	1,08
5. Bangunan	-0,74	2,82	3,19	3,91	3,86
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	-1,35	3,53	13,49	17,95	18,23
7. Pengangkutan dan Komunikasi	-2,33	3,91	8,24	7,29	7,32
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan	5	4,11	16,64	5,13	5,19
9. Jasa-Jasa	5,35	2,75	13,62	8,27	8,22
<b>PDRB Sumatera Utara</b>	<b>-1,37</b>	<b>3,01</b>	<b>6,5</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Keterangan : \*) Angka Sementara*

PDRB triwulan III-2006 dibanding dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, mencerminkan perubahan yang tidak dipengaruhi oleh faktor musim. PDRB triwulan III-2006 dibandingkan dengan triwulan III-2005 secara total tumbuh sebesar 6,50%. Pertumbuhan ini didukung oleh hampir semua sektor ekonomi, kecuali sektor listrik, gas dan air bersih. Pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor keuangan dan jasa perusahaan sebesar 16,64%, diikuti sektor jasa-jasa sebesar 13,62%, sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tumbuh sebesar 13,49%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,24%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 4,13%, sektor bangunan sebesar 3,19%, sektor pertanian sebesar 2,65% dan sektor industri pengolahan sebesar 1,67%. Di lain pihak sektor listrik, gas dan air bersih mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 0,91%.

Peranan sektor ekonomi pada triwulan III-2006 jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, mengalami perubahan akibat adanya fluktuasi harga-harga hampir di semua komoditi ekonomi. Peranan terbesar masih berasal dari sektor pertanian, diikuti sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Peranan terendah masih berasal dari sektor listrik, gas dan air bersih.

Perbandingan peranan antar sektor ekonomi, menunjukkan bahwa lebih dari setengah PDRB Sumatera Utara masih berasal dari sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Masing-masing sektor ini memberikan kontribusi sebesar 29,89% dan 24,28% terhadap total PDRB Sumatera Utara. Jika melihat struktur ekonomi pada triwulan II-2006 yang lalu, sektor pertanian memberikan peranan sebesar 30,20% dan sektor industri pengolahan sebesar 24,19%. Peranan nilai tambah sektor pertanian dalam pembentukan PDRB harga berlaku triwulan III-2006 mengalami penurunan sebesar 0,31 point.

Pembahasan lebih rinci perubahan dari setiap sektor menurut hasil survei indikator ekonomi triwulanan dibahas dalam uraian berikut ini.

## **B. Perkembangan PDRB Sektoral**

### **1. Sektor Pertanian**

Sektor pertanian selama ini mempunyai siklus pertumbuhan dengan pola hampir sama setiap triwulan dalam satu tahun. Akan tetapi akibat adanya pola perubahan iklim dan alih fungsi lahan pertanian yang digunakan untuk hal lain menyebabkan adanya pergeseran pola produksi khususnya di sektor pertanian di tahun ini, sehingga akan mempengaruhi pola pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pada triwulan III-2006, dengan mengamati pola laju pertumbuhan di sektor pertanian terlihat adanya perbedaan bila dibandingkan dengan pola laju pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Jika pada triwulan II-2006 pertumbuhan sub sektor tanaman bahan makanan tumbuh negatif, namun pada triwulan III-006 sub sektor ini justru mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,67%. Hal yang sama juga terjadi di semua sub sektor, kecuali sub sektor peternakan dan sub sektor kehutanan. Sub sektor perkebunan pada triwulan II-2006 mengalami pertumbuhan negatif, namun pada triwulan III-2006 mengalami pertumbuhan positif 5,11%. Sementara sub sektor perikanan mengalami perlambatan pertumbuhan, dimana pada triwulan II-2006 sub sektor ini mampu tumbuh sebesar 3,27% namun pada triwulan ini melambat menjadi hanya 1,73%.

Tabel 1.3.  
Laju Pertumbuhan dan Struktur Sektor Pertanian Menurut Sub Sektor Pertanian  
Triwulan II - III Tahun 2006 \*)  
(%)

Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan		Trw.III'06 thd. III'05	Struktur	
	Trw.II'06	Trw.III'06		Trw.II'06	Trw.III'06
1. Tanaman Bahan Makanan	-12,08	3,67	3,75	9,13	9,18
2. Perkebunan	-2,08	5,11	4,53	10,85	10,76
3. Peternakan	-4,13	-0,79	-17,55	4,78	4,66
4. Kehutanan	-2,76	-8,58	14,32	1,51	1,51
5. Perikanan	3,27	1,73	9,5	3,93	3,78
<b>Pertanian</b>	<b>-4,86</b>	<b>2,92</b>	<b>2,65</b>	<b>30,2</b>	<b>29,89</b>

*Keterangan : \*) Angka Sementara*

Selanjutnya sub sektor peternakan dan sub sektor kehutanan masih mengalami kemerosotan kinerja dimana sebelumnya pada sub sektor II-2006 kedua sub sektor ini tumbuh negatif masing-masing minus 4,13% dan minus 2,76% dan pada triwulan III-2006 masing-masing tumbuh minus 0,79% dan minus 8,58%. Secara total jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh minus 4,86%, maka pada triwulan III-2006 ini sektor pertanian mengalami peningkatan 2,92%.

### **1.1 Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan**

Sub sektor tanaman bahan makanan (tabama) meliputi kegiatan usaha komoditi padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan. Pada triwulan III-2006, sub sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 3,67% setelah triwulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 12,08%.

Adanya peningkatan nilai tambah sub sektor tabama pada triwulan III-2006 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, mengakibatkan peningkatan kontribusi pada PDRB Sumatera Utara. Pada triwulan II-2006, sub sektor tabama memberikan peranan sebesar 9,13%, pada triwulan III-2006 memberikan peranan sebesar 9,18%. Adanya sedikit peningkatan kontribusi sub sektor tabama terhadap PDRB Sumatera Utara membawa sub sektor ini tetap menjadi penyumbang terbesar kedua pada sektor pertanian setelah sub sektor perkebunan.

Tabel 1.4.  
Peranan Kabupaten/Kota Terhadap NTB Atas Dasar Harga Berlaku  
Tanaman Padi dan Palawija Triwulan III-2006  
(%)

Kabupaten/Kota	Padi	Jagung	Kacang Kedelai	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Ubi Jalar	Ubi Kayu
1. Nias	5.04	0.17	2.48	0.26	0.23	8.03	0.00
2. Mandailing Natal	7.72	1.66	20.69	2.52	3.22	1.58	1.26
3. Tapanuli Selatan	12.02	1.25	12.38	12.87	5.00	3.19	2.46
4. Tapanuli Tengah	5.08	0.17	0.86	6.90	1.32	0.63	1.75
5. Tapanuli Utara	4.45	0.99	0.22	0.00	12.95	7.72	3.54
6. Toba Samosir	1.45	1.68	1.58	2.74	2.81	7.50	4.69
7. Labuhan Batu	4.43	1.43	14.93	3.66	2.04	2.68	1.81
8. Asahan	2.67	2.09	3.13	2.71	0.60	0.78	2.58
9. Simalungun	17.04	26.06	12.97	17.66	23.31	45.34	24.11
10. Dairi	4.37	16.16	0.00	0.00	22.25	2.69	0.89
11. Karo	1.46	26.46	0.00	3.84	8.28	5.42	0.00
12. Deli Serdang	23.15	15.19	6.89	20.06	9.79	9.09	49.38
13. Langkat	8.12	5.81	23.54	22.91	4.06	1.74	2.37
14. Sibolga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Tanjung Balai	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
16. Pematang	0.87	0.33	0.00	0.00	1.24	0.27	0.76
17. Tebing Tinggi	0.15	0.00	0.12	0.09	0.02	0.12	0.84
18. Medan	0.96	0.31	0.00	3.00	1.92	2.76	2.13
19. Binjai	0.37	0.18	0.12	0.38	0.72	0.23	0.98
20. P. Sidempuan	0.66	0.05	0.10	0.39	0.24	0.23	0.32
<b>Sumatera Utara</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumbangan terbesar dalam pembentukan NTB sub sektor tabama dan juga pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan pada sub sektor ini, utamanya berasal dari komoditi padi. Berdasarkan hasil panen padi selama triwulan III tahun 2006 menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, produksi padi terbesar berasal dari Kabupaten Deli Serdang dengan peranan sebesar 23,15% dari total produksi Sumatera Utara. Sementara yang berada di urutan kedua berasal dari Kabupaten Simalungun sebesar 17,04%, diikuti oleh Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 12,02%, Kabupaten Langkat sebesar 8,12%, Kabupaten Mandailing Natal sebesar 7,72%, Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 5,08%, Kabupaten Nias sebesar 5,04%. Sementara daerah-daerah lainnya peranannya hanya berkisar dibawah lima persen.

Untuk tanaman palawija lainnya seperti jagung, sumber produksi terbesar berasal dari Karo sebesar 26,46%, Kabupaten Simalungun sebesar 26,06%, Kabupaten Dairi sebesar 16,16%, Kabupaten Deli Serdang sebesar 15,19%, Kabupaten Langkat sebesar 5,81%. Sementara daerah lainnya berkisar di bawah tiga persen. Selengkapnya peranan kabupaten/kota di Sumatera

Utara terhadap PDRB untuk tanaman padi dan palawija, dapat dilihat pada tabel I.4. di atas.

### **1.2 Sub Sektor Perkebunan**

Sub sektor perkebunan yang meliputi tanaman keras seperti komoditi kelapa sawit, karet, coklat dan lainnya, pada triwulan III-2006 secara agregat menunjukkan peningkatan produksi, yaitu sebesar 5,11%, setelah triwulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 2,08%. Sementara jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, sub sektor perkebunan juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 4,53%.

Jika dilihat dari peranan terhadap total PDRB Sumatera Utara, sub sektor ini merupakan penyumbang terbesar dari sektor pertanian, dimana peranannya pada triwulan III-2006 sebesar 10,76% sedikit lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 10,85%.

### **1.3 Sub Sektor Peternakan**

Sub sektor peternakan pada triwulan III-2006 mengalami penurunan sebesar 0,79%, setelah pada triwulan II-2006 mengalami penurunan sebesar 4,13%. Kontribusi sub sektor ini terhadap total PDRB mengalami sedikit mengalami penurunan. Pada triwulan III-2006 peranan sub sektor ini terhadap total PDRB Sumatera Utara sebesar 4,66% dan pada triwulan II-2006 memberikan kontribusi sebesar 4,78%.

### **1.4 Sub Sektor Kehutanan**

Kegiatan sub sektor kehutanan pada triwulan III-2006 kembali anjlok hingga minus 8,58% setelah pada triwulan sebelumnya juga mengalami penurunan sebesar minus 2,76%. Dampak dari penurunan ini tidak membawa pengaruh terhadap peranan sub sektor ini terhadap pembentukan PDRB Sumatera Utara yang tidak mengalami perubahan dari triwulan sebelumnya yaitu sebesar 1,51%.

### **1.5 Sub Sektor Perikanan**

Hasil pengamatan yang diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa dari semua sub sektor yang ada hanya sub sektor perikanan yang mengalami perlambatan. Sub sektor ini tumbuh sebesar 1,73%, setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 3,27%. Kontribusi sub sektor ini terhadap total

PDRB pada triwulan III-2006 sebesar 3,78%, atau turun sebesar 0,15 point dari triwulan II-2006 yang sebesar 3,93%.

## **2. Sektor Pertambangan dan Penggalian**

Sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan III-2006 mengalami peningkatan yang cukup berarti, dimana hanya tumbuh sebesar 0,48% pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 3,45%. Peningkatan kinerja yang terjadi di sektor ini sebagai imbas dari peningkatan kinerja pada kegiatan sub sektor minyak dan gas bumi dan sub sektor penggalian. Kedua sub sektor ini masing-masing mengalami pertumbuhan yang relatif baik, masing-masing sebesar 4,96% untuk sub sektor minyak dan gas bumi dan 2,18% untuk sub sektor penggalian.

## **3. Sektor Industri Pengolahan**

Sektor ini meliputi sub sektor industri migas dan industri non migas, dimana industri non migas merupakan salah satu motor penggerak roda perekonomian setelah sektor pertanian di Sumatera Utara.

Kegiatan industri pengilangan migas di Sumatera Utara setiap triwulannya selalu berfluktuasi, adanya kecenderungan berfluktuasinya produksi pertambangan Migas di Sumatera Utara mempengaruhi pertumbuhan triwulanan pada sub sektor industri migas ini. Pada triwulan III-2006 industri pengilangan migas mengalami peningkatan sebesar 2,88% dari minus 1,31% pada triwulan sebelumnya. Namun peningkatan kinerja sub sektor ini tidak berdampak pada sumbangannya terhadap total PDRB. Hal ini terlihat dari stagnannya sumbangan sub sektor ini di level 0,24%.

Kegiatan industri pengolahan non migas pada triwulan ini menunjukkan kinerja yang meningkat. Dari pemantauan survei ini, komoditi industri pengolahan non migas mengalami peningkatan sebesar 2,51%, dimana pada triwulan sebelumnya turun sebesar 1,25%. Peningkatan kinerja sub sektor ini dipicu dari meningkatnya pertumbuhan di semua industri non migas kecuali industri barang kayu dan hasil hutan lainnya. Peningkatan tertinggi berasal dari industri makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,99% diikuti oleh industri barang lainnya yang tumbuh sebesar 3,20%, industri alat angkutan, mesin dan peralatannya sebesar 2,74%, industri logam dasar besi dan baja sebesar 2,25%, industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki sebesar 2,20%, industri semen dan barang galian bukan logam sebesar 2,04%. Selanjutnya diikuti oleh industri



kertas dan barang cetakan serta industri pupuk, kimia dan barang dari karet yang masing-masing tumbuh sebesar 1,66% dan 0,58%. Sementara yang mengalami pertumbuhan negatif adalah industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya sebesar 1,06%.

Tabel 1.5.  
Laju Pertumbuhan dan Struktur Sektor Industri Triwulan II - III Tahun 2006 \*)  
(%)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan		Terhadap Trw.III'05	Struktur	
	Trw.II'06	Trw.III'06		Trw.II'06	Trw.III'06
1. Industri Migas	-1,31	2,88	-7,63	0,24	0,24
2. Industri Non Migas	-1,25	2,51	1,74	23,96	24,04
a. Makanan, Minuman & Tembakau	1,05	3,99	5,7	10,59	10,64
b. Tekstil, Barang. Kulit & Alas kaki	-5,67	2,2	-10,89	1,94	1,97
c. Barang. Kayu dan Hasil Hutan	-0,76	-1,06	7,33	2,24	2,27
d. Kertas dan Barang Cetakan	-1,9	1,66	22,73	0,3	0,3
e. Pupuk, Kimia & Barang dr Karet	-2,93	0,58	-8,49	4,14	4,07
f. Semen dan Galian Bukan Logam	2,24	2,04	20,55	1,2	1,22
g. Logam Dasar Besi dan Baja	-4,92	2,25	6,71	1,32	1,33
h. Alat Angk. Mesin dan Peralatan	-4,17	2,74	2,24	1,7	1,71
i. Barang Lainnya	-8,79	3,2	-0,36	0,52	0,52
<b>Industri</b>	<b>-1,26</b>	<b>2,51</b>	<b>1,67</b>	<b>24,19</b>	<b>24,28</b>

Keterangan : \*) Angka Sementara

Kontribusi sektor ini terhadap total PDRB mengalami sedikit kenaikan, yaitu dari sebesar 24,19% pada triwulan II-2006 menjadi 24,28% pada triwulan III-2006.

#### 4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih pada triwulan III-2006 mengalami penurunan, yaitu sebesar 1,94%, setelah triwulan sebelumnya juga mengalami penurunan kinerja sebesar minus 3,99%. Penurunan ini dipicu dari menurunnya kinerja sektor listrik. Kinerja sektor ini mengalami penurunan sebesar 3,85%. Meskipun tidak sampai mengalami penurunan kinerja, namun sub sektor gas kota juga mengalami perlambatan kinerja. Jika pada triwulan sebelumnya sektor ini mampu tumbuh sebesar 5,82%, namun di triwulan ini melambat menjadi 0,24%. Di lain sisi pertumbuhan air bersih menunjukkan arah yang positif dan membaik. Meskipun tidak mengalami kenaikan yang relatif besar namun sektor ini mampu tumbuh sebesar 5,16% pada triwulan ini dari 4,88% pada triwulan sebelumnya.

Tabel1.6.  
Laju Pertumbuhan dan Struktur Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih  
Triwulan II - III Tahun 2006 \*)  
(%)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan		Trw.III'06 thd.III'05	Struktur	
	Trw.II'06	Trw.III'06		Trw.II'06	Trw.III'06
1. Listrik	-6,77	-3,85	-3,82	0,8	0,74
2. Gas Kota	5,82	0,24	8,42	0,2	0,19
3. Air Bersih	4,88	5,16	7,74	0,15	0,15
<b>Listrik, Gas dan Air</b>	<b>-3,99</b>	<b>-1,94</b>	<b>-0,91</b>	<b>1,15</b>	<b>1,08</b>

*Keterangan : \*) Angka Sementara*

Peranan keseluruhan sektor listrik, gas dan air bersih terhadap total PDRB triwulan III-2006 sebesar 1,08 % atau mengalami penurunan yaitu sebesar 0,07 point, bila dibandingkan dengan triwulan II 2006.

## 5. Sektor Bangunan

Pada triwulan II-2006, kinerja sektor bangunan mengalami peningkatan kinerja sebesar 2,82% setelah pada triwulan II-2006 mengalami penurunan sebesar minus 0,74%. Lebih jauh lagi jika kondisi triwulan ini dibandingkan terhadap triwulan yang sama tahun 2005, sektor bangunan mengalami peningkatan kinerja yang lebih baik lagi yaitu sebesar 3,19%.

## 6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor ini merupakan sektor penentu kemajuan sektor-sektor lainnya sebab sektor ini penggerak utama roda perekonomian. Kinerja sektor perdagangan pada triwulan III-2006 cukup menggembirakan. Jika pada triwulan sebelumnya sektor ini mengalami kemunduran kinerja mencapai minus 1,35%, sebaliknya pada triwulan III-2006, sektor ini tumbuh sebesar 3,53%. Pemicu dari meningkatnya kinerja di sektor ini disebabkan oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran yang semula tumbuh minus sebesar 1,62%, menjadi tumbuh positif sebesar 3,57%. Begitu juga halnya dengan sub sektor hotel yang pada triwulan sebelumnya hanya mampu tumbuh 0,92%, meningkat menjadi sebesar 2,55% pada triwulan ini. Namun tidak begitu halnya dengan sub sektor restoran. Sub sektor ini sedikit mengalami perlambatan, jika pada triwulan II-2006 mampu tumbuh sebesar 3,21%, namun melemah menjadi 3,06% pada triwulan III-2006.

Tabel 1.7.  
Laju Pertumbuhan dan Struktur Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran  
Triwulan II - III Tahun 2006 \*)  
(%)

Sektor/Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan		Trw.III'06 thd.III'05	Struktur	
	Trw.II'06	Trw.III'06		Trw.II'06	Trw.III'06
1. Perdagangan	-1,62	3,57	13,36	16,37	16,64
2. Hotel	0,92	2,55	6,71	0,22	0,23
3. Restoran	3,21	3,06	17,46	1,36	1,37
<b>Perdagangan, Hotel &amp; Rest.</b>	<b>-1,35</b>	<b>3,53</b>	<b>13,49</b>	<b>17,95</b>	<b>18,23</b>

Keterangan : \*) Angka Sementara

Secara keseluruhan telah terjadi peningkatan kinerja pada sektor ini yang ternyata didukung oleh ketiga sub sektor yang bersangkutan. Jika Pada triwulan II-2006 sektor ini menyumbang 17,95% maka pada triwulan III-2006 menjadi sebesar 18,23%.

### 6.1 Sub Sektor Perdagangan

Pada triwulan III-2006 pertumbuhan sub sektor ini meningkat tajam hingga sebesar 3,57%. Peningkatan sub sektor ini di duga sebagai akibat dari meningkatnya output sektor pertanian dan sektor industri pengolahan yang secara langsung mampu mendukung kondisi sub sektor perdagangan.

Peningkatan kinerja sub sektor perdagangan berdampak pada peranannya terhadap total PDRB Sumatera Utara. Hal ini dapat dilihat dari peranan pada triwulan II-2006 sebesar 16,37 %, menjadi 16,64 % pada triwulan III-2006.

### 6.2 Sub Sektor Hotel

Kinerja sub sektor ini juga mengalami peningkatan terhadap triwulan sebelumnya. Pada triwulan II-2006 sub sektor ini tumbuh sebesar 0,92% dan pada triwulan III-2006 sub sektor ini hanya mampu tumbuh sebesar 2,55%. Begitu juga dengan peranan sub sektor ini juga sedikit mengalami peningkatan, dari 0,22% pada triwulan sebelumnya menjadi 0,23% pada triwulan III-2006.

### 6.3 Sub Sektor Restoran

Tidak seperti dua sub sektor sebelumnya, kondisi sub sektor restoran jelas berbeda sekali. Jika pada triwulan II-2006 sub sektor ini tumbuh sebesar 3,21%, namun pada triwulan III-2006 kinerja melambat menjadi 3,06%. Tetapi peranan

sub sektor restoran justru sedikit mengalami peningkatan di triwulan ini. Jika di triwulan sebelumnya hanya memberikan sumbangan sebesar 1,36% terhadap total keseluruhan nilai PDRB, maka pada triwulan ini sebesar 1,37%.

## 7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Kinerja sektor pengangkutan dan komunikasi pada triwulan III-2006 meningkat. Sektor ini mampu tumbuh sebesar 3,91%, dimana pada triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan minus 2,33%. Perannya terhadap pembentukan PDRB Sumatera Utara naik. Jika pada triwulan sebelumnya mampu menyumbang sebesar 7,29%, maka pada triwulan ini perannya naik menjadi 7,32%.

Tabel 1.8.  
Laju Pertumbuhan dan Struktur Sektor Pengangkutan dan Komunikasi  
Triwulan II - III Tahun 2006 \*)  
(%)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan		Trw.III'06 thd.III'05	Struktur	
	Trw.II'06	Trw.III'06		Trw.II'06	Trw.III'06
1. Pengangkutan	-4,21	3,96	5,37	5,75	5,77
a. Angkutan Rel	-6,16	3,51	3,24	0,03	0,03
b. Angkutan Jalan Raya	-4,23	3,84	3,81	3,67	3,69
c. Angkutan Laut dan ASDP	-10,03	1,56	-6,15	0,31	0,31
d. Angkutan Udara	0,29	4,68	31,96	0,66	0,66
e. Jasa Penunjang Angkutan	-3,66	4,88	5,5	1,08	1,08
2. Komunikasi	3,68	3,74	17,73	1,54	1,55
<b>Pengangkutan dan Komunikasi</b>	<b>-2,33</b>	<b>3,91</b>	<b>8,24</b>	<b>7,29</b>	<b>7,32</b>

Keterangan : \*) Angka Sementara

### 7.1 Sub Sektor Pengangkutan

Meningkatnya kinerja sub sektor ini dipicu oleh semua kegiatan pada sub sektor ini. Jika dilihat kinerja kegiatan, maka kinerja jasa penunjang angkutan mengalami peningkatan tertinggi selama triwulan III-2006 yaitu sebesar 4,88%. Peningkatan kinerja lainnya diikuti oleh angkutan udara yang meningkat hingga sebesar 4,68 %, angkutan jalan raya sebesar 3,84% dan angkutan rel sebesar 3,51%. Sementara angkutan laut mengalami pertumbuhan yang paling kecil yaitu sebesar 1,56%.

Dengan kondisi peningkatan kinerja di semua kegiatan angkutan tersebut maka peranan sub sektor pengangkutan juga meningkat. Jika pada triwulan sebelumnya sub sektor ini mampu memberikan sumbangan sebesar 5,75% terhadap total PDRB Sumatera Utara, maka pada triwulan ini mampu menyumbang sebesar 5,77%.

## 7.2 Sub Sektor Komunikasi

Kondisi yang tak jauh beda juga terlihat pada sub sektor komunikasi, yang mana kinerja sub sektor ini juga mengalami peningkatan. Jika pada triwulan II-2006 sub sektor komunikasi tumbuh sebesar 3,68%, maka pada triwulan III-2006 menguat menjadi 3,74%. Hal yang sama juga berlaku untuk peranan sub sektor komunikasi terhadap total PDRB Sumatera Utara yang juga naik. Jika pada triwulan II-2006 sub sektor ini memberikan kontribusi sebesar 1,54% maka pada triwulan III-2006 mampu menyumbang sebesar 1,55%.

## 8. Sektor Keuangan dan Jasa Perusahaan

Kinerja sektor keuangan dan jasa perusahaan pada triwulan III-2006 sedikit mengalami perlambatan. Jika pada triwulan II-2006 sektor ini mampu tumbuh sebesar 5,00%, namun pada triwulan III-2006 melemah menjadi 4,11%. Tidak begitu halnya dengan peranan sektor ini terhadap total PDRB Sumatera Utara, dimana peranan sektor ini pada triwulan II-2006 sebesar 5,13% dan kemudian mengalami peningkatan menjadi 5,19% pada triwulan III-2006 atau naik sebanyak 0,06 point.

Tabel 1.9.  
Laju Pertumbuhan dan Struktur Sektor Keuangan dan Jasa Perusahaan  
Triwulan II - III Tahun 2006 \*)  
(%)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan		Trw.III'06 thd.III'05	Struktur	
	Trw.II'06	Trw.III'06		Trw.II'06	Trw.III'06
1. Bank dan Lembaga Keu.	5,53	5,6	9,24	1,99	2,03
2. Sewa bangunan	4,4	3,05	20,71	2,73	2,76
3. Jasa Perusahaan	8,88	6,7	27,36	0,41	0,39
<b>Keuangan &amp; Jasa</b>	<b>5</b>	<b>4,11</b>	<b>16,67</b>	<b>5,13</b>	<b>5,19</b>

Keterangan : \*) Angka Sementara

### 8.1 Sub Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lain

Pada triwulan III-2006 pertumbuhan sub sektor bank dan lembaga keuangan lainnya mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya. Jika pada triwulan II-2006 sub sektor mengalami pertumbuhan sebesar 5,53 %, maka pada triwulan ini meningkat sebesar 5,60 %. Demikian pula dengan peranannya terhadap total PDRB Sumatera Utara mengalami kenaikan. Pada triwulan II-2006 peranannya sebesar 1,99 %, maka pada triwulan III-2006 peranannya naik menjadi sebesar 2,03 %.

## **8.2 Sub Sektor Sewa Bangunan**

Kinerja sub sektor sewa bangunan pada triwulan ini mengalami perlambatan, yaitu hanya mampu tumbuh sebesar 3,05% setelah peningkatan sebesar 4,40% pada triwulan sebelumnya. Walaupun sub sektor ini mengalami perlambatan, namun peranannya dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan meningkat. Pada triwulan sebelumnya sub sektor ini memberikan kontribusi sebesar 2,73% dan meningkat menjadi 2,76% pada triwulan III-2006.

## **8.3 Sub Sektor Jasa Perusahaan**

Kondisi yang sama dengan sub sektor sewa bangunan dialami oleh sub sektor ini. Kinerja sub sektor jasa perusahaan pada triwulan II-2006 sebesar 8,88% dan pada triwulan III-2006 mengalami pertumbuhan yang melambat yaitu sebesar 6,70%. Kondisi yang sama juga terlihat pada peranan sub sektor ini terhadap total PDRB Sumatera Utara. Sumbangan yang diberikan sub sektor ini sebesar 0,39% pada triwulan III-2006 lebih kecil dari sumbangan yang diberikannya pada triwulan II-2006 yang sebesar 0,41%.

## **9. Sektor Jasa-Jasa**

Pada triwulan III-2006, kinerja sektor jasa-jasa menunjukkan pertumbuhan yang melambat, dimana pada triwulan ini sektor jasa-jasa mampu tumbuh sebesar 2,75 % lebih rendah bila dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,35 %. Dilihat dari peranannya terhadap PDRB Sumatera Utara, sektor jasa-jasa memberikan peranan sebesar 8,22 % pada triwulan ini, turun dibanding triwulan sebelumnya sebesar 8,27 %.

### **9.1 Sub Sektor Jasa Pemerintahan Umum**

Sub sektor jasa pemerintahan umum pada triwulan III-2006 mengalami perlambatan hingga hanya mampu tumbuh sebesar 2,91% jauh lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,20%. Perlambatan kinerja sub sektor ini ternyata tidak diikuti dengan peranannya terhadap PDRB Sumatera Utara dari 5,88 % pada triwulan sebelumnya, naik menjadi sebesar 5,91% pada triwulan III-2006.

Tabel 1.10.  
Laju Pertumbuhan dan Struktur Sektor Jasa-Jasa Triwulan II - III Tahun 2006 \*)  
(%)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan		Trw.III'06 thd.III'05	Struktur	
	Trw.II'06	Trw.III'06		Trw.II'06	Trw.III'06
1. Pemerintahan Umum	8,2	2,91	13,99	5,88	5,91
2. Swasta	-1,85	2,28	12,59	2,39	2,31
a. Sosial Kemasyarakatan	1,86	2,52	5,77	0,75	0,74
b. Hiburan dan Rekreasi	-2,24	3,24	17,94	0,3	0,29
c. Perorangan & RT	-4,14	1,76	15,85	1,34	1,28
<b>Jasa-Jasa</b>	<b>5,35</b>	<b>2,75</b>	<b>13,62</b>	<b>8,27</b>	<b>8,22</b>

Keterangan : \*) Angka Sementara

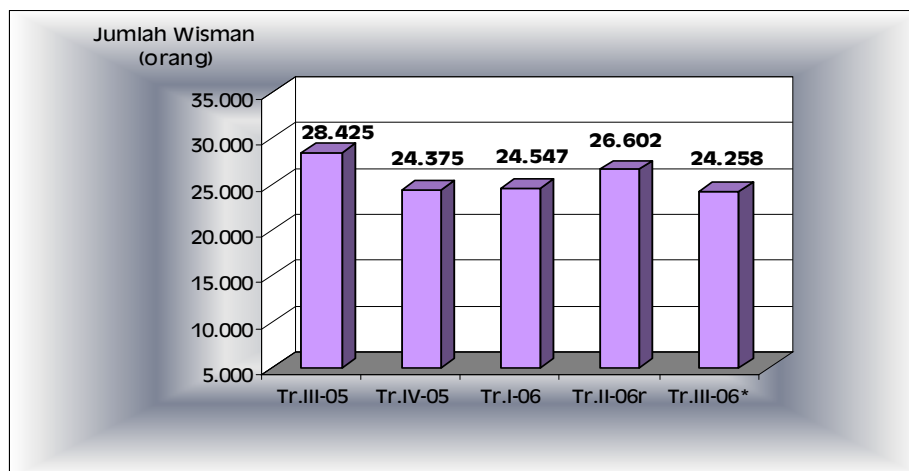
## 9.2 Sub Sektor Jasa Swasta

Pertumbuhan sub sektor jasa swasta pada triwulan III-2006 meningkat menjadi sebesar 2,28% setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh minus 1,85%. Peningkatan kinerja sub sektor ini dipicu oleh meningkatnya kinerja semua kelompok sub sektor. Jika pada triwulan sebelumnya sub sektor jasa sosial kemasyarakatan hanya mampu tumbuh sebesar 1,86% maka pada triwulan III-2006 menguat menjadi 2,52%. Kondisi yang sama juga diikuti oleh sub sektor hiburan dan rekreasi yang tumbuh positif 3,24% dari minus 2,24%. Begitu juga halnya dengan sub sektor jasa perorangan dan rumahtangga yang tumbuh dari minus 4,14% pada triwulan II-2006 menjadi tumbuh positif sebesar 1,76%. Meningkatnya kinerja sub sektor jasa swasta pada triwulan III-2006 ternyata tidak mempengaruhi peranan sub sektor ini terhadap total PDRB secara keseluruhan. Jika pada triwulan sebelumnya sektor ini mampu memberikan peranan sebesar 2,39% maka pada triwulan III-2006 peranannya turun tipis menjadi 2,31%.

### C. Pariwisata Sumatera Utara Triwulan

Pada triwulan III tahun 2006, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Sumatera Utara melalui pintu masuk Bandara Polonia diperkirakan mencapai 24.258 orang. Secara umum wisatawan mancanegara yang datang ke Sumatera Utara sebagian besar berkebangsaan Malaysia, Belanda dan Singapura. Kedatangan wisatawan mancanegara dengan menggunakan visa terbanyak berasal dari negara Belanda, sedangkan wisatawan dari Malaysia lebih banyak yang datang tanpa menggunakan visa.

Grafik 1.1.  
Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Sumut melalui Polonia  
Triwulan III 2005 - Triwulan III 2006

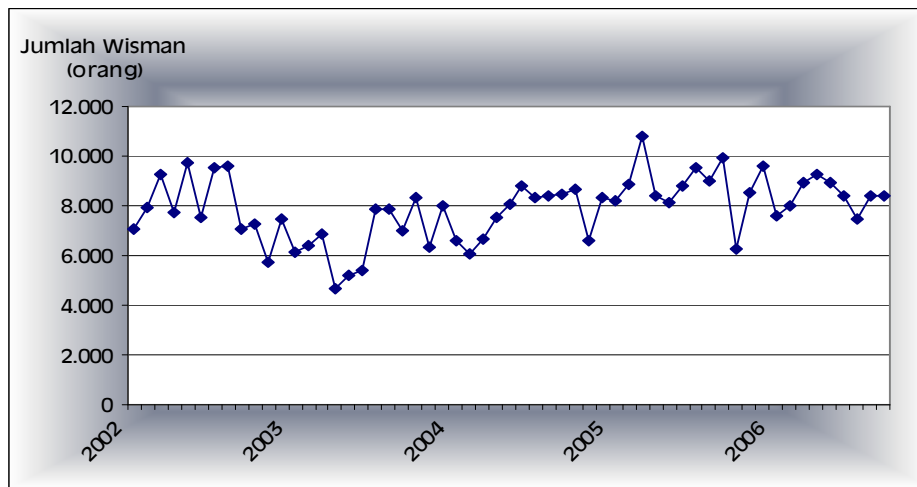


Keterangan: r) Triwulan II 2006 merupakan angka revisi  
\*) Triwulan III 2006 masih Angka Perkiraan

Berbeda dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya, angka wisman di triwulan ini menunjukkan adanya penurunan dari angka triwulan sebelumnya. Penurunan yang terjadi sekitar 8,81 % dari jumlah wisman yang tercatat sebanyak 26.602 orang pada triwulan II tahun 2006. Demikian juga jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2005, jumlah wisman pada triwulan ini mengalami penurunan sebesar 14,66 %.



Grafik 1.2.  
Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Sumut melalui Polonia  
Januari 2002 – September 2006



Keterangan: Agustus dan September 2006 masih Angka Perkiraan

Secara kumulatif, sampai dengan September 2006, jumlah wisman yang berkunjung ke Sumatera Utara melalui pintu gerbang Polonia sekitar 75.407 orang. Sementara itu pada periode yang sama tahun 2005 jumlah wisman yang tercatat sebanyak 81.694 orang. Membandingkan kedua periode tersebut, terjadi penurunan jumlah wisman di tahun 2006 sebesar 7,70%. Hal ini sangat disayangkan melihat kunjungan wisman selama tahun 2005 menunjukkan angka yang cukup mengembirakan.

Menurunnya jumlah wisman pada triwulan ini cukup memprihatinkan mengingat potensi wisata Sumatera Utara yang sangat lengkap seperti agrowisata, wisata pantai dan *special interesting* seperti arung jeram. Sayangnya potensi ini seolah tak punya arti karena tidak tergarap dengan baik. Minimnya anggaran dana untuk pengembangan obyek pariwisata dan biaya promosi serta kurangnya sarana akomodasi dan transportasi mungkin bisa dijadikan salah satu penyebab menurunnya sektor pariwisata.

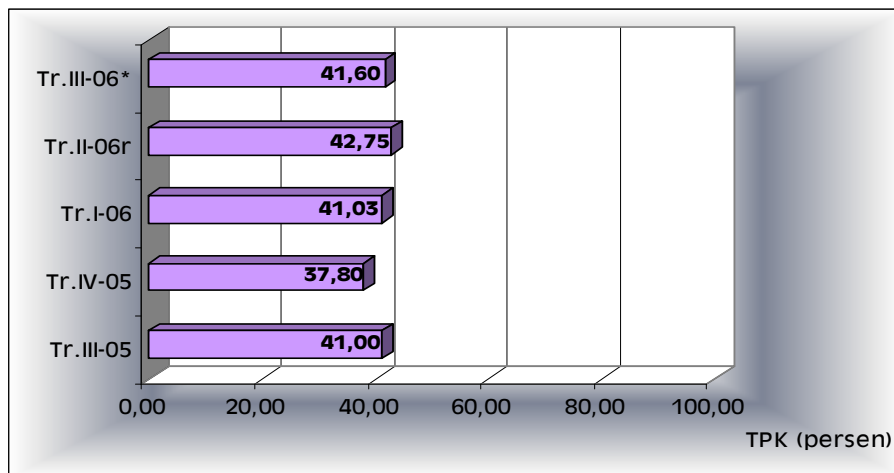
Dengan menggunakan slogan *Ultimate in Diversity* seharusnya bisnis pariwisata mampu melibatkan semua lapisan, baik pemerintah maupun masyarakat. Jika sektor ini bisa digarap secara profesional, maka tidak tertutup kemungkinan obyek-obyek wisata di Sumatera Utara akan mampu menarik minat wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.

Selain jumlah wisatawan yang berkunjung, indikator pariwisata lain yang dapat menggambarkan kondisi dunia pariwisata adalah Tingkat Penghunian

Kamar Hotel (TPK). Tingginya TPK suatu hotel mencerminkan tingginya aktivitas perhotelan, sebaliknya rendahnya TPK suatu hotel mencerminkan rendahnya aktivitas perhotelan suatu daerah.

Pada Triwulan III 2006, rata-rata TPK Hotel Berbintang di Sumatera Utara diperkirakan mencapai 41,60 %. %tase ini menurun 1,14% dibandingkan rata-rata TPK Hotel Berbintang triwulan sebelumnya yang mencapai 42,75%. Namun jika dibandingkan dengan kondisi di triwulan III tahun 2005, rata-rata TPK Hotel Berbintang pada triwulan III 2006 ini lebih tinggi sekitar 0,60 %.

Grafik 1.3.  
Rata-rata Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang di Sumatera Utara  
Triwulan III 2005 – Triwulan III 2006



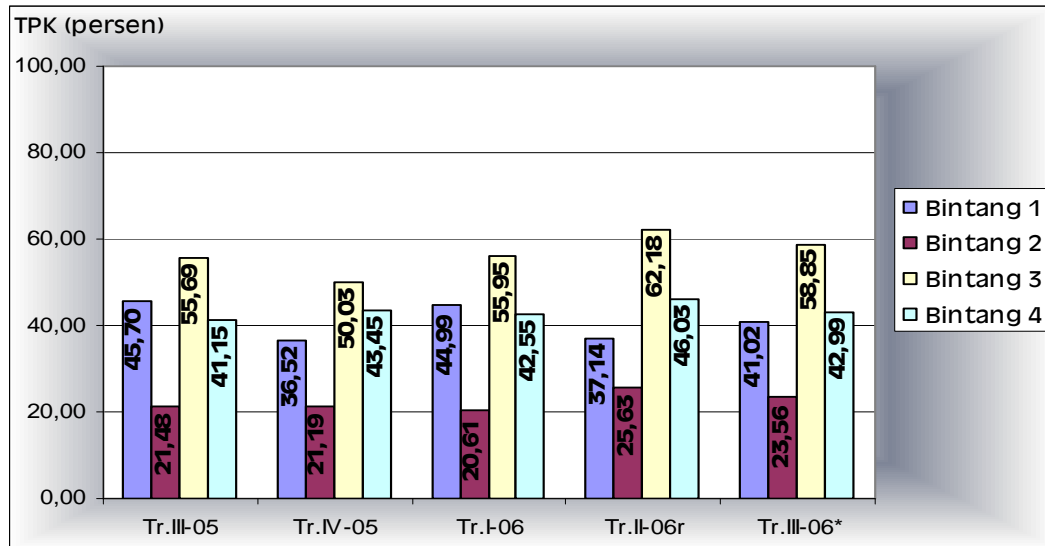
*Keterangan: r) Triwulan II 2006 merupakan angka revisi  
\*) Triwulan III 2006 masih Angka Perkiraan*

Jika dirinci berdasarkan klasifikasi hotel berbintang, TPK hotel tertinggi pada triwulan III 2006 terjadi pada klasifikasi hotel bintang III dimana jumlah kamar terhuni setiap malam mencapai 58,85%, diikuti oleh hotel bintang IV yaitu 42,99%, hotel bintang I sebesar 41,02%, sementara hotel bintang II hanya terisi 23,56%. Hal ini mengindikasikan bahwa minat wisatawan baik yang berasal dari mancanegara maupun wisatawan domestik atau lokal, cenderung untuk memilih hotel berbintang tiga untuk menginap daripada hotel berbintang lainnya.

Dari empat klasifikasi hotel, diperkirakan hanya TPK klasifikasi hotel bintang I yang mengalami peningkatan, sementara tiga klasifikasi lainnya

mengalami penurunan. Peningkatan yang terjadi sekitar 3,88% dari angka triwulan II tahun 2006.

Grafik 1.4.  
Rata-rata TPK Hotel Berbintang di Sumatera Utara menurut Klasifikasi Hotel  
Triwulan III 2005 – Triwulan III 2006



Keterangan: r) Triwulan II 2006 merupakan angka revisi  
\*) Triwulan III 2006 masih Angka Perkiraan

Secara agregat jumlah malam kamar terjual pada triwulan III 2006 ini diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan angka TPKnya hingga mencapai 2,78% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, jika dibandingkan dengan triwulan III pada tahun 2005 maka banyaknya malam kamar terjual ternyata juga menunjukkan adanya penurunan hingga 10,74%.

## 1.2 PDRB MENURUT SISI PENGGUNAAN

PDRB atas dasar harga berlaku triwulan III tahun 2006 senilai Rp.42,35 triliun, sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebesar Rp.22,34 triliun atau 52,75 % dari total PDRB. Komponen penggunaan lainnya adalah konsumsi pemerintah sebesar Rp.3,88 triliun, pembentukan modal tetap bruto sebesar Rp.5,72 triliun, transaksi ekspor sebesar Rp.15,14 triliun dan impor sebesar Rp.4,80 triliun atau masing-masing sebesar 9,16%; 13,51%; 35,75% dan 11,33% dari total PDRB. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (triwulan II), PDRB harga berlaku mengalami peningkatan dari Rp.40,44 triliun menjadi Rp.42,35 triliun atau naik sebesar 4,74%. Hal ini sejalan dengan peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto dan ekspor, sedangkan untuk impor mengalami penurunan.

Tabel 1.11.  
Nilai PDRB Sumatera Utara menurut Komponen Penggunaan  
Triwulan II dan III Tahun 2006 \*)  
(Milyar Rp.)

Komponen Penggunaan	ADH Berlaku		ADH Konstan	
	Triw II'06	Triw III'06	Triw II'06	Triw III'06
1. Konsumsi Rumah Tangga	20.926,23	22.339,49	13.657,97	14.035,73
2. Konsumsi Pemerintah	3.429,48	3.880,55	2.091,88	2.235,85
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.479,70	5.723,33	3.662,26	3.757,22
4. Residual	1.548,46	516,76	-924,67	-1.250,53
5. Ekspor Luar Negeri	14.242,71	15.139,33	8.421,00	8.593,07
6. Dikurangi Impor Luar Negeri	5.191,51	4.799,20	4.210,83	3.990,15
<b>PDRB</b>	<b>40.435,07</b>	<b>42.350,27</b>	<b>22.697,62</b>	<b>23.381,19</b>

Keterangan : \*) Angka Sementara

Pada triwulan III, pertumbuhan konsumsi rumah tangga baik atas harga berlaku dan harga konstan mulai bergerak masing-masing sebesar 6,75% dan 2,77%. Liburan sekolah dan dimulainya tahun ajaran baru merupakan pemicu bagi kenaikan konsumsi rumah tangga. Sedangkan pertumbuhan triwulan III-2005 sampai dengan triwulan III-2006 (*year on year*) mengalami peningkatan yang cukup berarti bagi terciptanya *multiplier effect* yaitu tumbuh sebesar 6,35%.

Konsumsi pemerintah pada triwulan III meningkat sebesar 6,88% yaitu dari Rp.2,09 triliun pada triwulan II menjadi Rp.2,24 triliun pada triwulan III, sedangkan terhadap triwulan III-2005 peningkatan sebesar 9,73%. Gaji ke-13 dan adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan tunjangan bagi pegawai

non struktural dan telah diberikan secara rapel pada triwulan ini mendorong kenaikan pertumbuhan pada konsumsi pemerintah. Sampai triwulan III diperkirakan dana yang terserap telah mencapai sekitar 71% dari dana yang dianggarkan. Dana tersebut digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Tabel 1.12.  
Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Sumatera Utara Menurut Komponen Penggunaan ADH Konstan 2000 Triwulan II dan III Tahun 2006 \*)  
(%)

Komponen Penggunaan	Laju Pertumbuhan		Trw. III'06	Struktur	
	Trw II'06	Trw III'06	thd.III'05	Trw II'06	Trw III'06
1. Konsumsi Rumah Tangga	0,52	2,77	6,35	51,75	52,75
2. Konsumsi Pemerintah	5,78	6,88	9,73	8,48	9,16
3. Pembentukan Modal Tetap	-1,9	2,59	5,73	13,55	13,51
4. Residual	-	-	-	3,83	1,22
5. Ekspor	3,04	2,04	5,09	35,22	35,75
6. Dikurangi Impor	21,33	-5,24	30,68	12,84	11,33
<b>PDRB</b>	<b>-1,37</b>	<b>3,01</b>	<b>6,5</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Keterangan : \*) Angka Sementara

Kegiatan investasi (PMTB) pada triwulan III mulai menunjukkan aktivitasnya dan mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 2,59%, sementara itu jika dibandingkan pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya (*year on year*) menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu 5,73%. Berbagai kebijakan yang digulirkan pemerintah dan upaya Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga memberikan angin segar bagi dunia usaha, disamping itu daya beli masyarakat mulai mengalami perbaikan.

Pada triwulan III 2006, transaksi ekspor diperkirakan tumbuh sebesar 2,04%, mengalami sedikit perlambatan jika dibandingkan ekspor pada triwulan II yang mencapai 3,04%. Sedangkan impor menunjukkan penurunan sebesar 5,24% jika dibandingkan pada triwulan II. Jika dibandingkan pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya (*year on year*) pertumbuhan ekspor sebesar 5,09% dan 30.68% untuk impor. Ekspor luar negeri Sumatera Utara masih didominasi oleh hasil industri olahan kelapa sawit berupa cpo (*crude palm oil*) dan minyak inti sawit serta hasil-hasil pertanian. Komoditi ekspor tersebut dikirim terutama ke negara-negara di Benua Asia dan sebagian kecil ke Benua Eropa. Sedangkan komoditi impor sebagian besar berasal dari negara-negara se-Asia Tenggara berupa bahan baku dan bahan penolong untuk industri.

**CASE BOX 1**  
**Peringkat Realisasi Investasi**

Realisasi investasi PMDN dan PMA provinsi Sumatera Utara hingga triwulan III tahun 2006 tidak menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Selama periode tersebut, Sumut hanya menempati posisi ke 13 dalam realisasi PMDN dengan jumlah proyek 2 senilai Rp.98,8 miliar atau dengan kontribusi hanya sebesar 0,8%. Posisi serupa terjadi pada realisasi PMA dengan jumlah proyek sebanyak 6 senilai US\$20,1 juta dengan pangsa sebesar 0,50%. Jika dibandingkan dengan posisi pada triwulan II yang lalu, peringkat Sumut secara nasional sedikit lebih baik, yaitu dengan PMDN berada pada posisi 15 dengan jumlah proyek sebanyak 1 buah senilai Rp.42 miliar, sementara PMA berada pada posisi 14 dengan jumlah proyek sebanyak 2 buah senilai US\$7 juta.

Realisasi PMDN Sumut sepanjang tahun 2006 berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 463 orang tenaga kerja lokal atau dengan pangsa sebesar 1,04% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Sementara untuk PMA, total tenaga kerja asing yang berhasil di serap adalah sebanyak 996 orang dengan kontribusi sebesar 0,6% terhadap total penyerapan tenaga kerja nasional. Dibandingkan pada tahun 2005, penyerapan tenaga kerja hingga triwulan ini masih sangat kecil.

PMDN					PMA				
NO.	LOKASI	PROYEK	NILAI	%	NO.	LOKASI	PROYEK	NILAI	%
1	BANTEN	15	3.344,0	28,3	1	JAWA BARAT	150	1.400,2	35,6
2	D I Y A K A R T A	24	2.974,9	25,3	2	JAWA BARAT	239	485,6	12,3
3	R I A U	6	1.701,4	14,4	3	KALTIM	5	400,6	10,2
4	KALTENG	3	774,1	6,5	4	BANTEN	62	375,6	9,5
5	LAMPUNG	1	607,0	5,1	5	JAWA TENGAH	32	342,7	8,7
6	KALSEL	5	562,3	4,8	6	R I A U	7	298,7	7,6
7	JAWA BARAT	16	541,3	4,6	7	JAWA TIMUR	37	251,2	6,4
8	JAWA TIMUR	11	341,2	2,9	8	B A L I	51	91,9	2,3
9	JAMBI	3	170,4	1,4	9	LAMPUNG	5	86,9	2,2
10	SUMSEL	3	159,7	1,4	10	KALSEL	3	76,5	1,9
11	KALTIM	2	152,5	1,3	11	SUMSEL	2	24,9	0,6
12	JAWA TENGAH	7	120,0	1,0	12	KALTENG	3	22,4	0,6
13	SUMUT	2	98,8	0,8	13	SUMUT	6	20,1	0,5
14	KALBAR	1	78,7	0,7	14	JAMBI	1	19,3	0,5
15	SULSEL	4	68,6	0,6	15	SULSEL	4	13,2	0,3
16	NTB	3	64,2	0,5	16	KEP. RIAU	2	11,1	0,3
17	B A L I	5	40,7	0,3	17	NTB	5	4,8	0,1
18	PAPUA	1	21,4	0,2	18	D.I YOGYA.	4	2,9	0,1
19	MALUKU	1	0,2	0,0	19	NTT	2	2,4	0,1
					20	SULUT	2	1,3	0,0
					21	SUMBAR	1	1,2	0,0
					22	SULTENG	2	0,6	0,0
					23	PAPUA	1	0,6	0,0
					24	BABEL	1	0,4	0,0
					25	SULTENGG	1	0,4	0,0
	<b>JUMLAH</b>	<b>113</b>	<b>11.821,4</b>	<b>100,0</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>628</b>	<b>3.935,5</b>	<b>100,0</b>	

**Tabel Boks 1.14 Peringkat Realisasi PMDN dan PMA (Rp Miliar)**

## CASE BOX 2

### Peringkat Persetujuan Investasi

Dari seluruh provinsi penyumbang persetujuan PMDN dan PMA di seluruh Indonesia, provinsi Sumut memberikan kontribusi yang signifikan yakni dengan menempati posisi ketiga dalam persetujuan PMDN yaitu sebesar Rp9.150 miliar atau dengan pangsa 9,5%, sementara untuk persetujuan PMA provinsi Sumut juga menempati peringkat ke 3 dengan total nilai sebesar US\$1.045,2 juta atau dengan pangsa sebesar 12,1%. Jika dibandingkan posisi pada triwulan II yang lalu, persetujuan pada PMDN hanya mengalami sedikit peningkatan, sehingga peringkatnya disusul Kalimantan Barat yang meningkat signifikan. Sementara kinerja PMA relatif lebih baik yang ditunjukkan dari peningkatan nilai yang cukup besar sehingga menaikkan peringkat Sumut setingkat lebih baik (posisi 3).

Tingginya nilai persetujuan di provinsi Sumut baik untuk PMDN dan PMA yang tidak diikuti oleh realisasi masih menunjukkan potensi Sumut yang cukup besar belum teroptimalkan secara baik

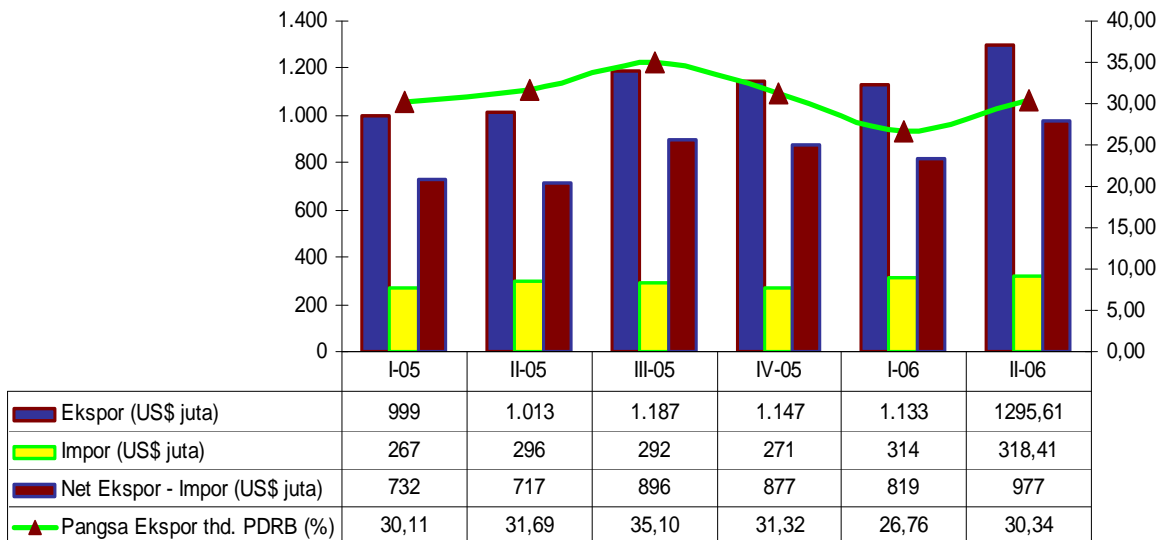
PMDN					P M A				
NO.	LOKAS	PROYEK	NILAI	%	NO.	LOKAS	PROYEK	NILAI	%
1	KALTIM	13	88.462,2	39,8	1	DKI JAKARTA	503	1.992,9	23,0
2	KALBAR	13	20.980,2	21,7	2	JABAR	155	1.227,9	14,2
3	SUMUT	7	9.149,8	9,5	3	SUMUT	22	1.045,2	12,1
4	JABAR	21	7.154,2	7,4	4	JATIM	53	1.037,1	12,0
5	JATIM	17	3.321,4	3,4	5	RIAU	20	692,1	8,0
6	LAMPUNG	4	3.178,5	3,3	6	BANTEN	80	507,4	5,9
7	SUMSEL	3	2.869,7	3,0	7	KALTIM	25	369,4	4,3
8	JATENG	2	2.801,8	2,9	8	SUMSEL	6	290,0	3,4
9	BANTEN	14	2.480,7	2,6	9	NAD	5	226,7	2,6
10	DKI JAKARTA	16	2.020,9	2,1	10	SULUT	6	174,9	2,0
11	SUMBAR	-	1.114,0	1,2	11	KEP.RIAU	38	161,4	1,9
12	SULSEL	1	926,8	1,0	12	LAMPUNG	6	132,7	1,5
13	KALTENG	3	842,5	0,9	13	KALTENG	13	114,8	1,3
14	RIAU	1	463,0	0,5	14	KALSES	6	102,0	1,2
15	JAMBI	1	327,2	0,3	15	KALBAR	9	93,9	1,1
16	NAD	2	218,6	0,2	16	JAMBI	5	92,7	1,1
17	KALSEL	2	94,0	0,1	17	JATENG	28	76,1	0,9
18	SULTENG	-	72,0	0,1	18	BALI	86	58,3	0,7
19	PAPUA	1	68,0	0,1	19	PAPUA	5	48,2	0,6
20	DI.YOGYA	-	62,6	0,1	20	D.I. YOGYA	8	46,7	0,5
21	SULUT	4	59,4	0,1	21	MALUKU	1	39,3	0,5
22	BALI	3	25,4	0,0	22	SUMBAR	7	29,8	0,3
23	KEP. RIAU	1	17,0	0,0	23	SULSEL	2	26,1	0,3
24	NBT	3	15,8	0,0	24	BENGKULU	1	24,6	0,3
25	MALUKU UTARA	1	5,0	0,0	25	GORONTALO	1	14,6	0,2
	<b>JUMLAH</b>	<b>133</b>	<b>96.730,7</b>	<b>100,0</b>	26	NTB	12	13,3	0,2
					27	BABEL	6	9,4	0,1
					28	SULTENG	1	1,5	0,0
					29	NTT	2	1,4	0,0
					30	MALUKU UTARA	1	1,3	0,0
					<b>JUMLAH</b>	<b>1.113</b>	<b>8.651,7</b>	<b>100,0</b>	

## Perdagangan Internasional <sup>3</sup>

Dalam konsep PDB (Produk Domestik Bruto) yang dilakukan secara nasional, komponen ekspor dan impor diartikan sebagai barang dan jasa yang keluar dari pabean Indonesia, namun untuk penghitungan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), pengertian ekspor dan impor adalah lalu lintas barang dan jasa yang keluar dan masuk wilayah Sumut baik antar provinsi maupun dengan negara lain (dapat dilihat dari PDRB menurut Penggunaan).

Untuk konsep **Perdagangan Internasional** yang akan disajikan berikut, pengertian ekspor dan impor adalah lalu lintas barang dan jasa (non migas) yang dari dan ke luar negeri berdasarkan data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Grafik 1.5 Ekspor Impor Sumatera Utara (US\$ juta)



Perkembangan perdagangan internasional provinsi Sumut pada triwulan II-2006 bergerak positif yang ditandai dengan peningkatan pangsa ekspor terhadap PDRB yakni dari sebesar 26,76% pada triwulan yang lalu menjadi 30,34% pada triwulan laporan. Peningkatan kinerja perdagangan internasional tersebut terutama didorong oleh semakin membaiknya kinerja ekspor, sementara impor juga tumbuh positif dengan tingkat yang lebih rendah sehingga net ekspor kembali meningkat. Pada triwulan III, ekspor diperkirakan

<sup>3</sup> Sejak triwulan IV tahun 2004, terjadi perubahan mendasar dalam proses pengolahan dan pengambilan data yang bersifat on line dengan bekerja sama antara Bank Indonesia dengan pihak Bea Cukai serta yang kemudian diolah untuk disesuaikan dengan penggolongan/klasifikasi barang menurut standar internasional

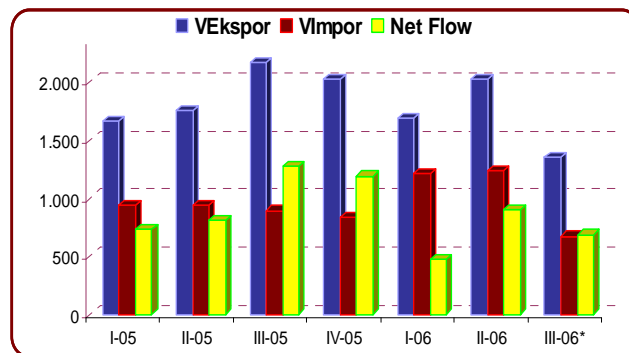


akan kembali meningkat. Selama bulan Juli dan Agustus, realisasi ekspor kembali meningkat cukup besar yaitu US\$914 juta. Kondisi serupa juga terjadi pada impor yang realisasi selama bulan Juli dan Agustus terus meningkat yaitu sebesar US\$241 juta.

Secara triwulan, ekspor bersih pada triwulan II mengalami pertumbuhan yang cukup besar yaitu 19,24% yang di dorong tingginya permintaan ekspor sebesar US\$.1.296 juta. Sementara pertumbuhan impor meskipun tumbuh positif 1,53% sebesar US\$.318 juta namun masih jauh di bawah pertumbuhan ekspor yang tumbuh sebesar 14,34%. Peningkatan ekspor tersebut mampu meningkatkan pangsa ekspor menjadi 30,34%. (Lihat Grafik 1.5)

Kinerja ekspor yang cukup baik tersebut juga tercermin dari peningkatan volume ekspor yang selama triwulan II naik 341 ribu ton menjadi 2.022 ribu ton, sementara volume impor meningkat 23 ribu ton menjadi 1.233 ribu ton. (Lihat Grafik 1.6)

Grafik 1.6 Volume Ekspor dan Impor Sumut



Kinerja perdagangan internasional selama tahun 2006 (Januari-Agustus) menunjukkan aktivitas yang cukup tinggi baik dari sisi ekspor maupun impor. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai ekspor (yoy) yang naik USD.533 juta, atau tumbuh tumbuh 18,97% dari nilai ekspor periode yang sama di tahun 2005, sementara nilai impor meningkat sebesar USD.117 juta atau tumbuh 15,50%.

Ekspor provinsi Sumatera Utara selama tahun 2006 (Januari-Agustus) tercatat sebesar USD.3.343 juta, atau dengan kontribusi sebesar 6,55% jika dibandingkan dengan realisasi ekspor nasional yang sebesar USD.51.056 juta. Di sisi lain, nilai impor pada periode yang sama sebesar USD.873 Juta atau dengan kontribusi 3,2% dari total realisasi impor nasional yang sebesar USD.27.301 juta

## Perkembangan Realisasi Ekspor Impor Berdasarkan Kelompok SITC<sup>4</sup>

**Tabel 1.13 Realisasi Nilai Komoditas Ekspor Non Migas Sumatera Utara Berdasarkan SITC (US\$ dan %)**

NO	KOMODITI SITC	Jan-Agus 05	Jan-Agus 06	GROWTH	SHARE 2006
1	42 - FIXED VEGETABLE OILS & FATS	1.087.957.579	1.102.191.915	1,3	32,97
2	23 - CRUDE RUBBER	422.743.426	747.384.348	76,8	22,36
3	68 - NON FERROUS METALS	190.926.027	292.845.639	53,4	8,76
4	07 - COFFEE, TEA, COCOA, SPICES	145.746.739	156.109.547	7,1	4,67
5	63 - WOOD AND CORK MANUFACTURES	160.614.630	146.795.951	-8,6	4,39
6	03 - FISH, CRUST., MOLLUSCS AND THEIR PREP	108.012.991	111.356.766	3,1	3,33
7	43 - ANIMAL & VEGETABLE OILS & FATS	80.369.154	106.642.443	32,7	3,19
8	84 - CLOTHING	81.896.303	97.581.468	19,2	2,92
9	12 - TOBACCO AND TOBACCO MFD.	54.060.142	68.464.384	26,6	2,05
10	55 - ESS. OILS & PERFUM MATERIALS	60.202.387	64.212.952	6,7	1,92
11	05 - FRUITS AND VEGETABLES	43.568.233	60.173.606	38,1	1,80
12	09 - MISC. FOOD PREPARATIONS	46.920.147	54.370.039	15,9	1,63
13	25 - PULP AND WASTE PAPER	26.441.069	48.964.422	85,2	1,46
14	51 - ORGANIC CHEMICALS	58.003.593	45.451.742	-21,6	1,36
15	82 - FURNITURE	36.502.621	32.901.171	-9,9	0,98
16	08 - FEEDING STUFF FOR ANIMALS	23.415.111	31.011.922	32,4	0,93
17	62 - RUBBER MANUFACTURES NES	19.890.344	28.060.301	41,1	0,84
18	72 - MACH. SPECIAL FOR PARTIC. INDS	18.915.206	25.675.260	35,7	0,77
19	59 - CHEM. MATERIALS & PRODUCTS, NES	13.576.006	22.209.620	63,6	0,66
20	MISCELLANEOUS	129.872.165	100.180.213	-22,9	3,00
	<b>SITC</b>	<b>2.809.633.873</b>	<b>3.342.583.709</b>	<b>19,0</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Kinerja ekspor per komoditi non migas juga dapat dilihat berdasarkan kelompok SITC yang merupakan klasifikasi barang menurut standar internasional. Berdasarkan SITC tersebut, ekspor Sumatera Utara selama tahun 2006 (Januari – Agustus) terutama didominasi oleh kelompok minyak dan lemak nabati (32,97%), karet mentah (22,36%), logam yang tidak mengandung besi (8,76%), kopi, teh, coklat dan rempah-rempah (4,67%), serta barang-barang kayu dan gabus (4,39%).

Dari 20 jenis komoditi penyumbang terbesar ekspor Sumut, 16 komoditi diantaranya mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan terbesar terjadi pada kelompok barang karet mentah yakni hingga 76,8%, sementara pertumbuhan negatif terbesar terjadi pada kelompok kimia organik yakni hingga 21,6%. Perkembangan realisasi impor non migas Sumatera Utara berdasarkan SITC dapat dilihat pada tabel 1.13.

<sup>4</sup> Klasifikasi barang dan jasa yang di ekspor/impor berdasarkan Standard International Trade Classification (SITC) 2 digit.

**Tabel 1.14 Realisasi Nilai Komoditas Impor Non Migas Sumatera Utara Berdasarkan SITC (US\$ dan %)**

NO	KOMODITI IMPOR NON MIGAS SITC	Jan-Agus 05	Jan-Agust 06	GROWTH	SHARE 06
1	28 - METALLIFEROUS ORES&METAL SCR	74.328.835	123.589.233	66,3	14,2
2	56 - FERTILIZERS MANUFACTURED	80.377.091	94.062.602	17,0	10,8
3	08 - FEEDING STUFF FOR ANIMALS	71.424.006	70.527.159	-1,3	8,1
4	67 - IRON AND STEEL	71.369.258	62.836.132	-12,0	7,2
5	04 - CEREAL & CEREAL PREPARATIONS	13.985.909	36.031.562	157,6	4,1
6	12 - TOBACCO AND TOBACCO MFD.	21.889.861	34.963.523	59,7	4,0
7	66 - NON METALIC MINERALS MFS	25.730.045	34.220.334	33,0	3,9
8	74 - GENERAL INDUSTRIAL MACH.&EQP	47.266.143	33.102.372	-30,0	3,8
9	72 - MACH.SPECIAL FOR PARTIC.INDS	35.360.834	29.117.927	-17,7	3,3
10	71 - POWER GENERATING MACH. & EQP	26.453.923	27.497.345	3,9	3,2
11	57 - PLASTICS, PRIMARY FORM	16.838.517	25.352.823	50,6	2,9
12	51 - ORGANIC CHEMICALS	22.768.128	23.901.525	5,0	2,7
13	59 - CHEM.MATERIALS& PRODUCTS,NES	26.810.260	21.745.139	-18,9	2,5
14	52 - INORGANIC CHEMICALS	21.571.540	20.894.322	-3,1	2,4
15	27 - CRD.FERTILIZERS&CRD.MINERALS	18.708.593	20.722.928	10,8	2,4
16	05 - FRUITS AND VEGETABLES	11.174.154	19.393.344	73,6	2,2
17	06 - SUGAR, SUGAR PREP. AND HONEY	11.760.333	17.760.793	51,0	2,0
18	68 - NON FERROUS METALS	17.166.091	15.897.266	-7,4	1,8
19	77 - ELECTRICAL MACH., APPARATUS	13.551.041	13.849.488	2,2	1,6
20	MISCELLANEOUS	127.130.944	147.296.971	15,9	16,9
	<b>SITC</b>	<b>755.665.506</b>	<b>872.762.788</b>	<b>15,5</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Total impor Sumut pada triwulan II tersebar cukup merata pada berbagai komoditas impor. Dari 20 komoditas penyumbang impor terbesar, komoditas impor masih didominasi oleh biji logam dan sisa-sisa logam (14,2%), pupuk kimia buatan pabrik (10,8%), makanan ternak (8,1%), besi dan baja (7,2%), serta gandum dan olahan gandum (4,1%). Komoditi gandum dan olahan gandum merupakan komoditi yang mencatat pertumbuhan terbesar hingga 157,6%, disusul biji logam dan sisa-sisa logam (66,3%). Perkembangan realisasi impor non migas Sumatera Utara berdasarkan SITC dapat dilihat pada tabel 1.14.

## BOKS - 2

### Prospek Agribisnis Jagung di Sumatera Utara Sangat Cerah

Kondisi pariwisata di Sumatera Utara terlihat terus mengalami penurunan Jagung diperkirakan dapat menjadi salah satu komoditi unggulan di Sumatera Utara. Hal tersebut sejalan dengan konsep pengembangan agromarinepolitan yang telah digagas oleh pemerintah daerah setempat. Sebagaimana kita ketahui program pengembangan agromarinepolitan merupakan salah satu bentuk realisasi atas ditunjuknya Sumut sebagai salah satu "Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI)". Produksi jagung di Sumut sampai dengan akhir tahun 2005 mencapai 711 ribu ton per tahun atau terus menunjukkan pertumbuhan stabil sejak tahun 2001 yang produksinya sebesar 634 ribu ton.

Komoditi jagung mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kontribusi jagung terhadap "Produk Domestik Bruto (PDB)" menempati urutan kedua setelah padi. Sebagai contoh kontribusi jagung dalam perekonomian mencapai angka Rp 9.4 triliun di tahun 2000 dan terus meningkat menjadi Rp 18.2 triliun di tahun 2003. Begitu pula skala produksinya terus cenderung meningkat setiap tahunnya baik melalui program perluasan lahan tanam maupun melalui program peningkatan produktivitasnya. Namun jumlah produksi tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga masih harus mengimpor dari luar negeri.

#### Produksi dan Kebutuhan Jagung Sumatera Utara 2001-2005

No.	URAIAN	2001	2002	2003	2004	2005
1.	LUAS PANEN (Ha)	198.709	198.670	210.782	214.885	210.467
2.	Produktivitas (Kw/Ha)	31.91	32,24	32,61	33,16	33,80
3.	Produksi (Ton)	634.162	640.593	687.360	712.560	711.341
4.	Kebutuhan Jagung (Ton)	750.000	750.000	750.000	750.000	858.000
5.	Perimbangan Jagung (Ton)	(115.838)	(109.407)	(62.640)	(37.440)	(146.659)

Sumber: Dinas Pertanian Sumut

Cukup cerahnya prospek pengembangan jagung tersebut dapat terlihat dari cukup tingginya permintaan jagung dunia. Sebagaimana diketahui Amerika merupakan pemasok jagung terbesar dunia dengan pangsa sebanyak 41%.

Namun sejak ditemukannya ethanol sebagai alternatif bahan bakar pengganti minyak bumi, sebagian besar hasil produksi jagung Amerika tersebut akan dialihkan untuk memasok kebutuhan ethanol. Amerika berencana mengolah 50 juta ton jagung pada tahun 2010 untuk menghasilkan ethanol. Dengan demikian, dapat dibayangkan betapa besarnya peluang pasar yang ada dimasa depan. Dari sisi penggunaan, sebagian besar hasil produksi jagung di Sumut tersebut digunakan sebagai bahan pakan ternak. Itupun sebagian masih harus diimpor sebagai akibat cukup tingginya permintaan dari beberapa produsen pakan ternak yang berlokasi di Sumut. Terdapat 5 pabrik pakan ternak terbesar di Sumatera Utara yang menjadi mitra dinas pertanian Provinsi Sumatera Utara yaitu PT. Mabar Feed Indonesia, PT. Charoen Pokphand, PT. Indojaya Agrinusa, PT. Gold Coin Indonesia, dan PT Berlian Unggas Sakti.

Sebagai gambaran, impor jagung di Sumut sampai dengan akhir tahun 2005 mencapai 15.534 ton atau sedikit turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 138.951 ton. Turunnya nilai impor tersebut lebih dipicu akibat semakin berkurangnya *supply* jagung dunia yang akhirnya memicu kenaikan harga. Naiknya harga BBM telah berdampak positif bagi prospek jagung dunia. Karena hasil produksi jagung tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku penghasil ethanol. Sebagaimana diketahui bahwa ethanol adalah bio fuel yang dapat menggantikan BBM. Tidak heran kalau akhirnya Amerika berniat untuk memproduksi ethanol secara besar-besaran.

Konsep pengembangan komoditi jagung tersebut telah mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Upaya pengembangan komoditi jagung tersebut bahkan mendapat dukungan dengan masuknya investor asing seperti Singapura. Rencana pengembangan jagung tersebut tidak hanya didukung oleh prospek pasar yang sangat cerah dimasa mendatang, tetapi juga sangat didukung oleh ketersediaan lahan yang ada. Berdasarkan data dari dinas pertanian setempat, dari lahan kering yang ada baru sekitar 34% yang telah ditanami. Begitu pula dengan ketersediaan lahan sawah yang baru termanfaatkan hanya untuk 2 kali masa tanam dalam setahun. Ini berarti terdapat potensi yang sangat besar untuk digunakan sebagai areal tanam jagung.

## BOKS - 3

### **Dunia Pariwisata di Sumatera Utara Perlu Pembinaan; Kelangkaan Informasi Mengakibatkan Konsep Pemasarannya Menjadi Tidak Jelas**

Kondisi pariwisata di Sumatera Utara terlihat terus mengalami penurunan sejak tahun 1995. Berdasarkan data dari Badan Pariwisata Daerah (Bawisda) Sumut, jumlah kunjungan turis internasional sampai akhir tahun 2005 mencapai 117.539 orang atau turun tajam jika dibandingkan dengan tahun 1995 mencapai 301.287 orang. Berbagai kendala dilapangan disinyalir menjadi faktor utama turunnya angka kunjungan turis internasional.

Kelangkaan informasi akibat kurangnya upaya promosi merupakan faktor dominan dibalik turunnya angka kunjungan turis tersebut. Kurang tersedianya informasi yang lengkap dan up to date (*lack of information*) mengakibatkan konsep pemasaran dunia pariwisata di Sumut menjadi tidak jelas. Tidak adanya konsep yang jelas tentang dunia pariwisata itu sendiri semakin memperburuk kondisinya. Seharusnya ada satu pusat informasi berskala internasional yang dapat mengakomodir kebutuhan informasi bagi turis asing mengenai dunia pariwisata di Sumatera Utara.

**Tabel - 1. Wisatawan Mancanegara Yang Datang Ke Sumatera Utara Menurut Pintu Masuk 1999 - 2003**

Tahun/Bulan	Bandar Udara Polonia	Pelabuhan Laut Belawan	Pelabuhan Laut Tanjung Balai Asahan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2001	84.676	24.097	10.135	128. 442
2002	95.848	21.414	2.273	121. 819
2003	80.092	15.110	6.296	98.336
2004	92.637	-	-	-
2005	106.069	-	-	-

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis web (*webbase*) dirasa masih sangat kurang. Padahal strategi pemasaran dunia pariwisata dengan berbasis teknologi internet sudah merupakan suatu keharusan agar dapat

bersaing secara internasional dengan negara lainnya. Sebagai contoh yang sangat sederhana akibat kelangkaan informasi itu adalah turis asing sangat merasakan kurangnya informasi tentang dunia pariwisata di Sumut yang dapat di searching secara instan melalui sarana internet. Tidak diketahui berapa jumlah pelaku wisata yang ada, kontak person yang dapat dihubungi, pihak penanggung jawab dan masalah ketersediaan infrastruktur lainnya mengakibatkan semakin kurangnya minat wisatawan asing untuk bertandang ke Sumut. Secara keseluruhan berbagai permasalahan tersebut semakin memperburuk iklim pariwisata di Sumatera Utara.

**Tabel - 2. Wisatawan Mancanegara Yang Datang Ke Sumatera Utara Menurut Kebangsaan Dan Pintu Masuk 2003**

<b>Kebangsaan</b>	<b>Bandar Udara Polonia</b>	<b>Pelabuhan Laut Belawan</b>	<b>Pelabuhan Laut Tanjung Balai Asahan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Asean	54 759	7 621	2 979	65 359
Asia	8 858	373	719	9 950
Eropa	6 895	4 538	7	11 440
Amerika	1 256	628	-	1 884
Oceania	1 205	245	-	1 450
Afrika	127	11	2	140
Stateless	353	71	-	424
Lainnya	3 477	1 623	2 589	7 689
<b>Jumlah</b>	<b>76 300</b>	<b>15 110</b>	<b>6 926</b>	<b>98 336</b>

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara*

Sampai dengan saat ini Sumut masih belum memiliki satu *counter security* yang dapat menjadi sarana dan pintu gerbang bagi masuknya turis asing yang dapat bersaing secara internasional. Kita dapat belajar dari Malaysia yang telah lebih dahulu menerapkan konsep "*The Thrully Asia*"nya untuk mendukung dunia pariwisata di negeri Jiran tersebut. Konsep "*one stop service*" yang menjadi kunci sukses Malaysia dalam menduniakan sektor pariwisatanya memang patut menjadi contoh jika perlu dicari peluangnya untuk bekerjasama dengan negara tetangga tersebut.

Upaya menciptakan iklim pariwisata yang kondusif merupakan agenda mendesak yang harus segera direalisasikan. Tanpa adanya suasana yang kondusif, aman dan nyaman, tentunya sulit untuk mengundang para turis untuk datang. Hal yang lazim ditemukan, banyak turis asing yang akhirnya kebingungan karena tidak adanya paket pariwisata yang terorganisir dengan baik dengan berbagai even-even yang jelas sehingga dapat menjadi daya tarik khusus untuk mengundang lebih banyak turis dimasa yang akan datang. Disamping masih banyak pungutan-pungutan liar yang pada akhirnya menciptakan rasa tidak aman dikalangan turis asing.



**Tabel – 3. Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Kabupaten/Kota 1999-2003 (%)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
<b>Kabupaten</b>					
1. Nias	7,08	14,31	17,40	16,219	9,56
2. Mandailing Natal	-	-	-	-	35,06
3. Tapanuli Selatan	38,24	33,52	32,67	26,27	20,44
4. Tapanuli Tengah	17,87	9,61	15,13	16,57	12,50
5. Tapanuli Utara	17,06	11,64	15,56	16,25	28,63
6. Toba Samosir	8,41	12,71	12,20	10,72	18,34
7. Labuhan Batu	17,30	19,26	38,29	36,19	31,81
8. Asahan	65,03	61,36	62,86	64,42	53,65
9. Simalungun	18,26	19,38	19,44	21,59	17,56
10. Dairi	25,38	26,32	20,33	26,60	21,55
11. Karo	17,92	24,25	22,53	20,66	21,15
12. Deli Serdang	20,27	11,21	11,47	17,94	37,86
13. Langkat	42,65	17,74	6,78	12,49	10,12
14. Nias Selatan <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-
15. Humbang Hasundutan <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-
16. Pakpak Bharat <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-
<b>Kota</b>					
17. Sibolga	46,45	34,52	31,31	36,15	30,70
18. Tanjung Balai	60,53	29,09	67,94	72,74	53,82
19. Pematang Siantar	37,29	42,20	41,79	35,94	37,06
20. Tebing Tinggi	32,65	43,08	28,82	26,49	-
21. Medan	49,11	44,58	54,33	49,41	47,00
22. Binjai	60,92	78,86	70,95	67,37	67,65
23. Padang Sidempuan	<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>	37,71
Jumlah	33,93	31,80	35,94	35,15	33,82

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

*Keterangan: <sup>1)</sup> Masih Bergabung dengan Kabupaten Induk  
(Nias, Taput, Dairi, Tapsel)*

Dengan demikian, sudah saatnya saatnya Sumut membangun suatu konsep pariwisata yang jelas yang dapat dijual ke dunia internasional. Berbagai potensi keindahan alam dan budayanya sudah sangat mendukung tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan konsep pariwisata tersebut haruslah terprogram dengan jelas, sehingga berbagai kalender event terkait sudah dapat terjadwal, terorganisir dan terlaksana dengan baik. Strategi pemasaran yang komprehensif baik melalui sarana internet maupun melalui media-media lainnya seharusnya sudah menjadi agenda rutin dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat baik dari sisi fasilitasi, insentif, kemudahan perijinan, permodalan dan lain sebagainya. Keindahan alam kita haruslah ditata dengan baik dan dapat dijadikan daya tarik dalam memikat negara lain untuk datang berkunjung sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara.

Oleh karena itu, haruslah ada suatu upaya yang bersifat sinergis dan koordinatif yang dapat menyatukan berbagai pelaku aktif dan pihak stakeholders lainnya sehingga dapat bergerak secara dinamis dalam mendukung aktifitas dunia pariwisata di Sumut. Misalnya dengan jalan menciptakan forum komunikasi antar pelaku dan pihak stakeholders agar berbagai permasalahan yang berkembang di lapangan dapat diidentifikasi, dirumuskan dan dicarikan solusinya.

**BOKS - 4**  
**SURVEI PENJUALAN ECERAN**  
**TRIWULAN III TAHUN 2006**

**I. LATAR BELAKANG**

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai tugas antara lain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui pengendalian likuiditas perekonomian (jumlah uang beredar) dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah khususnya berkenaan dengan pengendalian inflasi. Untuk menyusun kebijakan, dibutuhkan informasi antara lain mengenai perkembangan penawaran dan permintaan pada sektor riil.

SPE merupakan survei berkala bersifat mikro yang ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang menggambarkan kecenderungan pengeluaran masyarakat (*consumption spending*) melalui sisi penjualan di tingkat pengecer (*retailer*). Survei ini diharapkan juga dapat digunakan untuk mengetahui indikasi awal perkembangan sisi permintaan, khususnya terhadap barang konsumsi.

**II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**2.1 Perkembangan Realisasi Nilai Penjualan Triwulan I Tahun 2006**

Survei yang dilakukan pada triwulan laporan ini masih mengindikasikan terjadinya penurunan realisasi penjualan. Meskipun pelaksanaan puasa tahun ini relatif lebih cepat yaitu di bulan September, kelompok bahan makanan dan tembakau yang memiliki kontribusi kedua terbesar justru kembali menunjukkan penurunan penjualan. Penurunan yang cukup besar juga terjadi pada kelompok bahan bakar.

**Tabel - 1.1**  
**Pertumbuhan Nilai Penjualan Berdasarkan Kelompok Barang**  
**Triwulan III Tahun 2005 (Rp.Juta)**

<b>Jenis Barang</b>	<b>II-06</b>	<b>III-06</b>	<b>Δ</b>	<b>Growth (%)</b>
Bahan Konstruksi	1.612,23	1.727,20	114,97	7,13
Suku Cadang	242,00	274,10	32,10	13,26
Perlengkapan Rumah Tangga	1.226,11	1.185,30	(40,82)	(3,33)
Barang Kerajinan dan Mainan	458,63	449,34	(9,29)	(2,03)
Makanan dan Tembakau	4.381,94	4.190,80	(191,14)	(4,36)
Pakaian dan Perlengkapannya	530,80	526,49	(4,31)	(0,81)
Bahan Kimia	1.279,05	1.087,08	(191,97)	(15,01)
Kelompok Bahan Bakar	9.425,15	8.363,09	(1.062,06)	(11,27)
Peralatan Tulis	542,86	810,20	267,34	49,25
<b>JUMLAH</b>	<b>19.698,78</b>	<b>18.613,60</b>	<b>(1.085,18)</b>	<b>(5,51)</b>

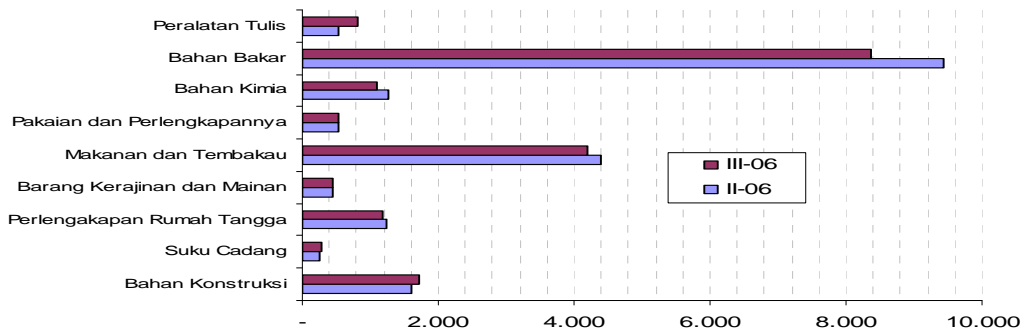
\*Posisi September 2006

Total Nilai Penjualan yang terealisasi pada bulan triwulan III-2006 kembali mengalami penurunan cukup besar yakni hingga 5,51% dari Rp19,70 miliar pada triwulan sebelumnya menjadi Rp18,61 miliar. (Tabel 1.1). Meskipun mengalami pertumbuhan yang negatif, jika dibandingkan dengan triwulan II yang lalu, nilai penjualan saat ini relatif masih lebih baik.

Secara umum, nilai penjualan eceran menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada hampir seluruh kelompok barang. Penurunan terbesar terjadi pada kelompok barang bahan bakar yakni sebesar Rp1,06 miliar, atau tumbuh negatif 11,27%, kelompok bahan makanan dan tembakau sebesar Rp190 juta (-4,36%), serta bahan kimia Rp.192 juta (-15,01%). Sementara kelompok yang mengalami peningkatan nilai penjualan terjadi pada kelompok barang bahan konstruksi, yakni sebesar Rp114,97 juta atau naik 7,13%.

Berdasarkan Survei penjualan Eceran secara triwulan tersebut, terlihat trend penurunan realisasi penjualan masih terus berlangsung. Sejak triwulan IV tahun 2005 yang lalu yakni sebesar Rp.21,96 miliar, realisasi nilai penjualan terus mengalami penurunan hingga mencapai puncaknya pada triwulan III tahun 2006 yaitu sebesar Rp.18,61 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat permintaan di sektor riil pada skala mikro belum sepenuhnya mengindikasikan peningkatan daya beli masyarakat. kelompok barang yang bersifat mendasar seperti bahan makanan, bahan bakar, serpta pakaian dan perlengkapannya terus mencatat pertumbuhan yang negatif, sedangkan pertumbuhan positif hanya terjadi pada kelompok barang sekunder seperti suku cadang dan peralatan tulis yang di dorong siklus musiman memasuki tahun ajaran baru hingga pertengahan triwulan III.

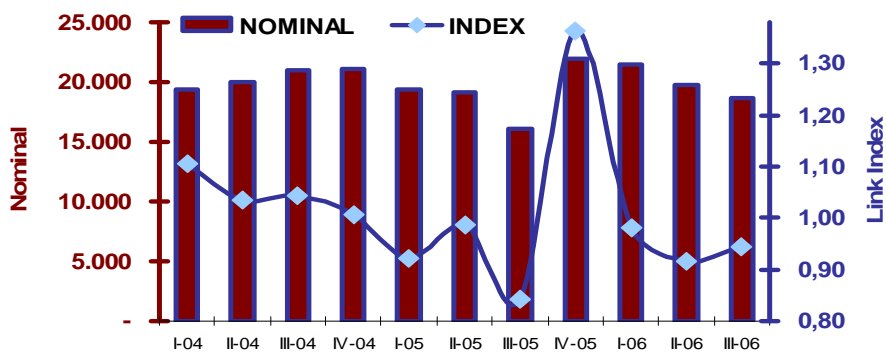
**Grafik - 2**  
**Perkembangan Linked Indeks Triwulanan**



**2.2 Perkembangan Linked Index**

Indeks berantai (*Linked Indeks*) adalah satuan yang menggambarkan perbandingan nilai penjualan periode tertentu terhadap periode sebelumnya. Indeks di atas 1 berarti terjadi peningkatan nilai penjualan dan indeks di bawah 1 berarti terjadi penurunan nilai penjualan. Perkembangan rata-rata index berantai (*Average Linked Index*) selama tahun 2006 semakin menguatkan periode penjualan yang relatif lesu dengan mencatat *link index* di bawah 1 (satu) untuk ketiga triwulan yang telah berjalan.

**Grafik - 2**  
**Perkembangan Linked Indeks Triwulanan**



## **BOKS - 5**

### **Pemerintah Harus Serius Tangani Masalah Infrastruktur di Sumut; Krisis Listrik dan Kerusakan Jalan Mengganggu Iklim Investas dan Dunia Usaha**

Infrastruktur mempunyai peranan yang sangat vital dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi daerah. Tanpa ketersediaan infrastruktur yang memadai, tentunya dapat menghambat kelancaran distribusi barang dan jasa. Dalam rangka menggairahkan iklim dunia usaha dan investasi di daerah, pemerintah haruslah memberikan perhatian khusus bagi perkembangan dan ketersediaan infrastruktur tersebut. Tanpa ketersediaan infrastruktur yang memadai tentunya dapat dibayangkan betapa sulitnya menciptakan iklim investasi di daerah baik dalam bentuk PMA ataupun PMDN.

**Tabel – 1. Panjang Jalan Menurut Status,  
dan Kabupaten/Kota 2001 - 2003 (Km)**

Kabupaten/Kota	Negara	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2001	1 305,950	3 346,200	26 628,282	31 280,432
2002	1 305,950	3 346,200	27 923,032	32 575,182
2003	1 305,950	3 346,200	28 246,275	32 898,425

Sumber : Dinas jalan dan Jembatan Kabupaten/Kota

Keterangan : \*) Data 2002

1) Masih Bergabung dengan Kabupaten Induk (Nias, Taput, Dairi, Tapsel)

Transportasi darat memiliki peranan yang sangat krusial dalam menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa di Sumatera Utara dimana lebih dari 90% distribusi hasil produksi barang maupun jasa masih mengandalkan jenis transportasi darat. Ketersediaan prasarana jalan yang memadai merupakan prasyarat mutlak agar tercipta efisiensi dan mendatangkan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Dengan adanya sarana jalan yang memadai tentunya dapat membantu pelaku dunia usaha dalam menekan biaya transportasi, memperkuat akses mereka terhadap pasar baik regional maupun internasional dan sekaligus dapat memperluas pelayanan terhadap kebutuhan jasa di perkotaan.

Sebagaimana diketahui, lebih dari 90% transportasi penumpang maupun transportasi pengangkutan barang menggunakan jasa angkutan jalan raya dari Kota Medan menuju Kabupaten dan Kota lainnya dalam wilayah Propinsi Sumut. Dan demikian sebaliknya. Walaupun panjang jalan dari tahun ke tahun

terus mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari sisi kualitas jalan, lebih dari separoh dari ruas jalan yang melintasi sentra-sentra produksi tersebut telah mengalami kerusakan atau tidak layak untuk dilalui kendaraan bermotor. Cukup parahnya kerusakan tersebut adalah akibat minimnya anggaran pemeliharaan jalan dari pemerintah daerah setempat.

**Tabel – 2. Panjang Jalan Menurut Status, Jenis Permukaan dan Kondisi 2003 (Km)**

Kabupaten/Kota	Negara	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Jenis Permukaan</b>	<b>1 305,950</b>	<b>3 346,200</b>	<b>28 246,275</b>	<b>32 898,425</b>
- Diaspal	1 305,950	2 819,880	11 436,183	15 562,013
- Kerikil	-	383,852	4 654,675	5 038,527
- Tanah	-	142,468	7 860,819	8 003,287
- Tidak Dirinci	-	-	4 294,598	4 294,598
<b>Kondisi</b>	<b>1 305,950</b>	<b>3 346,200</b>	<b>28 246,275</b>	<b>32 898,425</b>
- Baik	836,895	1 841,680	7 772,750	10 451,325
- Sedang	266,460	773,770	8 201,059	9 241,289
- Rusak	194,095	500,100	5 775,623	6 469,818
- Rusak Berat	8,500	230,650	5 427,843	5 666,993
- Tidak Dirinci	-	-	1 069,000	1 069,100

*Sumber : Dinas jalan dan Jembatan Kabupaten/Kota*

Jika dirinci lebih lanjut, kerusakan jalan tersebut terdapat di jalan Binjai Bahorok km 52-82, Kabanjahe Kuta Cane km 14-16, km 32-36, dan km 75-80. Kerusakan tersebut bahkan meluas ke jalan lintas Sumatera di ruas Kota Pinang-Gunung Tua km 175-194, dan ruas jalan Desa Aek latong, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Berdasarkan informasi dari dinas Perhubungan Sumut, terdapat 23 ruas jalan yang dinilai rawan terhadap kemacetan yaitu ruas jalan Medan-Lubuk Pakam km 16, jalan Medan-Tebing Tinggi km 40-41, km 59-60, dan km 63-64 dan kecamatan Limapuluh, Kabupaten Asahan km 119-120.

Kendala utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya penanganan permasalahan tersebut adalah akibat terbentur pada biaya yang cukup tinggi baik untuk investasi baru maupun pemeliharaan dan perbaikan. Oleh karena itu pemerintah pusat seharusnya memberikan perhatian yang sangat serius atas kerusakan jalan tersebut agar iklim investasi yang kondusif dapat tercipta dengan baik.

**Tabel – 3. Panjang Jalan Kabupaten/Kota  
Menurut Jenis Permukaan 2001 - 2003 (Km)**

Kabupaten/Kota	Aspal	Kerikil	Tanah	Tidak Dirinci	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2001	11 538,761	4 298,125	10 667,811	123,205	26 628,282
2002	11 663,831	4 912,187	10 781,308	565,706	27 923,032
2003	11 436,183	4 654,675	7 860,819	4 294,598	28 246,275

*Sumber : BPS Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara*

**Krisis Listrik:**

Krisis listrik di Sumatera Utara dapat tergolong cukup parah sehingga saat ini tiada hari tanpa pemadaman. Pemadaman listrik bergilir sudah menjadi keseharian masyarakat Sumut dan tentunya dapat dibayangkan betapa besarnya kerugian yang dialami oleh sektor industri yang nota bene sangat menggantungkan kelancaran proses produksinya dengan pasokan listrik dari PLN. Sebagian besar mesin pembangkit listrik tenaga diesel milik PLN di Sumut berada dalam kondisi rusak, sehingga tanpa adanya penambahan mesin, tentunya hal ini dapat mengakibatkan krisis listrik di Sumut menjadi berlarut-larut. Defisit energi listrik bahkan mencapai 145 MW saat beban puncak. Sementara minat investor swasta untuk berperan aktif dibidang kelistrikan di Sumut masih tergolong sangat rendah.

Dari potensi yang dimiliki, sebetulnya Sumut memiliki banyak sumber energi listrik yang belum tergarap. Dari tenaga air yang tersedia dapat dihasilkan pasokan listrik hingga 3.000 MW. Begitu juga dari sumber energi lainnya seperti energi panas bumi sebagai sumber energi listrik alternatif. Cadangan energi panas bumi di daerah Sarulla bahkan bisa menghasilkan ptensi energi sebesar 1.350 MW, namun tereksplorasi baru sekitar 335 MW. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa masih banyak potensi sumber-sumber energi yang belum tergarap di Sumut.

Oleh karena itu upaya yang serius dari pemerintah dan seluruh pihak terkait sangat diperlukan agar permasalahan tersebut bisa segera diatasi. Misalnya dengan secara proaktif mengundang investor asing untuk terlibat aktif dalam pembangunan proyek pembangkit listrik tersebut. Hal ini sekaligus tentunya dapat mengatasi permasalahan dalam kelangkaan anggaran yang dimiliki pemerintah.



## **BOKS - 6**

### **Siapakah Sumut Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia**

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pembangunan dapat diukur melalui angka *Human Development Indeks* (HDI). Namun dalam hal ini, Indonesia masih berada di posisi 110. Indonesia masih berada di level yang lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia di 62, Singapura di 25, Thailand di 73, Vietnam di 108, dan Filipina di 84. Oleh karena itu, pengembangan KEKI merupakan prasyarat mutlak agar daya saing produk-produk nasional dapat lebih ditingkatkan dimasa mendatang.

**Tabel 1. Indikator Ekonomi Sumatera Utara**

	<b>Keterangan</b>	<b>Nasional</b>	<b>Sumut</b>
1)	Pertumbuhan Ekonomi		
a)	Tri I/2006 thd Tri IV/2005	2,03	4,11
	Tri I/2006 thd Tri I/2005	4,59	2,89
	Tri II/2006 thd Tri I/2006	2,20	-1,37
	Tri II/2006 thd Tri II/2005	5,22	5,7
	Semester I/2006	4,97	4,27
b)	Target Pertumbuhan		
	Semester II/2006	7,0	9,0
	Tahun 2006	5,9	6,49
2)	PDRB per capita thn 1995		
a)	non migas	11.072.724	10.910.146
b)	dg migas	12.450.737	10.995.442
3)	Jumlah Perusahaan		
a)	Tahun 1996		658.908
b)	Tahun 2006		1.050.854
4)	Kemiskinan		
a)	Februari 2005	35,10 jt	1.806.060 (thn 2004)
b)	Maret 2006	39,05 jt	1.979.702 (thn 2006)
5)	Ketenagakerjaan (Feb 2006)		4,871 jt
6)	Indeks Pembangunan Manusia		
a)	Thn 2004		71,4
b)	Thn 2005		72,0

Sumber: Biro Pusat Statistik

Menko Perekonomian berdasarkan keputusannya melalui surat keputusan No.21/M. EKON/03 Tahun 2006 telah menetapkan untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus di beberapa provinsi di Indonesia. Sumut merupakan salah satu provinsi yang ditetapkan untuk misi pengembangan kawasan ini dengan pertimbangan Sumut merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi untuk berdaya saing unggul dimasa depan. Hal ini didasarkan atas beberapa indikator ekonomi makro regional yang terus mengalami perbaikan dalam kurun lima tahun terakhir.

Kesiapan Sumut untuk menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia terlihat dari keseriusan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan iklim investasi, infrastrukturnya dan menyiapkan berbagai insentif yang diperlukan. Hingga Juni 2006, BKPM-Sumut telah menerbitkan persetujuan atas rencana investasi 7 proyek PMDN senilai Rp 8,333 trilyun dan 15 proyek PMA senilai USD 522,2 juta. Sebanyak 5 proyek besar juga telah diresmikan antara lain PLTU Labuhan Angin di Tapanuli Tengah, PLTU Asahan I di Toba Samosir, Program Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan, Program Agromarine politan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terluar serta jaringan interkoneksi Sistem Kelistrikan Sumatera. Bahkan dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi Sumut masih dibawah potensi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tidak heran jika pemerintah pusat akhirnya menetapkan Sumut sebagai salah satu kawasan strategis nasional karena memiliki sektor unggulan, kesiapan infrastruktur serta tersedianya sumber daya manusia.

Tujuan dibentuknya kawasan ekonomi khusus diantaranya untuk meningkatkan investasi, peningkatan penyerapan tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung, peningkatan penerimaan devisa sebagai hasil ekspor, meningkatkan keunggulan kompetitif produk lokal, serta memanfaatkan sumber daya daerah dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui transfer teknologi.

Beberapa kriteria yang dipersyaratkan untuk pengembangan KEKI tersebut antara lain:

1. terletak di jalur perdagangan nasional dan internasional, terdapat pasar potensial berskala internasional, memiliki sumber daya unggulan dan berdaya saing internasional.

2. tersedia sejumlah tenaga kerja lokal baik dari segi kualitas maupun jumlah, memiliki akses informasi serta transportasi jaringan jalan darat, laut dan udara.
3. tersedia sejumlah infrastruktur sumber daya air, listrik dan telepon dengan kapasitas yang memadai.
4. daerah bukan merupakan kawasan hutan lindung serta memiliki akses yang baik dengan pemerintah pusat dan negara lain.
5. memiliki komitmen yang kuat serta berupaya untuk meningkatkan sejumlah fasilitas yang dibutuhkan.
6. mudah akses ke pelabuhan, baik pelabuhan laut maupun pelabuhan udara.

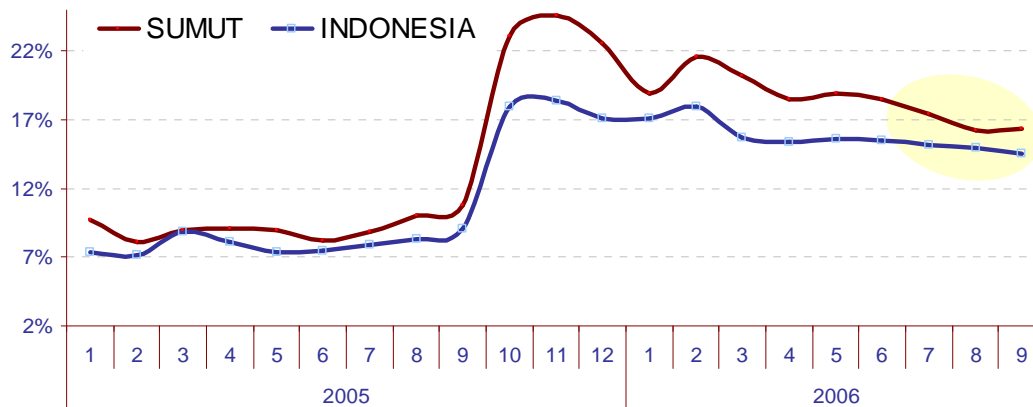
Pihak pemerintah daerah saat ini terus melakukan evaluasi dan monitoring, serta merumuskan strategi pengembangan wilayah berdasarkan rencana tata ruang daerah. Dalam KEKI tersebut akan diberlakukan ketentuan khusus yang sama antara masing-masing kawasan terkait bidang perpajakan, perizinan, keimigrasian dan ketenagakerjaan. Dalam kawasan ini, semua barang tidak akan dikenakan bea masuk, PPN dan cukai, guna mendorong investor juga akan diterapkan kemudahan berinvestasi melalui kemudahan berusaha, pengurangan pajak perusahaan, serta kelonggaran kontrol devisa.

Beberapa kajian yang mendalam tengah dilakukan untuk penentuan lokasi Kawasan Ekonomi Khusus tersebut. Pada tahap awal akan dikembangkan pada lima daerah yakni Medan/Deli Serdang, Tanjung Balai, Asahan, Sibolga/Tapanuli Tengah, Serdang Bedagai dan Madina. Terkait dengan pemilihan lokasi tersebut akan dikoordinasikan oleh Bappeda dengan instansi terkait seperti Disperindag, Bainprom, PT. PLN, PTPN III, Diskanla, Komisi B, Bank Indonesia, dan Kadin). Menurut informasi dari Pemda setempat, pengembangan KEKI tersebut akan difokuskan dengan menerapkan konsep "Agromarinepolitan" yaitu pengembangan kawasan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya kelautan sebagai basis yang kuat.

# PERKEMBANGAN INFLASI SUMATERA UTARA

### 2.1 Kondisi Umum

**Grafik 2.1**  
Perkembangan Inflasi Nasional dan Regional Sumatera Utara (yoy, %)



Menginjak periode triwulan III tahun 2006, trend penurunan inflasi selama tahun 2006 semakin nyata terlihat. Tekanan harga sebagai akibat Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM di tahun 2005 telah menyebabkan lonjakan tingkat harga yang sangat besar (*overshooting*), namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Sebaliknya, menginjak tahun 2006, tidak terjadi kontraksi yang sangat dalam sehingga perkembangan tingkat harga hingga triwulan laporan relatif terkendali dengan mencatat tingkat harga yang cukup stabil. Kondisi tersebut tentunya sangat menggembirakan mengingat inflasi yang berkelanjutan dengan tingkat yang cukup signifikan hanya akan mendorong pelemahan daya beli dan standar hidup masyarakat secara umum. Meskipun indikator kesejahteraan serta kemampuan daya beli masyarakat masih cukup memprihatinkan, namun proses pemulihan diperkirakan mulai berjalan dan dampak lanjutan (*second round effect*) dari kenaikan BBM pada tahun 2005 berangsur-angsur mulai bergerak stabil. Hal tersebut di tandai dengan membaiknya ekspektasi masyarakat terhadap tingkat harga, minimnya tekanan pada kelompok barang *administered price* serta fluktuasi kelompok *volatile food* yang relatif rendah jika dibandingkan kurun waktu yang sama pada tahun 2005. Hingga posisi September 2005, inflasi kalender (Januari-September)

Provinsi Sumut hanya mencapai 2,55%, atau lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 4,05%. Secara tahunan, inflasi Sumut sebesar 16,29% relatif masih lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 14,54%.

## 2.2 Inflasi Sumatera Utara

**Tabel 2.1**  
**Perkembangan Inflasi Nasional dan Regional Sumatera Utara (%)**

INFLASI		2004	2005				2006		
		12	3	6	9	12	3	6	9
NASIONAL	yoy	6,40	8,81	7,43	9,07	17,12	15,74	15,53	14,54
	ytd	6,40	3,19	4,28	6,40	17,12	1,97	2,87	4,05
	qtq	2,62	3,19	1,05	2,03	10,08	1,97	0,87	1,16
	mom	1,04	1,91	0,50	0,69	(0,04)	0,02	0,45	0,38
SUMUT	yoy	6,77	8,93	8,34	10,80	22,51	20,24	18,43	16,29
	ytd	6,77	2,98	4,94	7,97	22,51	1,15	1,49	2,54
	qtq	2,63	2,98	1,91	2,88	13,47	1,15	0,34	1,04
	mom	1,42	1,59	0,58	0,44	(0,28)	0,46	0,18	0,49

Sumber : BPS, diolah

Perkembangan harga secara umum di Provinsi Sumatera Utara pada triwulan III tahun 2006 secara umum terus menunjukkan perbaikan. Kondisi tersebut dapat di lihat pada pencapaian angka inflasi kumulatif Provinsi Sumatera Utara hingga September 2006 yang sebesar 2,55%. Angka tersebut cukup rendah dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,97%. (lihat tabel 2.1). Trend penurunan yang terjadi sejak triwulan akhir tahun 2006 yang lalu juga secara jelas tercermin dari angka inflasi tahunan (*year on year*) yang terus menurun dari posisi akhir tahun 2005 yang sebesar 22,51% menjadi 16,36%.

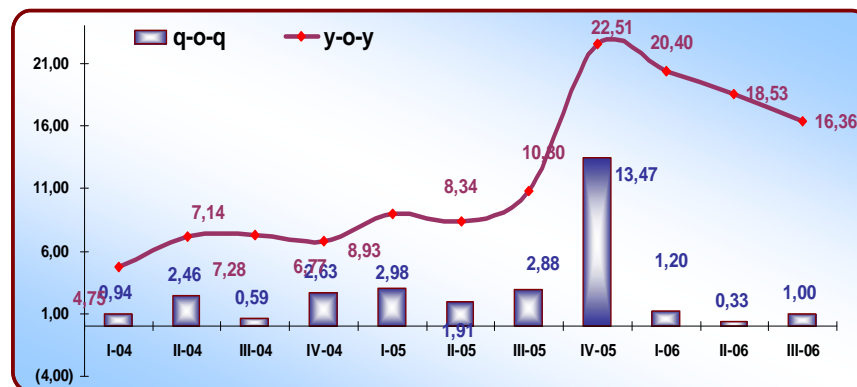
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, perkembangan inflasi sepanjang tahun 2006 mencatat kinerja yang cukup baik kondisi tersebut ditunjukkan dari perkembangan tingkat harga yang relatif stabil sepanjang tahun tahun dengan tingkat fluktuasi yang relatif rendah atau di bawah kisaran 1% setiap bulanannya. Dalam kurun waktu 9 bulan tersebut, terjadi deflasi sebanyak 3 kali pada bulan Januari, April dan Agustus masing-masing sebesar 0,11%, 0,45% dan 0,14%. Sedangkan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 0,84%.

Perkembangan tingkat harga Sumut pada triwulan laporan yang menunjukkan kinerja cukup baik juga tercermin dari angka inflasi secara triwulanan (*qtq*) yakni sebesar 1,04%. Berdasarkan angka historis tingkat inflasi

triwulanan, perkembangan yang terjadi pada triwulan laporan menunjukkan bahwa kondisi harga secara umum bergerak normal, meskipun relatif mengalami tekanan inflasi yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan yang terjadi diperkirakan disebabkan terutama oleh siklus musiman memasuki tahun ajaran baru yang mendorong kenaikan harga pada kelompok barang pendidikan, rekreasi dan olahraga. (lihat Grafik 2.2)

Trend penurunan inflasi pada triwulan laporan juga ditunjukkan oleh penurunan inflasi tahunan yang cukup tajam. Dibandingkan triwulan II yang lalu dengan inflasi sebesar 18,53%, inflasi pada posisi September terus menurun dan mencatat inflasi tahunan sebesar 16,36%.

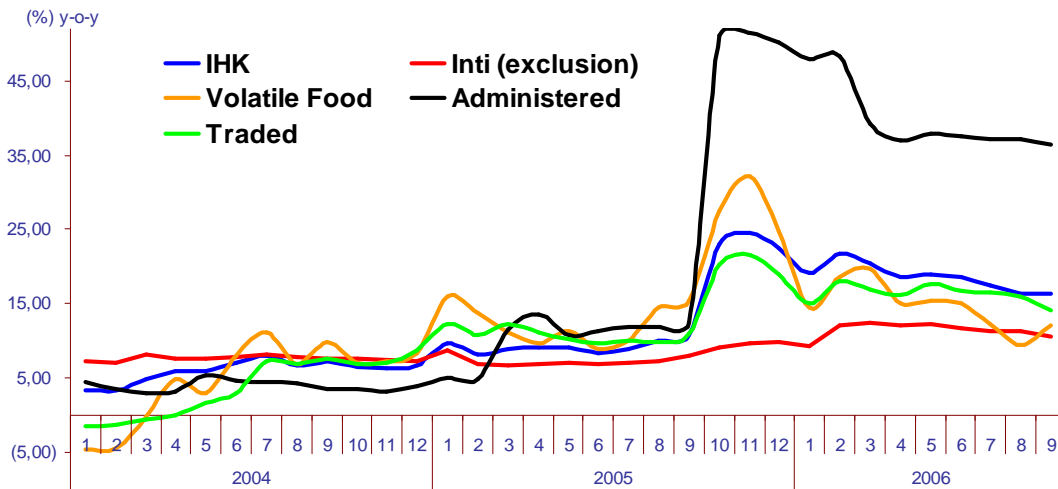
**Grafik 2.2 Inflasi Triwulanan dan Tahunan Sumut**



### 2.3 Disagregasi Inflasi Sumatera Utara

Berdasarkan disagregasi inflasi selama triwulan laporan, terlihat bahwa disparitas kelompok barang inflasi semakin kecil. Seluruh kelompok barang bergerak dengan tingkat yang cukup stabil dan semakin konvergen dengan trend yang terus menurun. inflasi inti dan *volatile food* memberikan kontribusi yang cukup besar. Fluktuasi terbesar masih terjadi pada kelompok *volatile food*, namun mengingat karakteristiknya, volatilitas yang terjadi semakin kecil dan juga bergerak menurun. Kondisi tersebut tercermin dari penurunan inflasi tahunan (*yoy*) kelompok *volatile food* yakni dari 15,02% pada triwulan II menjadi 12,11%, atau turun 2,91%. Kelompok barang *traded* menyusul dengan penurunan sebesar 2,64% menjadi 14,09%, diikuti kelompok barang *administered price* yang turun 1,07% menjadi 36,42%.

**Grafik 2.3 Disagregasi Inflasi**



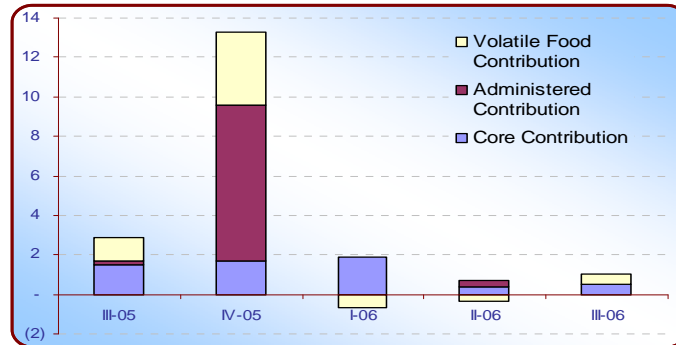
### **Inflasi Inti**

Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti interaksi antara penawaran dan permintaan, lingkungan eksternal seperti nilai tukar, harga komoditi mitra dagang, dan inflasi di negara lainnya. Dari sisi fundamental tersebut, sisi permintaan relatif tidak mengalami lonjakan yang signifikan terkait dengan belum pulihnya daya beli masyarakat, sementara kelompok barang pokok yang bersifat inelastis yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan percepatan pelaksanaan puasa termasuk dalam *volatile food*. sementara Inflasi Inti secara tahunan dengan menggunakan metode *exclusion* selama triwulan laporan mengalami penurunan dari 11,72% pada triwulan II menjadi 10,58%, atau turun 1,14%. Trend penurunan inflasi inti tahunan tersebut juga sejalan dengan semakin membaiknya ekspektasi harga dalam beberapa waktu ke depan.

Berdasarkan sumbangannya, tekanan pada inflasi inti sedikit meningkat menjadi 0,48% dari total inflasi sebesar 1% selama triwulan laporan, atau lebih besar Jika dibandingkan sumbangannya pada triwulan II yang sebesar 0,39%. Kontribusi inflasi terbesar juga disumbangkan kelompok *volatile food* yang mengalami peningkatan permintaan pasca percepatan pelaksanaan puasa di Sumatera Utara di bulan September. Sedangkan pada kelompok *administered price*, relatif tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk inflasi selama triwulan laporan. Berdasarkan perkembangan historis, provinsi Sumatera Utara relatif bersifat responsif terhadap kenaikan komoditi yang termasuk ke dalam *administered price*, sehingga penundaan kenaikan listrik dan

telepon oleh pemerintah cukup efektif untuk meredam potensi tekanan inflasi dari kelompok barang tersebut.

**Grafik 2.3 Kontribusi Inflasi (disagregasi, %)**



## 2.4 Inflasi Berdasarkan Kelompok Barang

### 2.4.1 Inflasi Kelompok Barang

Perkembangan inflasi berdasarkan kelompok barang pada triwulan III tahun 2006 mengalami perubahan pola yang cukup signifikan pada beberapa kelompok barang, baik dibandingkan triwulan sebelumnya maupun terhadap posisi yang sama tahun sebelumnya. Tekanan inflasi yang cukup tinggi di alami kelompok barang bahan makanan serta pendidikan, rekreasi dan olahraga, sedangkan sisanya mencatat inflasi yang relatif rendah. Tingginya tekanan inflasi pada kelompok barang pendidikan, rekreasi dan olahraga merupakan siklus musiman pada triwulan III yang memasuki musim ajaran baru. Namun kondisi tersebut tidak diikuti kelompok barang sandang sebagai komplementer yang justru mencatat deflasi sebesar 0,02%. Peningkatan harga kelompok barang sandang diperkirakan sudah terjadi pada triwulan II yang mengalami inflasi sebesar 3,62%. Yang menarik, pelaksanaan puasa yang lebih cepat di tahun 2006 ternyata tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan harga kelompok barang makanan jadi yang mencatat deflasi sebesar 0,02%. Hal tersebut diperkuat dengan inflasi pada kelompok bahan makanan yang meskipun mencatat inflasi sebesar 1,94%, namun relatif tidak sebesar periode yang sama pada tahun lalu yaitu 4,50%. Padahal pada triwulan I dan II yang lalu kelompok bahan makanan sudah mencatat deflasi yang cukup besar yakni masing-masing sebesar 2,82% dan 1,17%. Hal tersebut di satu sisi cukup signifikan dalam mengurangi tekanan inflasi secara umum, namun di lain



pihak juga menunjukkan rendahnya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan dasar yang selama ini menjadi salah satu sumber tekanan inflasi di Sumatera Utara. Faktor rendahnya daya beli masyarakat diperkirakan juga turut mempengaruhi minimnya permintaan terhadap barang kebutuhan dasar tersebut. Perkembangan inflasi kelompok barang secara triwulanan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2. Inflasi Kelompok Barang Sumut Triwulanan**

KELOMPOK BARANG	III-05	IV-05	I-06	II-06	III-06
BAHAN MAKANAN	4,50	14,00	(2,82)	(1,17)	1,94
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	2,92	4,35	1,59	0,70	(0,02)
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BHN BAKAR	1,89	9,29	6,29	1,00	0,45
SANDANG	3,54	3,93	1,13	3,62	(0,02)
KESEHATAN	(0,14)	1,61	5,72	1,15	0,42
PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA	5,78	(2,43)	1,33	0,26	6,07
TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	0,76	43,00	0,07	0,35	0,14
<b>SUMUT</b>	<b>2,88</b>	<b>13,47</b>	<b>1,15</b>	<b>0,34</b>	<b>1,00</b>

*Sumber : BPS, diolah*

#### 2.4.2 Sumbangan Inflasi Kelompok Barang

Inflasi kelompok barang menurut sumbangannya dapat dilihat melalui kontribusinya selama tiga bulan periode laporan (Juli - September). Secara umum tekanan inflasi yang terjadi pada bulan Juli cukup besar, kemudian mengalami penurunan pada bulan Agustus dengan mencatat deflasi sebesar 0,14%, dan kembali meningkat pada bulan September dengan mencatat inflasi sebesar 0,47%. Perincian sumbangan inflasi kelompok barang di Sumut pada triwulan III dapat pada tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3. Sumbangan Inflasi Kelompok Barang Sumut**

KELOMPOK BARANG	Jul-06	Agust-06	Sep-06	II-06
<b>1.</b> BAHAN MAKANAN	0,36	(0,30)	0,49	0,55
<b>2.</b> MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	(0,01)	0,02	(0,02)	(0,00)
<b>3.</b> PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BHN BAKAR	0,02	0,05	0,04	0,11
<b>4.</b> SANDANG	0,06	(0,01)	(0,05)	(0,00)
<b>5.</b> KESEHATAN	0,02	0,00	0,00	0,02
<b>6.</b> PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA	0,20	0,10	0,00	0,30
<b>7.</b> TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	0,02	0,00	0,00	0,02
<b>SUMUT</b>	<b>0,66</b>	<b>(0,14)</b>	<b>0,47</b>	<b>1,00</b>

*Sumber : BPS, diolah*

Berdasarkan sumbangan dari 10 komoditas penyumbang inflasi terbesar, kelompok bahan makanan dan pendidikan, rekreasi dan olahraga merupakan

kelompok yang memberikan sumbangan utama inflasi pada triwulan laporan. Kelompok bahan makanan diwakili oleh komoditi cabe merah, dencis, cabe hijau, beras, ikan kembung, daging sapi dan ikan tongkol, sementara kelompok barang pendidikan, rekreasi dan olahraga diwakili oleh komoditi biaya sekolah dasar dan bacaan/buku pelajaran.

**Tabel 2.4. 10 Komoditi Penyumbang Terbesar Inflasi Triwulan III - 2006**

<b>NO.</b>	<b>JENIS KOMODITI</b>	<b>III-06</b>	<b>KEL. BARANG</b>
1	Cabe Merah	0,80	Bahan Makanan
2	Sekolah Dasar	0,14	Pendidikan
3	Dencis	0,09	Bahan Makanan
4	Cabe Hijau	0,09	Bahan Makanan
5	Buku Bacaan/Pelajaran	0,08	Pendidikan
6	Kontrak Rumah	0,07	Perumahan
7	Beras	0,07	Bahan Makanan
8	Kembung/Gembung	0,06	Bahan Makanan
9	Daging Sapi	0,06	Bahan Makanan
10	Tongkol	0,05	Bahan Makanan

#### **2.4.3 Komoditi yang mengalami Inflasi / Deflasi Terbesar**

Berdasarkan komoditi yang mengalami inflasi atau deflasi bulanan sepanjang periode triwulan III tahun 2005, dari 228 keranjang perhitungan inflasi yang diperoleh, tercatat pada bulan Juli sebanyak 93 komoditi yang mengalami peningkatan harga (inflasi) dan 87 komoditi yang mengalami deflasi. Pada bulan Agustus sebanyak 123 komoditi yang mengalami inflasi dan 66 mencatat deflasi, sementara pada bulan Maret komoditi yang mengalami inflasi menjadi 138 dan yang mencatat deflasi menurun menjadi sebanyak 49 komoditi.

**Tabel 2.5. 10 Komoditi Inflasi (Deflasi) Terbesar**

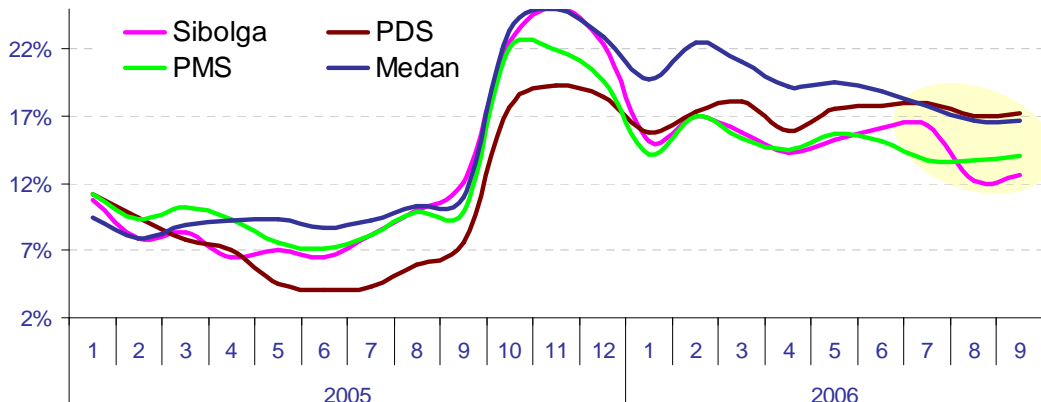
JULI 2006				
NO.	JENIS KOMODITI	INFLASI	JENIS KOMODITI	DEFLASI
1	Cabe Merah	32,13	Bawang Putih	(27,62)
2	Angkutan Udara	30,92	Tomat Buah	(23,90)
3	Cabe Rawit	30,91	Tomat Sayur	(19,66)
4	Sekolah Dasar	19,47	Jeruk	(16,53)
5	Buncis	18,12	Kelotok	(11,54)
6	Cabe Hijau	17,73	Wortel	(9,15)
7	Teter	14,29	Nanas	(6,82)
8	Gabus	12,10	Labu Siam/Jipang	(6,25)
9	Kacang Panjang	10,58	Kentang	(5,44)
10	Daging Ayam Ras	10,40	Bawang Merah	(4,79)
AGUSTUS 2006				
NO.	JENIS KOMODITI	INFLASI	JENIS KOMODITI	DEFLASI
1	Kol Putih/Kubis	48,75	Teter	(29,17)
2	Cabe Rawit	34,81	Bawang Putih	(28,96)
3	Cabe Hijau	30,20	Daging Ayam Ras	(17,99)
4	Kelotok	21,74	Daun Katuk	(13,27)
5	Buku Bacaan/Pelajaran	19,79	Jeruk	(12,72)
6	Sawi Putih	13,33	Batu Bata/Batu Tala	(11,17)
7	Buncis	10,52	Kelapa	(9,53)
8	Labu Siam/Jipang	10,03	Aso-Aso	(7,33)
9	Sawi Hijau	9,85	Bawang Merah	(7,32)
10	Pir	8,86	Wortel	(6,96)
SEPTEMBER 2006				
NO.	JENIS KOMODITI	INFLASI	JENIS KOMODITI	DEFLASI
1	Cabe Merah	107,97	Bawang Merah	(18,75)
2	Cabe Hijau	89,55	Daging Ayam Ras	(14,36)
3	Cabe Rawit	38,10	Batu Bata/Batu Tala	(9,39)
4	Teter	29,41	Ikan Goreng	(9,38)
5	Angkutan Udara	22,95	Kelapa	(8,68)
6	Salak	21,50	Daging Ayam Kampung	(6,93)
7	Sandal Kulit	21,45	Mayung	(6,11)
8	Daun Katuk	14,13	Rempela Hati Ayam	(5,57)
9	Sawi Putih	11,76	Emas Perhiasan	(4,69)
10	Wortel	11,59	Pepaya	(4,65)

Seiring dengan menurunnya kontribusi volatilitas food terhadap tekanan inflasi Sumut, berdasarkan peringkat komoditi yang mengalami inflasi / (deflasi) terbesar pada bulan Januari hingga Maret, terlihat bahwa komoditas kelompok barang yang menjadi determinan inflasi lebih konvergen yang didominasi bahan makanan serta pendidikan rekreasi dan olahraga.

## **2.5 Inflasi Pada Kota-kota Perhitungan Inflasi Sumut**

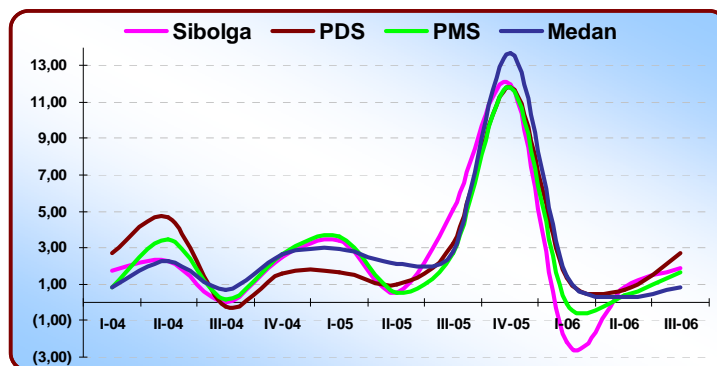
Perkembangan harga secara triwulanan di 4 kota perhitungan inflasi Sumut secara umum menunjukkan pola pergerakan yang relatif sejalan yakni trend penurunan yang berkesinambungan pasca lonjakan inflasi di tahun 2005. Trend inflasi di keempat kota perhitungan inflasi Sumut dapat di lihat pada grafik 2.5:

**Grafik 2.5**  
**Perkembangan Inflasi di Empat Kota Perhitungan Inflasi (yoy,%)**



Dari keempat kota perhitungan inflasi tersebut, inflasi kota Medan dan Padang Sidempuan relatif lebih tinggi dibandingkan kota Sibolga dan Pematang Siantar. Tingginya inflasi di kota Padang Sidempuan terutama disebabkan oleh kenaikan harga kelompok barang makanan jadi di bulan Juli dan Agustus masing-masing sebesar 1,86% dan 3,34% serta kelompok bahan makanan yang melonjak di bulan Agustus mencapai 3,35%.

**Grafik 2.6 Perkembangan Inflasi Triwulanan di 4 Kota Perhitungan Inflasi Sumut**



Secara triwulanan (qtq), inflasi tertinggi terjadi di kota Padang Sidempuan yakni sebesar 2,75%, di susul Sibolga 1,91%, Pematang Siantar 1,68% dan Medan 0,85%. (lihat Tabel 2.7). Meningkatnya tekanan inflasi yang terjadi pada seluruh kota perhitungan inflasi di akhir triwulan III terutama disebabkan naiknya permintaan menjelang pelaksanaan puasa, khususnya terhadap sub kelompok ikan segar 5,16% dan bumbu-bumbuan hingga 23,32%. Perkembangan tingkat inflasi kelompok barang di masing-masing kota dapat dilihat dengan jelas pada tabel 2.7 di bawah ini.

**Tabel 2.7. Inflasi Kelompok Barang Pada 4 Kota Perhitungan Inflasi  
Sumut Triwulan III Tahun 2006**

<b>KELOMPOK BARANG</b>	<b>Sbg</b>	<b>Pds</b>	<b>Pms</b>	<b>Mdn</b>	<b>Sumut</b>
BAHAN MAKANAN	4,43	3,13	2,91	1,67	1,94
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	-	5,24	0,69	(0,40)	(0,02)
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BHN BAKAR	0,14	1,70	0,45	0,42	0,45
SANDANG	2,06	0,69	0,71	(0,18)	(0,02)
KESEHATAN	0,15	0,37	0,28	0,43	0,42
PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA	2,23	2,34	6,94	6,15	6,07
TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	0,03	0,38	-	0,14	0,14
<b>Total</b>	<b>1,91</b>	<b>2,75</b>	<b>1,68</b>	<b>0,85</b>	<b>1,00</b>

## **BOKS - 7**

### **DETERMINAN INFLASI SUMATERA UTARA TRIWULAN III TAHUN 2006**

Inflasi kelompok barang menurut sumbangannya selama triwulan III dapat dilihat melalui kontribusinya selama tiga bulan periode laporan (Juli-September). Secara umum tekanan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli dan September, sementara bulan Agustus mencatat deflasi.

Sumbangan inflasi berdasarkan kelompok barang diwakili oleh 7 kelompok. Berdasarkan perkembangan tingkat harga selama triwulan III tahun 2006, kelompok barang bahan makanan serta pendidikan, rekreasi dan olahraga merupakan kelompok barang yang mengalami peningkatan terbesar masing-masing dengan mencatat inflasi sebesar 1,94% (qtq) dan 6,07% (qtq). Kontribusi yang sangat signifikan pada kelompok bahan makanan juga mengakibatkan kelompok barang tersebut menjadi penyumbang inflasi terbesar triwulan III yaitu hingga 0,55%. Sedangkan kelompok barang pendidikan, rekreasi, dan olahraga, meskipun *sharenya* tidak terlalu besar, namun dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi mampu menyumbangkan 0,30% dari total inflasi selama triwulan III.

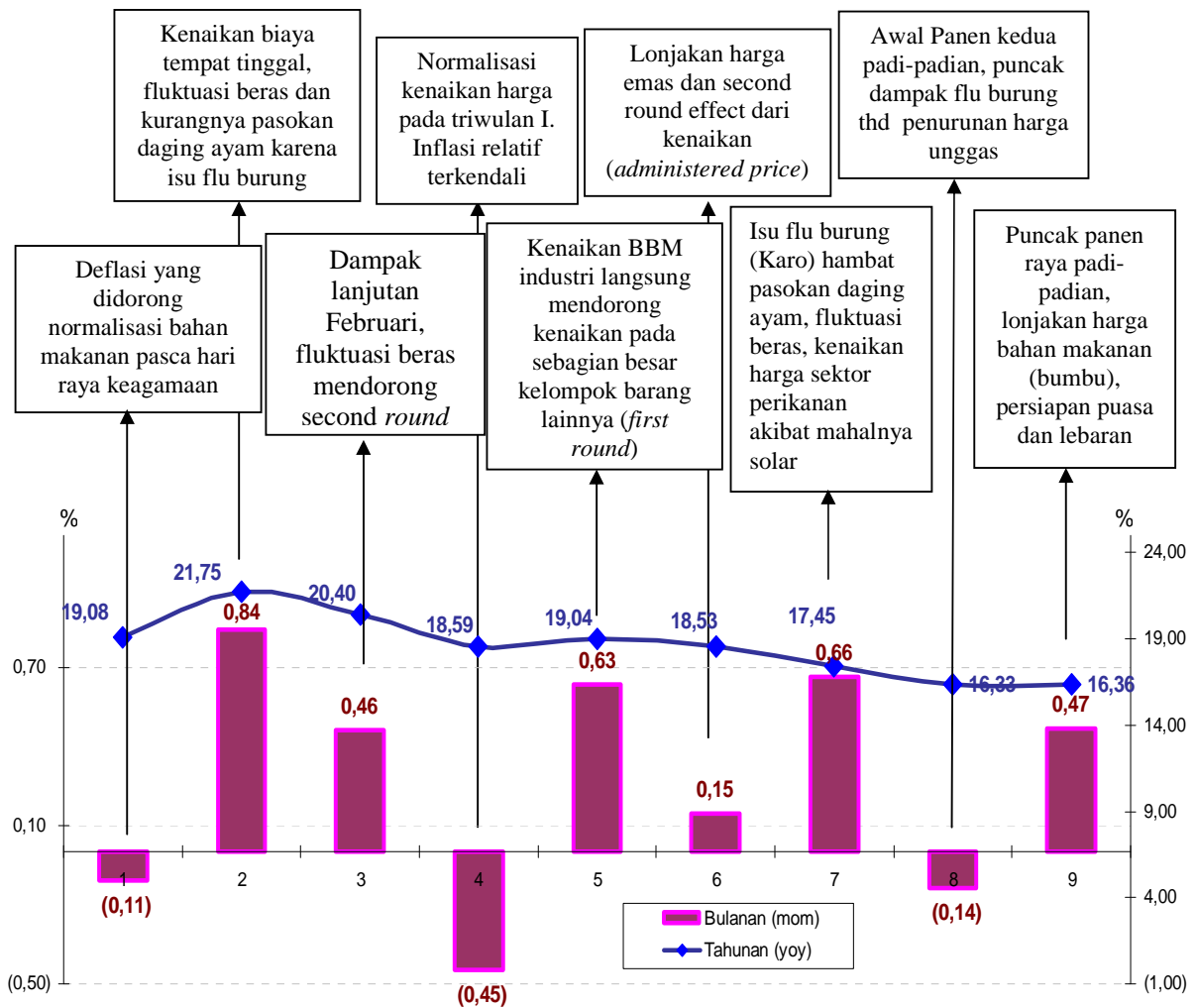
#### **Determinan Inflasi**

Berdasarkan perkembangan komoditi yang menyebabkan inflasi dan deflasi tersebut, kita dapat mengeksplorasi beberapa faktor yang menentukan (*determine*) inflasi provinsi Sumatera Utara pada triwulan laporan. Dari sisi Penawaran (*cost push*), tekanan inflasi terutama disebabkan oleh naiknya permintaan terkait dengan kebutuhan dasar menjelang pelaksanaan puasa yang berimbas pada lonjakan yang cukup besar pada subsektor bahan makanan seperti bumbu-bumbuan, ikan segar, ikan diawetkan dan sayur-sayuran. Tekanan pada kelompok bahan makanan tersebut relatif berkurang karena subsektor padi-padian yang merupakan pangsa inflasi terbesar mengalami puncak panen kedua tahun ini di akhir triwulan laporan sehingga mencatat deflasi sebesar 0,37% di bulan Agustus dan 1,71% di bulan September. Tingkat harga Subsektor daging yang diwakili oleh unggas juga mengalami titik terendah dengan mencatat deflasi sebesar 8,74% pada bulan Agustus dan 5,02% pada bulan September yang diakibatkan pemusnahan masal di 16

kabupaten/kota di Sumut yang menyebabkan sebagian masyarakat enggan untuk mengkonsumsi daging ayam.

Sementara tekanan yang terjadi pada kelompok barang pendidikan, rekreasi dan olahraga terutama disebabkan siklus musiman memasuki tahun ajaran baru di awal triwulan laporan. Secara triwulanan (qtq), subsektor perlengkapan jasa pendidikan dan jasa pendidikan mengalami inflasi terbesar masing-masing hingga 12,63% dan 6,29%. Buku pelajaran, pensil dan tas sekolah merupakan beberapa komoditi perlengkapan jasa pendidikan yang mengalami inflasi terbesar, sementara untuk jasa pendidikan, kenaikan harga terjadi di seluruh strata pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

**Grafik 1. Faktor Determinan Inflasi Bulanan Sumut Semester I - 2006**



## **BOKS - 8**

### **SURVEI KONSUMEN TRIWULAN III TAHUN 2006**

#### **III. LATAR BELAKANG**

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai tugas antara lain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah baik dalam arti pengendalian inflasi maupun nilai tukar. Untuk menyusun kebijakan, dibutuhkan informasi antara lain mengenai perkembangan permintaan dan penawaran pada sektor riil. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membangun indikator yang mencerminkan tendensi permintaan masyarakat seperti kondisi ekonomi saat ini, ekspektasi terhadap kondisi ekonomi dan ekspektasi terhadap harga menurut konsumen.

Secara teoritis diyakini bahwa persepsi atau keyakinan dan ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi akan mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. Dengan memperhatikan perilaku konsumsi masyarakat maka dapat diperkirakan perkembangan perekonomian dan tekanan harga (inflasi), sehingga akan membantu mengantisipasi sumber-sumber potensial tekanan inflasi. Indikasi terhadap keyakinan dan ekspektasi masyarakat itu lah yang diharapkan dapat diketahui melalui Survei Konsumen ini.

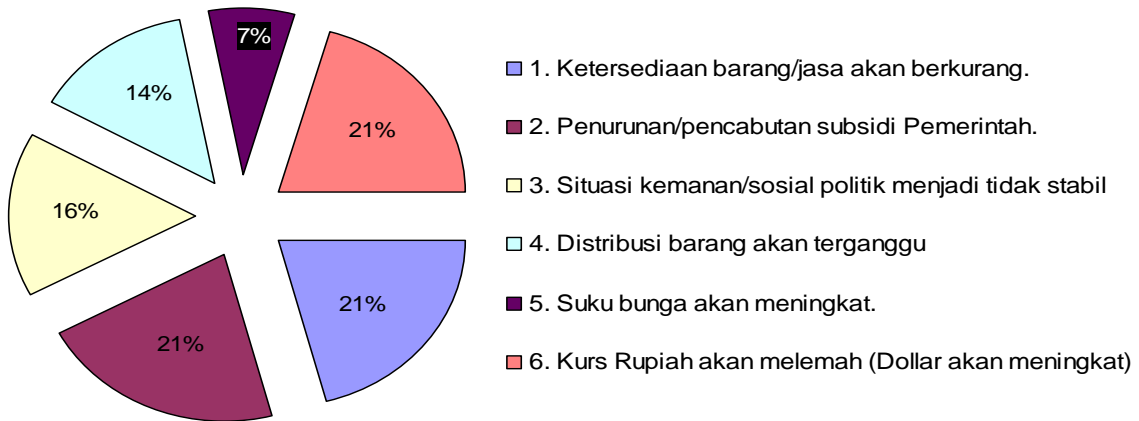
#### **IV. HASIL SURVEI**

##### **A. Kondisi Ekonomi**

Berdasarkan hasil survei konsumen pada triwulan laporan, ekspektasi kenaikan harga masih mendominasi persepsi masyarakat. Secara umum, beberapa hal yang menyebabkan masih tingginya ekspektasi kenaikan harga di masyarakat disebabkan beberapa alasan yang tersebar cukup merata, antara lain pengaruh penurunan/pencabutan subsidi oleh pemerintah yakni sebesar 21,4%, disusul kurangnya ketersediaan pasokan barang dan jasa sebesar 20,8%, pelemahan kurs rupiah sebesar 20,6%, ketidakstabilan situasi keamanan dan politik sebesar 16%, , terganggunya distribusi barang sebesar 13,8% dan peningkatan suku bunga 7,5%. Persepsi responden yang masih menempatkan pencabutan subsidi oleh pemerintah sebagai faktor utama pendorong inflasi, meskipun perannya terus mengalami penurunan yang signifikan. Volatilitas Rupiah yang agak meningkat pada selama triwulan II serta pelaksanaan perayaan hari raya keagamaan serta tahun baru di triwulan akhir 2006 juga berpotensi memicu kenaikan harga hingga akhir tahun 2006.



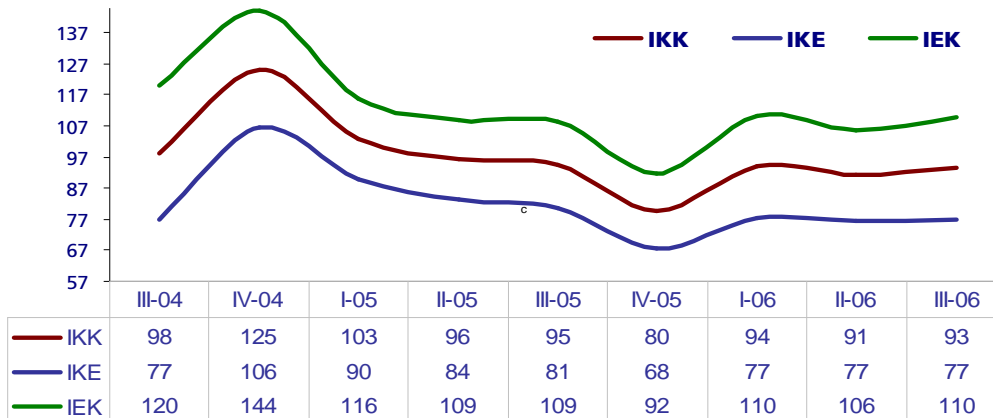
**Grafik 3.1 Faktor Pendorong Kenaikan Harga di Akhir 2006**



## B. Indeks Keyakinan Konsumen

Survei konsumen untuk triwulan III tahun 2006 yang ditunjukkan ketiga indikator utamanya yaitu Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Ekonomi (IEK) menunjukkan perkembangan yang relatif stabil dengan trend yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. (Grafik 3.2).

**Grafik 3.2 Keyakinan Konsumen**



IKK menurun tipis dari 91,08 menjadi 93,42, sementara IKE dan IEK juga membaik masing-masing dari sebesar 76,57 menjadi 76,93 dan dari 105,57 menjadi 109,91 pada triwulan laporan.

Responden beranggapan bahwa tingkat penghasilan, ketersediaan tenaga kerja saat ini dan ke depan relatif akan membaik yang juga di dukung perbaikan kondisi ekonomi. Namun sebagian besar responden juga masih tetap belum akan melakukan pembelian barang tahan lama atau pun yang lebih

bersifat produktif mengingat kondisi saat ini masih cukup sulit sehingga kebutuhan dasar yang bersifat konsumtif masih tetap dominan.

## BAB III PERKEMBANGAN PERBANKAN

### 3.1 PERKEMBANGAN PERBANKAN

#### 3.1.1 Perkembangan Bank Umum

Beberapa indikator keuangan perbankan di wilayah Sumatera Utara secara *year on year (yoy)* pada triwulan III tahun 2006 menunjukkan perkembangan yang positif tercermin dari laju pertumbuhan asset sebesar 15,61%, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 10,83% dan pemberian kredit meningkat sebesar 15,27%.

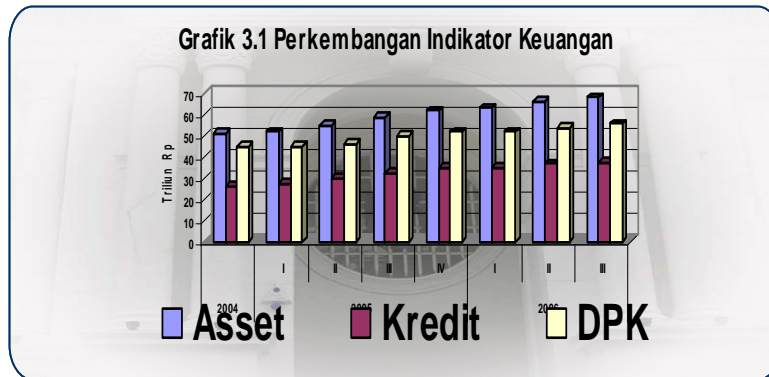
Sementara itu, apabila dibandingkan bulan Desember 2005, total asset perbankan mengalami peningkatan sebesar 9,74%, kredit meningkat 8,03% dan DPK meningkat sebesar 6,74%. Perkembangan indikator perbankan dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.1 sbb:

**Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Keuangan  
(Triliun Rp)**

Indikator	2004	2005				2006			Pertumbuhan T-III (%)	
		T-I	T-II	T-III	T-IV	T-I	T-II	T-III	YOY	YTD
Asset	51.12	51.94	54.67	58.98	62.14	63.44	66.13	68.19	15.61	9,74
Kredit	26.25	27.59	30.34	32.93	35.14	35.37	37.00	37.96	15.27	8,03
D P K	45.20	45.01	46.44	50.17	52.09	52.10	53.92	55.60	10.83	6,74

Trend perkembangan indikator bank umum dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 3.1, sbb :

Grafik 3.1 Perkembangan Indikator Keuangan (Triliun Rp)



### 3.1.1.1 Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)

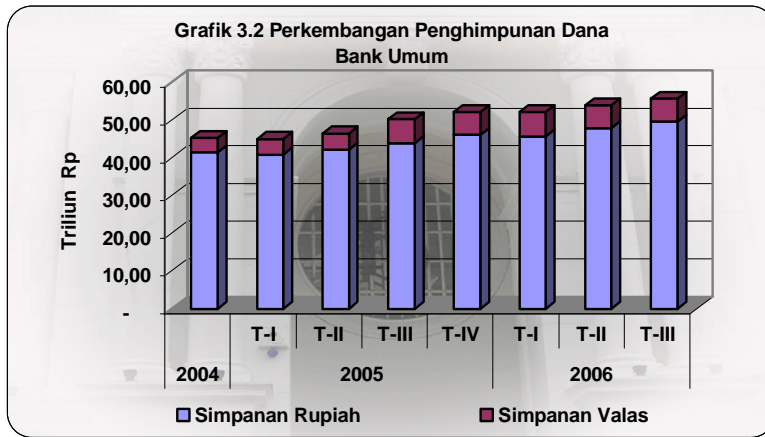
Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada triwulan III tahun 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 10,83%. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan pertumbuhan simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah berupa deposito dan giro sebesar 12,84%, sedangkan simpanan dalam bentuk valuta asing tampaknya cenderung mengalami penurunan sebesar -3,33% pada triwulan III/2006. Penurunan pertumbuhan simpanan valas terutama disebabkan relatif stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang US Dollar sejak Juni 2006. Perkembangan indikator penghimpunan dana pihak ketiga bank umum dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.2 sbb:

Tabel 3.2 Perkembangan Penghimpunan Dana Bank Umum (Triliun Rp)

URAIAN	2004	2005				2006			Growth 2006		
		T-I	T-II	T-III	T-IV	T-I	T-II	T-III	T-IV	T-I	T-II
a. Rupiah	41.39	40.86	42.16	43.91	46.09	45.63	47.87	49.56	11.67	13.55	12.84
- Giro	6.32	6.00	6.65	6.87	6.82	7.11	8.13	9.40	18.66	22.21	36.77
- Tabungan	18.91	18.70	18.61	18.15	17.68	17.13	17.65	17.72	-8.41	-5.15	-2.38
- Deposito	16.16	16.16	16.89	18.90	21.59	21.39	22.09	22.44	32.33	30.73	18.77
b. Valas	3.81	4.15	4.28	6.26	6.00	6.47	6.05	6.05	55.87	41.26	-3.33
- Giro	1.88	2.07	2.02	2.47	2.70	2.60	2.34	2.40	25.73	15.65	-2.88
- Deposito	1.92	2.08	2.26	3.79	3.30	3.87	3.71	3.65	85.73	64.23	-3.63
<b>Total DPK</b>	<b>45.20</b>	<b>45.01</b>	<b>46.44</b>	<b>50.17</b>	<b>52.09</b>	<b>52.10</b>	<b>53.92</b>	<b>55.60</b>	<b>15.75</b>	<b>16.10</b>	<b>10.83</b>

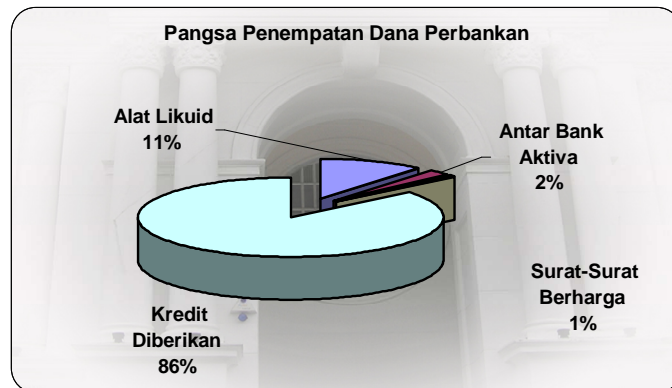
Trend perkembangan penghimpunan dana pihak ketiga dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 3.2, sbb:

**Grafik 3.2 Perkembangan DPK Bank Umum (Triliun Rp)**



### 3.1.1.2 Penempatan Dana

Penempatan dana perbankan di wilayah Sumatera Utara sebagian besar berupa penempatan pada kredit yaitu sebesar 86%, sedangkan penempatan pada aktiva produktif lain seperti penempatan antar bank, surat-surat berharga dan alat likuid relatif rendah. Pangsa penempatan dana secara ilustratif dapat dilihat pada grafik 3.3, sbb:



Sedangkan perkembangan pangsa penempatan dana perbankan pada komponen aktiva produktif dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

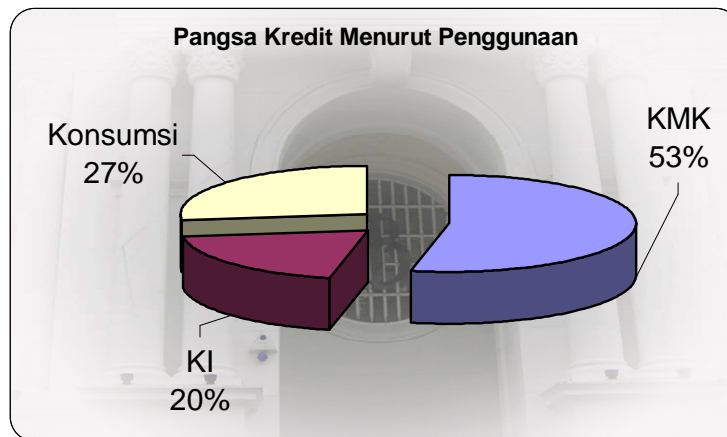
**Tabel 3.3 Perkembangan Penempatan Dana Bank Umum  
(Nominal dalam Triliun)**

URAIAN	2004	2005				2006			Growth 2006		
		T-I	T-II	T-III	T-IV	T-I	T-II	T-III	T-I	T-II	T-III
Alat Likuid	2.40	1.84	2.41	2.29	2.33	3.50	4.30	4.78	90.09	78.53	108.97
Antar Bank Aktiva	0.68	0.73	0.41	0.83	0.84	0.51	0.75	0.97	30.27	82.33	17.25
Surat-Surat Berharga	0.08	0.15	0.23	0.25	0.29	0.18	0.19	0.30	16.88	15.49	19.65
Kredit Diberikan	26.25	27.59	30.34	32.93	35.14	35.37	37.00	36.65	28.19	21.97	11.29

### 3.1.1.3 Perkembangan Kredit

Perkembangan kredit pada triwulan III tahun 2006 menunjukkan pertumbuhan yang cukup berarti yaitu tumbuh sebesar 15,27%. Dilihat dari pangsa kredit menurut jenis penggunaannya maka sebagian besar penggunaan kredit masih berupa kredit KMK, kemudian diikuti kredit konsumsi dan kemudian kredit investasi. Secara ilustratif dapat dilihat pada grafik 3.4 , sbb;

**Grafik 3.4 Pangsa Kredit Menurut Penggunaan**



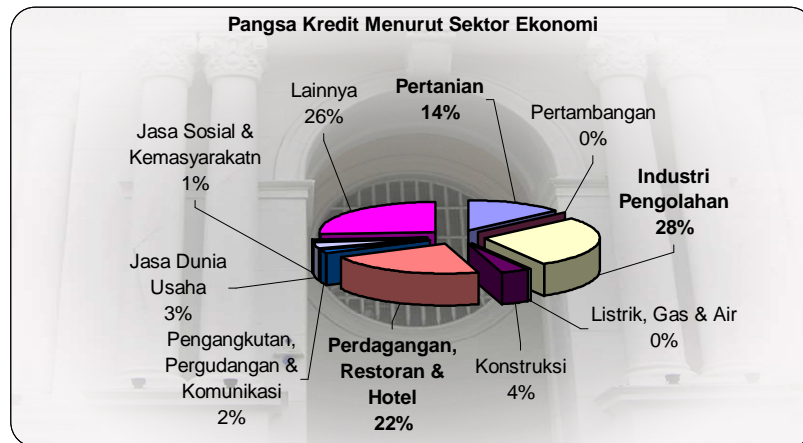
Dilihat dari laju pertumbuhan kredit menurut jenis penggunaan maka laju pertumbuhan kredit konsumsi lebih tinggi dibandingkan dengan jenis KMK dan KI. Perkembangan Kredit menurut jenis penggunaan dapat dilihat pada tabel 3.4.

**Tabel 3.4 Perkembangan Kredit Menurut Jenis Penggunaan  
(Triliun Rp)**

Kredit	2004	2005				2006			Growth 2006		
		T-I	T-II	T-III	T-IV	T-I	T-II	T-III	T-I	T-II	T-III
M. Kerja	15.35	15.95	17.56	19.05	20.01	19.20	20.23	20.25	20.36	15.22	6.26
Investasi	5.25	5.71	6.05	6.29	7.12	7.61	8.18	7.52	33.27	35.32	19.59
Konsumsi	5.65	5.94	6.73	7.59	8.02	8.57	8.59	10.19	44.36	27.56	34.28
<b>Jumlah</b>	<b>26.25</b>	<b>27.59</b>	<b>30.34</b>	<b>32.93</b>	<b>35.14</b>	<b>35.37</b>	<b>37.00</b>	<b>37.96</b>	<b>28.19</b>	<b>21.97</b>	<b>15.27</b>

Selanjutnya apabila dilihat penyaluran kredit menurut sektor ekonomi maka sebagian besar penyaluran kredit diberikan untuk pembiayaan sektor industri pengolahan (28%), perdagangan (22%) dan pertanian (14%), secara grafik dapat dilihat pada grafik 3.5, sbb:

**Grafik 3.5 Pangsa Kredit Menurut Sektor Ekonomi**



Selanjutnya apabila dilihat dari pertumbuhan kredit menurut sektor maka sektor konstruksi dan pertanian mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu masing-masing sebesar 31,84% dan 26,71%.

**Tabel 3.5 Pertumbuhan & Pangsa Kredit Menurut Sektor Ekonomi  
(Triliun Rp)**

Sektor Ekonomi	2004	2005				2006			Growth 2006		
		T-I	T-II	T-III	T-IV	T-I	T-II	T-III	T-I	T-II	T-III
Pertanian	3.69	3.76	3.75	4.08	4.85	4.76	5.46	5.16	26.38	45.65	26.71
Pertambangan	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
Industri Pengolahan	7.23	7.75	8.79	9.51	9.44	10.01	10.27	10.53	29.06	16.89	10.71
Listrik Gas dan Air	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-67.12	-21.09	-61.80
Konstruksi	0.92	1.03	1.07	1.15	1.30	1.25	1.17	1.52	20.96	9.97	31.84
Perdag, Restoran, Htl	6.26	6.68	7.47	8.10	8.71	8.39	8.77	8.51	25.72	17.34	4.97
Angkutan & Kom.	0.47	0.52	0.64	0.69	0.72	0.68	0.70	0.71	30.04	9.82	2.63
Jasa Dunia Usaha	1.65	1.55	1.55	1.48	1.78	1.44	1.72	1.29	-7.05	11.15	-13.05
Jasa Sosial Masy.	0.46	0.44	0.46	0.47	0.52	0.48	0.56	0.34	9.10	21.28	-28.60
Lainnya	5.57	5.83	6.61	7.44	7.83	8.36	8.35	9.92	43.27	26.27	33.06
<b>Total</b>	<b>26.25</b>	<b>27.59</b>	<b>30.34</b>	<b>32.93</b>	<b>35.14</b>	<b>35.37</b>	<b>37.00</b>	<b>37.96</b>	<b>28.19</b>	<b>21.97</b>	<b>15.27</b>

### 3.1.1.4 Perkembangan Non Performing Loan (NPL)

Perkembangan kredit NPL menurut sektor ekonomi tercermin pada tabel 3.6. Pertumbuhan NPL sampai dengan triwulan III tahun 2006 mencatat pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 9,93%. Sektor ekonomi yang memberikan sumbangan NPL terbesar yaitu sektor industri pengolahan. Penyebab tumbuhnya NPL sektor tersebut antara lain dampak dari kebijakan pemberantasan praktek *illegal logging* terhadap usaha sub sektor perikanan. Walaupun laju pertumbuhan NPL sektor tersebut relatif tinggi, namun dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I dan II tahun 2006, tampaknya perkembangan rasio Non Performing Loan terus memburuk. Perkembangan NPL sektor ekonomi secara jelas dapat dilihat pada table 3.6, sbb:

**Tabel 3.6 Perkembangan NPL Per Sektor Ekonomi Bank Umum (Triliun Rp)**

Sektor Ekonomi	2004	2005				2006		
		T-I	T-II	T-III	T-IV	T-I	T-II	T-III
Pertanian	0.13	0.41	0.69	0.87	0.56	0.64	0.78	0.84
Pertambangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	0.42	0.39	2.04	2.23	2.10	2.03	2.11	2.14
Listrik Gas dan Air	-	-	-	-	-	-	-	-
Konstruksi	0.04	0.04	0.14	0.20	0.20	0.19	0.12	0.14
Perdag, Restoran, Htl	0.09	0.11	0.14	0.19	0.20	0.22	0.32	0.36
Pengang, Pergud. & Kom.	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.02	0.04	0.05
Jasa Dunia Usaha	0.01	0.02	0.20	0.07	0.05	0.05	0.13	0.12
Jasa Sosial Masy.	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01
Lainnya	0.07	0.10	0.09	0.13	0.14	0.19	0.24	0.40
<b>Total NPL</b>	<b>0.78</b>	<b>1.07</b>	<b>3.33</b>	<b>3.70</b>	<b>3.27</b>	<b>3.36</b>	<b>3.75</b>	<b>4.07</b>
<b>NPL UMKM</b>	<b>0.31</b>	<b>0.37</b>	<b>0.44</b>	<b>0.56</b>	<b>0.61</b>	<b>0.71</b>	<b>0.82</b>	<b>0.94</b>
<b>Kredit</b>	<b>26.25</b>	<b>27.59</b>	<b>30.34</b>	<b>32.92</b>	<b>35.14</b>	<b>35.27</b>	<b>37.00</b>	<b>37.96</b>
<b>% NPL Seluruh Bank</b>	<b>2.97%</b>	<b>3.88%</b>	<b>10.98%</b>	<b>11.24%</b>	<b>9.31%</b>	<b>9.53%</b>	<b>10.14%</b>	<b>10.72%</b>
<b>% NPL UMKM</b>	<b>1.18%</b>	<b>1.34%</b>	<b>1.45%</b>	<b>1.70%</b>	<b>1.74%</b>	<b>2.01%</b>	<b>2.22%</b>	<b>2.48%</b>

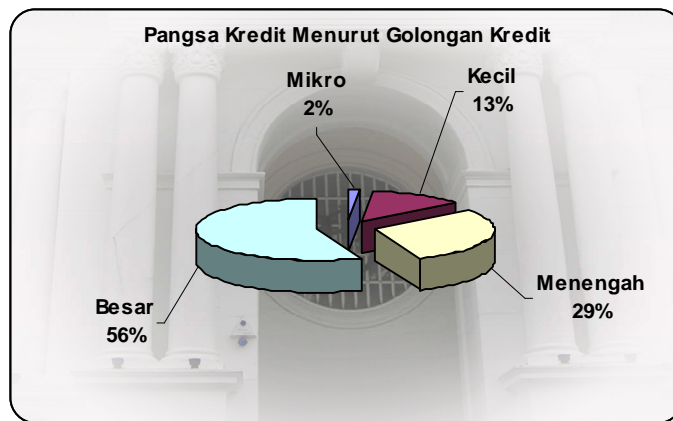
### 3.1.1.5 Perkembangan Kredit Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Sampai dengan posisi triwulan III tahun 2006, Kredit usaha Mikro dan kecil (UKM) terhadap jumlah kredit keseluruhan tercatat sebesar Rp5,51 triliun atau 14,51% terhadap total kredit keseluruhan. Apabila dibandingkan dengan triwulan sama tahun sebelumnya pangsa pembiayaan sektor UKM cenderung mengalami sedikit penurunan yaitu semula 14,73% pada triwulan III/2005 turun menjadi 14,51% pada triwulan III/2006. Penurunan pangsa UMK tersebut disebabkan laju pertumbuhan kredit secara keseluruhan lebih cepat



dibandingkan laju pertumbuhan sektor UMK tersebut. Pangsa UMKM terhadap seluruh total kredit tercatat sebesar 43,92% atau Rp16,67 triliun. Dibandingkan dengan triwulan III tahun 2005 maka tampaknya sedikit mengalami penurunan yaitu semula sebesar 44,71% pada triwulan III/2005 turun menjadi 43,92% pada triwulan III/2006. Pangsa kredit mikro, kecil dan menengah serta besar secara grafik dapat dilihat pada grafik berikut;

**Grafik 3.5 Pangsa Kredit Menurut Golongan Kredit**



Selanjutnya perkembangan kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah secara detail dapat dilihat pada Tabel 3.7, sbb:

**Tabel 3.7 Perkembangan KUK dan UMKM Bank Umum (Nominal dlm Triliun Rp)**

UMK+M	2004	2005				2006			Growth 2006		
		T-I	T-II	T-III	T-IV	T-I	T-II	T-III	T-I	T-II	T-III
Mikro	0.52	0.51	0.52	0.57	0.57	0.59	0.55	0.58	16.30	6.06	1.64
Kecil	3.51	3.60	3.87	4.28	4.43	4.51	4.81	4.93	25.45	24.45	15.14
Total UMK	4.03	4.10	4.38	4.85	5.00	5.10	5.36	5.51	24.32	22.29	13.55
<b>% UMK</b>	<b>15.34</b>	<b>14.86</b>	<b>14.45</b>	<b>14.73</b>	<b>14.23</b>	<b>14.41</b>	<b>14.48</b>	<b>14.51</b>			
Menengah	7.93	8.45	9.18	9.87	10.45	10.60	11.19	11.16	25.50	21.96	13.06
Total UMKM	11.96	12.55	13.56	14.72	15.45	15.70	16.55	16.67	25.12	22.07	13.22
<b>% UMKM</b>	<b>45.55</b>	<b>45.48</b>	<b>44.7</b>	<b>44.71</b>	<b>43.97</b>	<b>44.39</b>	<b>44.74</b>	<b>43.92</b>			

Berdasarkan tabel tersebut maka secara keseluruhan sektor UMKM mengalami pertumbuhan sebesar 13,22%. Faktor dominan yang menyebabkan tumbuhnya sektor UMKM, tampaknya masih didominasi oleh sektor usaha

menengah. Sedangkan sektor usaha mikro dan kecil belum menunjukkan kinerja yang berarti.

### 3.1.1.6 Rasio Keuangan Bank Umum

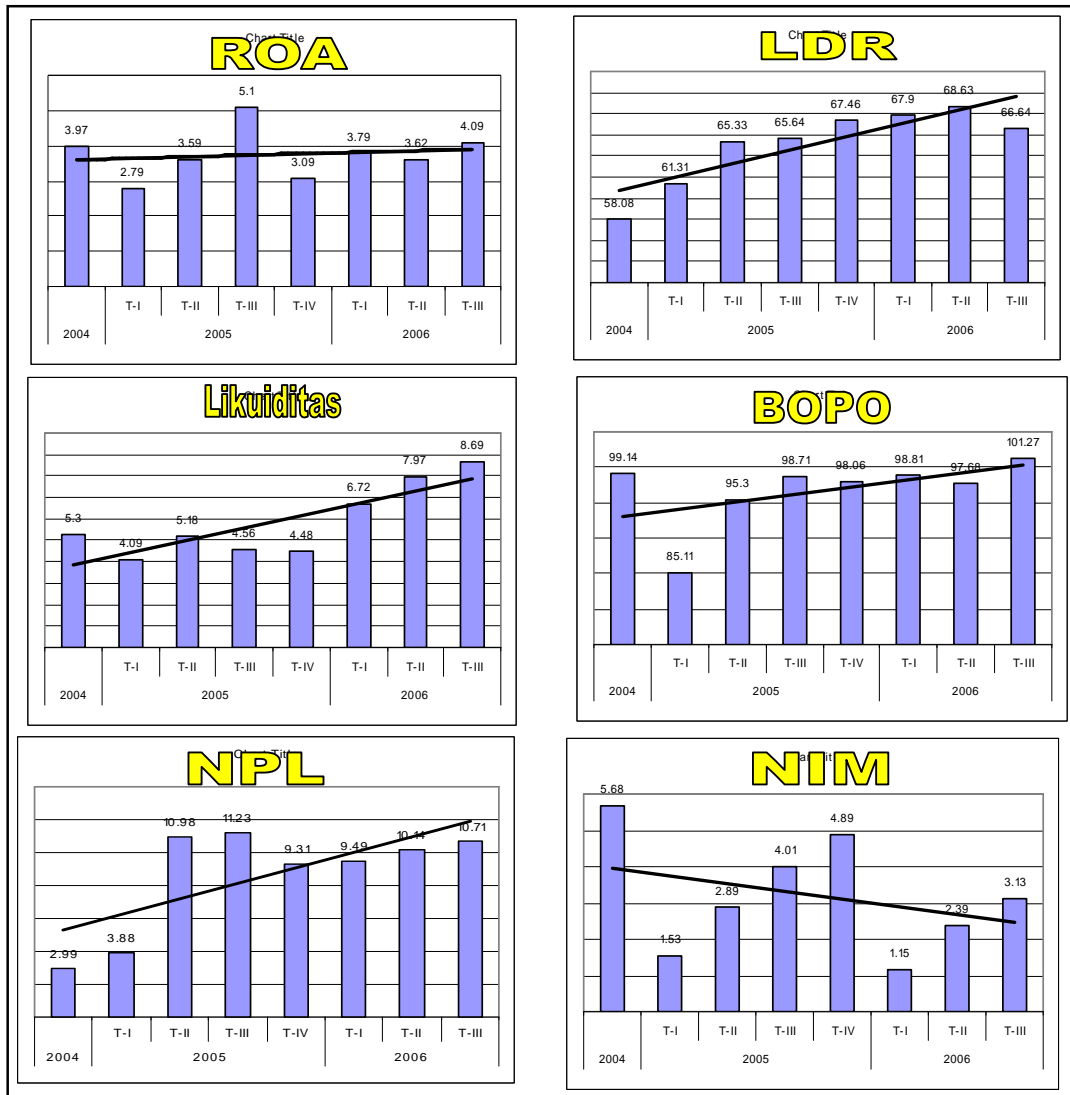
Pada umumnya perkembangan rasio keuangan bank umum sampai dengan triwulan III tahun 2006 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan kecuali perkembangan ROA, NIM dan BOPO. Pertumbuhan LDR mengalami peningkatan sebesar 1,52% yaitu semula 65,64% pada triwulan III/2005 meningkat menjadi 66,64% pada triwulan III/2006. Sejalan dengan itu rasio likuiditas juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu dari 4,56% pada triwulan III/2005 meningkat menjadi 8,69% pada triwulan III/2006. Begitu juga dengan rasio NPL tampaknya semakin membaik tercermin dari penurunan rasio NPL dari 11,23% pada triwulan III/2005 menjadi 10,71% pada triwulan III/2006. Perkembangan rasio keuangan bank umum dapat dilihat pada tabel 3.8, sbb:

**Tabel 3.8 Perkembangan Rasio Keuangan Bank Umum (Persentase)**

Rasio	2004	2005				2006			Growth 2006		
		T-I	T-II	T-III	T-IV	T-I	T-II	T-III	T-I	T-II	T-III
ROA	3.97	2.79	3.59	5.10	3.09	3.79	3.62	4.09	35.84	0.84	-19.80
LDR	58.08	61.31	65.33	65.64	67.46	67.90	68.63	66.64	10.75	5.05	1.52
Likuiditas	5.30	4.09	5.18	4.56	4.48	6.72	7.97	8.69	64.30	53.86	90.57
BOPO	99.14	85.11	95.30	98.71	98.06	98.81	97.68	101.27	16.10	2.50	2.59
NPL	2.99	3.88	10.98	11.23	9.31	9.49	10.14	10.71	144.59	-7.65	-4.63
NIM	5.68	1.53	2.89	4.01	4.89	1.15	2.39	3.13	-24.84	-17.30	-21.95

Perkembangan beberapa rasio keuangan perbankan diwilayah Sumut yaitu ROA LDR dan Likuiditas tampaknya cenderung kearah membaik, sementara kinerja rasio BOPO, NPL dan NIM cenderung kurang menggembirakan.

Grafik 3.6 Trend Rasio Keuangan



### 3.1.2 Perkembangan Bank Umum Syariah

Sampai dengan triwulan III tahun 2006, perkembangan indikator keuangan bank umum syariah yang tercermin dari pertumbuhan asset, kredit dan DPK cenderung menggembirakan kecuali kegiatan penghimpunan dana masyarakat mengalami penurunan. Asset perbankan syariah meningkat sebesar 8,41% yaitu semula sebesar Rp1,23 triliun pada triwulan III/2005 meningkat menjadi Rp1,33 triliun pada triwulan III/2006. Sejalan dengan itu pertumbuhan kredit juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 23,06% yaitu semula sebesar Rp1,22 triliun pada triwulan III/2005 meningkat menjadi Rp1,50 triliun pada triwulan III/2006. Sedangkan kegiatan penghimpunan dana mengalami sedikit penurunan sebesar 1,20% yaitu semula

sebesar Rp0,69 triliun pada triwulan III/2005 turun menjadi Rp0,68 triliun pada triwulan III/2006. Perkembangan perbankan syariah secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.9, sebagai berikut :

**Tabel 3.9 Perkembangan Indikator Utama Bank Umum Syariah  
(Triliun Rp)**

Indikator	2004	2005				2006			Pertumbuhan / y.o.y (%)		
		T-I	T-II	T-III	T-IV	T-I	T-II	T-III	T-I	T-II	T-III
Asset	0.97	1.05	1.09	1.23	1.22	1.15	1.26	1.33	9.33%	15.63%	8.41%
Kredit	1.00	1.07	1.14	1.22	1.24	1.23	1.43	1.50	15.23%	24.77%	23.06%
D P K	0.59	0.67	0.71	0.69	0.63	0.59	0.64	0.68	11.93%	-9.79%	-1.20%

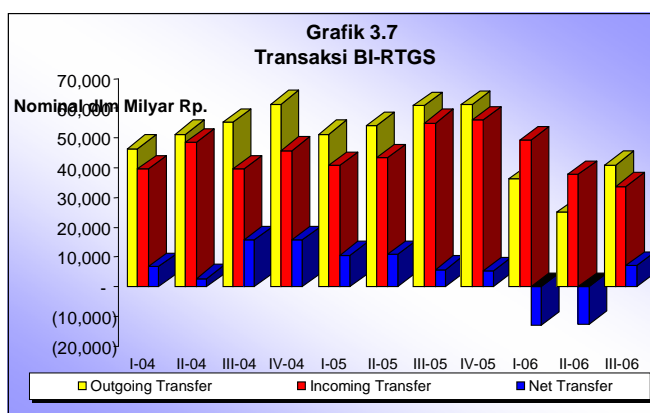
### 3.2 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

#### 3.2.1 Kegiatan Transaksi BI-RTGS Perbankan Sumatera Utara

Nilai transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) melalui perbankan yang ada di wilayah Sumatera Utara pada periode triwulan III tahun 2006 mencapai Rp.74.635 milyar atau turun sebesar 36% dibanding periode tahun sebelumnya yang mencapai Rp.115.938 milyar.

Transfer keluar (Outgoing Transfer) pada periode laporan tercatat sebesar Rp.40.806 milyar atau turun 32,94% dibanding periode tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.60.853 milyar. Transfer masuk (Incoming Transfer) pada periode laporan tercatat sebesar Rp.33.829 milyar atau turun 38,59% dibanding periode tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.55.085 milyar.

Namun dibanding periode triwulan sebelumnya, nilai transaksi Outgoing Transfer menunjukkan peningkatan (faktor musiman) sedangkan Incoming Transfer mengalami penurunan. Dengan adanya kenaikan Outgoing Transfer yang disertai dengan penurunan Incoming Transfer, maka pada periode laporan ini transaksi BI-RTGS KBI Medan menunjukkan transfer keluar bersih (Net-outgoing transfer) sebesar Rp.6.977 milyar setelah pada dua triwulan sebelumnya terjadi peningkatan aliran dana ke sistem perbankan Sumatera Utara.



Dilihat dari volume transaksi dibanding periode tahun sebelumnya, baik transaksi keluar dan transaksi masuk masing-masing mengalami penurunan sebesar 14.046 transaksi dan 1.825 transaksi atau masing-masing turun 0,23% dan 0,04%.

Tabel 3.10  
Perkembangan Transaksi RTGS

Nominal dlm Milyar Rp.

No.	Uraian	2005		2006			Growth (y-o-y)
		III	IV	I	II	III	III-05 to III-06
1	Volume Transaksi Outgoing	60,827	59,863	46,703	38,219	46,781	-23.09%
2	Nominal Transaksi Outgoing	60,853	61,160	36,266	24,981	40,806	-32.94%
3	Volume Transaksi Incoming	51,351	50,361	47,430	42,998	49,526	-3.55%
4	Nominal Transaksi Incoming	55,085	55,926	49,360	37,727	33,829	-38.59%
5	Volume Netflow	9,476	9,502	(727)	(4,779)	(2,745)	-128.97%
6	Nominal Netflow	5,768	5,234	(13,094)	(12,746)	6,977	20.96%
7	Rata-rata Volume Transaksi Outgoing/hari	1,031	1,015	792	648	793	-23.09%
8	Rata-rata Nominal Transaksi Outgoing/hari	1,031	1,037	615	423	692	-32.94%
9	Rata-rata Volume Transaksi Incoming/hari	870	854	804	729	839	-3.55%
10	Rata-rata Nominal Transaksi Incoming/hari	934	948	837	639	573	-38.59%

### 3.2.2. Perkembangan Kliring

Dalam mendukung terwujudnya sistem pembayaran nasional yang efisien, cepat, aman dan handal, Bank Indonesia terus meningkatkan efisiensi dan minimalisasi resiko sistem pembayaran guna mendukung kestabilan moneter maupun sistem keuangan. Upaya ini ditempuh antara lain melalui penerapan sistem kliring nasional dan mekanisme failure to settle (FtS). Hal ini sejalan dengan amanat UU Bank Indonesia No.23 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Bank Indonesia No.3 tahun 2004 dimana secara implicit menyatakan bahwa Bank Indonesia tidak diperbolehkan untuk menanggung resiko bank yang bersaldo negatif.

Penerapan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pertama kali dilaksanakan di wilayah kliring Jakarta pada tanggal 29 Juli 2005. Tahap kedua (Juli s/d. Desember 2005) pada Penyelenggara Kliring Lokal Non-BI di Wilayah

Jawa Barat. Selanjutnya direncanakan sampai dengan tahun 2007 seluruh Kantor Bank Indonesia (KBI) dan Penyelenggara Kliring Non-BI.

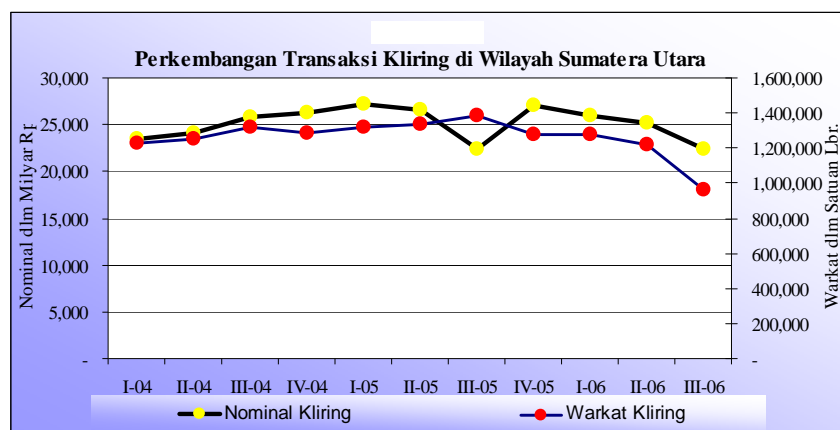
Implementasi SKNBI di Wilayah Kliring KBI Medan telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2006 dan di Wilayah Kliring KBI Sibolga pada tanggal 3 Juli 2006. Bertempat di KBI Medan pada tanggal 22 September 2006, Deputi Gubernur Bp. Maulana Ibrahim, telah meresmikan secara nasional Implementasi SKNBI di Wilayah Kliring Medan, Sibolga, Padang, Banjarmasin, Pontianak, Pekanbaru, Batam, Kendari, Ternate dan Palu.

Penerapan mekanisme FtS tersebut dimaksudkan untuk mengurangi resiko settlement yang terdapat pada sistem kliring. Resiko tersebut ada karena sistem kliring merupakan sistem yang bersifat multilateral netting atau penyelesaian transaksi dilakukan pada akhir hari dengan memperhitungkan hasil akhir posisi kewajiban tiap-tiap peserta kliring. Kondisi ini memungkinkan terjadinya kegagalan peserta dalam memenuhi kewajibannya, dimana resiko tersebut selama ini berada di Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring.

Dengan penerapan mekanisme FtS ini menuntut perbankan untuk mampu menjalankan pengelolaan likuiditasnya sehingga diharapkan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dalam jangka panjang.

Perkembangan transaksi kliring di wilayah Sumatera Utara pada triwulan III tahun 2006 menunjukkan penurunan baik dari jumlah warkat maupun nominal kliring.

### Grafik 3.8 Perkembangan Transaksi Kliring di Wilayah Sumatera Utara

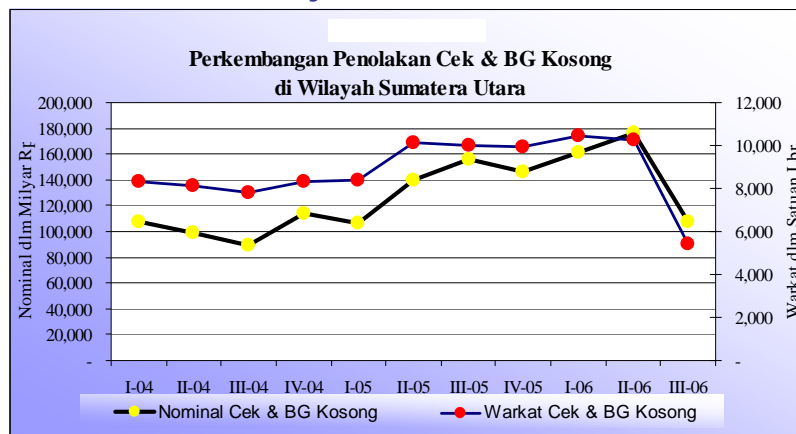


Jumlah warkat kliring pada periode laporan tercatat sebesar 958.115 lembar, turun sebesar 30,83%, bila dibanding dengan periode tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,384.592 lembar. Dari sisi jumlah nominal

warkat pada periode laporan tercatat sebesar Rp.22.325 milyar, turun sebesar 0,09% bila dibanding dengan periode tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.22.346 milyar.

Sementara itu, jumlah nominal penolakan Cek dan Bilyet Giro Kosong di wilayah Sumatera Utara pada periode laporan mengalami penurunan yang cukup signifikan baik dari jumlah lembar warkat maupun jumlah nominal warkat penolakan Cek & BG Kosong. Jumlah warkat pada periode laporan turun sebesar 45,68% atau dari 9.945 lembar warkat pada periode triwulan III tahun 2005 menjadi 5.416 lembar warkat Cek & BG Kosong pada periode laporan. Jumlah nominal warkat Cek & BG Kosong pada periode laporan juga turun sebesar 31,41%, dimana pada triwulan III tahun 2005 tercatat sebesar Rp.156 milyar, menjadi Rp.107 milyar pada periode laporan.

**Grafik 3.9 Perkembangan Penolakan Cek & BG Kosong di Wilayah Sumatera Utara**



Penurunan jumlah penolakan Cek & BG Kosong ini dipengaruhi oleh menurunnya jumlah warkat yang melalui proses kliring seiring dengan diimplementasikannya BI-RTGS dan pembinaan yang dilakukan oleh KBI Medan, dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petugas kliring di wilayah Sumatera Utara terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan operasional kliring pada umumnya dan ketentuan yang mengatur penatausahaan Cek & BG Kosong. Langkah pembinaan yang dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi bagi petugas bank dan masyarakat pengguna jasa kliring perbankan di wilayah Sumatera Utara.



**Tabel 3.11**  
**Perkembangan Transaksi Kliring dan Cek/BG Kosong**

Nominal dlm Milyar Rp.

No	Uraian	2005		2006			Growth (q to q)
		III	IV	I	II	III	III-05 to III-06
1	Warkat Kliring	1,385	1,277	1,273	1,221	958	<b>-30.83%</b>
2	Nominal Kliring	22,346	27,040	26,007	25,164	22,325	<b>-0.09%</b>
3	Warkat Retur	15,163	15,104	16,941	15,855	12,833	<b>-15.37%</b>
4	Nominal Kliring Retur	242	243	277	273	187	<b>-22.73%</b>
5	Cek & BG Kosong	9,970	9,945	10,437	10,242	5,416	<b>-45.68%</b>
6	Nominal Cek & BG Kosong	156	147	162	176	107	<b>-31.41%</b>
7	Ratio Warkat Cek & BG Kosong thdp Warkat Kliring	0.72	0.78	0.82	0.84	0.57	<b>-20.83%</b>
8	Ratio Nominal Cek & BG Kosong thdp Nominal Kliring	0.70	0.54	0.62	0.70	0.48	<b>-31.35%</b>
9	Rata-rata Warkat Kliring/hari	21,634	22,018	20,874	20,689	15,208	<b>-29.70%</b>
10	Rata-rata Nominal Kliring/hari	349,163	466,211	426,338	426,514	354,360	<b>1.49%</b>
11	Rata-rata Cek & BG Kosong/hari	156	171	171	174	86	<b>-44.87%</b>
12	Rata-rata Nominal Cek & BG Kosong/hari	2	3	3	3	2	<b>-30.32%</b>

Nb. – Jumlah warkat dalam ribuan lembar.

- Kliring di wilayah Sumatera Utara meliputi 8 (delapan) Penyelenggara Kliring Lokal.  
al.: Kliring Lokal Medan, Tebing Tinggi, Kabanjahe, Pematang Siantar, Kisaran, R. Prapat  
Padang Sidempuan, Sibolga.

### **3.2.3. Perkembangan Inflow dan Outflow Perkasan di Wilayah Sumut**

Kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal untuk bertransaksi pada triwulan III tahun 2006 menunjukkan peningkatan, sejalan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian yang mengalami pertumbuhan dibanding triwulan sebelumnya. Peningkatan kebutuhan uang kartal di wilayah Sumatera Utara diindikasikan oleh aliran uang masuk bersih (Net-Inflow) ke KBI Medan, yang pada periode laporan tercatat sebesar Rp.189 milyar dibanding periode sebelumnya yang mencatat Outflow sebesar Rp.292 milyar.

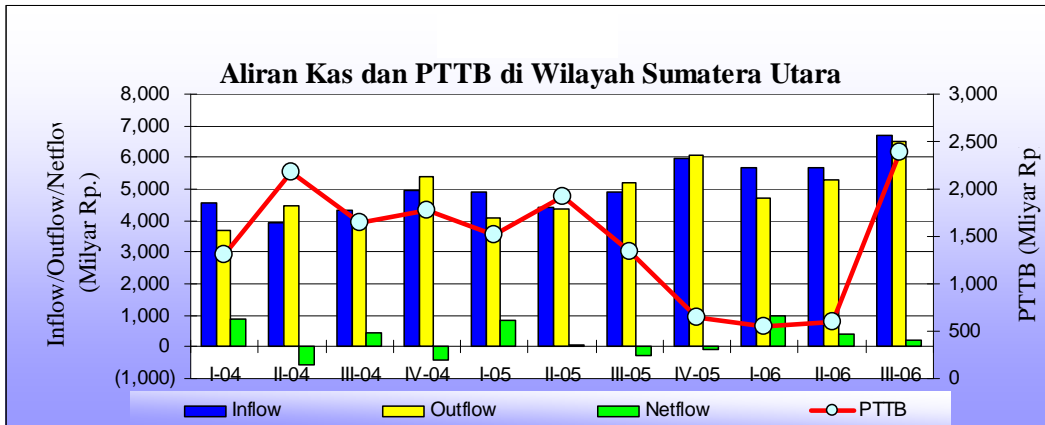
**Tabel 3.12**  
**Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai di wilayah Sumatera Utara**  
**Nominal dlm Milyar Rp.**

No	Uraian	2004	2005				2006			Growth (q to q) III-05 to III-06
			I	II	III	IV	I	II	III	
1	Posisi Kas	33,045	8,71 8	7,23 6	6,30 4	4,25 9	7,02 2	8,20 4	6,81 0	8.03%
2	Inflow	17,782	4,90 3	4,41 8	4,89 1	5,96 8	5,69 3	5,66 6	6,67 6	36.50%
3	Rata-rata Inflow/hari	74	83	71	76	103	93	96	106	38.66%
4	Outflow	17,445	4,05 7	4,36 6	5,18 4	6,06 2	4,71 5	5,27 7	6,48 7	25.14%
5	Rata-rata Outflow/hari	72	69	70	81	105	77	89	103	27.12%
6	Netflow (2-4)	337	847	52	(292 )	(94)	978	389	189	- 164.73 %
7	PTTB	6,922	1,51 1	1,92 4	1,33 1	646	545	597	2,39 4	79.89%
8	% PTTB thdp Inflow	39%	31%	44%	27%	11%	10%	11%	36%	

Pada triwulan III tahun 2006, aliran uang kartal yang masuk (Inflow) ke KBI Medan mencapai Rp.6.676 milyar atau mengalami pertumbuhan sebesar 36,50% dibanding periode tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.4.891 milyar. Sementara itu aliran uang kartal yang keluar (Outflow) ke KBI Medan mencapai Rp.6.487 milyar atau mengalami pertumbuhan sebesar 25,14% dibanding periode tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.5.184 milyar.

Posisi kas pada periode laporan meningkat sebesar 8,03% bila dibanding periode tahun sebelumnya atau dari Rp.6.304 milyar pada triwulan III tahun 2005 menjadi Rp.6.810 milyar pada periode triwulan III tahun 2006.

### Grafik 3.10 Perkembangan Aliran Kas & PTTB di Wilayah Sumatera Utara



#### 3.2.4. Temuan Uang Palsu

Selama periode triwulan III tahun 2006, jumlah uang palsu yang dilaporkan ke KBI Medan baik yang berasal dari laporan bank, masyarakat maupun polisi mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya, yaitu dari 49 bilyet dengan nilai nominal sebesar Rp.2.555.000,- menjadi 68 bilyet dengan nilai total nominal sebesar Rp.3.270.000,- atau naik 28%.

Tabel 3.13  
Perkembangan Temuan Uang Palsu Yang Dilaporkan

Nominal dlm ribuan Rp.

JENIS PECAHAN	TAHUN 2004				TAHUN 2005				TAHUN 2006		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Rp.100rb	18	27	5	4	18	17	17	50	21	17	21
Rp.50rb	1	2	1	2	10	10	13	19	4	8	10
Rp.20rb	0	0	2	0	1	0	2	6	1	22	30
Rp.10rb	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	7
Rp.5rb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Lembar	19	29	8	6	29	27	32	77	26	49	68
Nominal	1,850	2,800	590	500	2,320	2,200	2,390	6,090	2,320	2,555	3,270

Dilihat dari denominasi, temuan uang palsu didominasi oleh pecahan Rp.100.000,- dan Rp.20.000,-. Sementara itu dari KBI Sibolga tidak ditemukan adanya uang palsu pada periode laporan.

Seiring dengan terjadinya peningkatan temuan uang palsu, KBI Medan tetap berupaya untuk melakukan upaya penanggulangan beredarnya uang palsu di wilayah Sumatera Utara, baik preventif maupun represif. Langkah

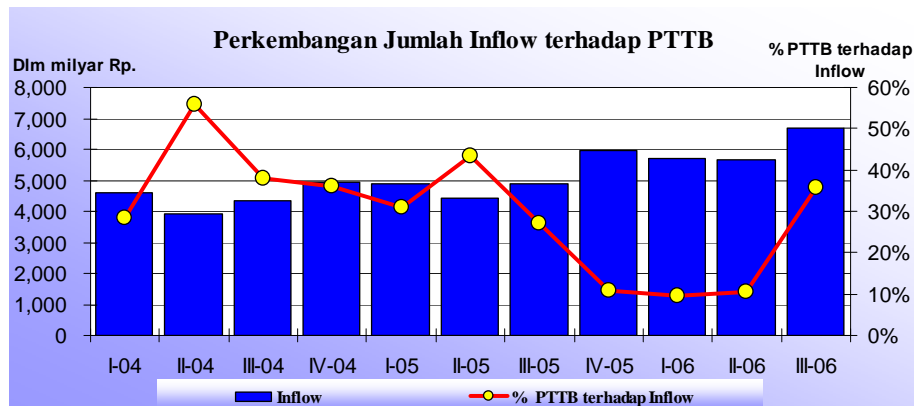
preventif dimaksud antara lain meningkatkan pemahaman masyarakat dengan melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah kepada kalangan pelajar, mahasiswa, akademisi, masyarakat, pelaku usaha, pegawai negeri, kepolisian serta penyebaran informasi kepada perbankan di wilayah Sumatera Utara.

Upaya represif yang dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian di Sumatera Utara dan dengan instansi terkait lainnya seperti pengadilan dan kejaksaan.

### 3.2.5. Penyediaan Uang Yang Layak Edar

Sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk mencetak dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang kartal baik dari jumlah maupun kualitas. Untuk menjaga kelayakan uang yang diedarkan, Bank Indonesia secara periodik dan berkesinambungan melakukan penyortiran dan peracikan menggunakan Mesin Sortir Uang Kertas (MSUK) dan Mesin Racik Uang Kertas (MRUK). Uang yang termasuk dalam kategori tidak layak edar (lusuh/rusak) dan uang dengan emisi yang telah ditarik dari peredaran dicatat sebagai Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat akan jenis dan pecahan uang kartal.

**Grafik 3.11 Perkembangan Jumlah Inflow terhadap PTTB**



Jumlah PTTB terhadap uang yang tidak layak edar dan uang dengan emisi yang telah ditarik dari peredaran pada periode triwulan III tahun 2006 naik 301% dibanding periode triwulan sebelumnya yaitu dari sebesar Rp.597 milyar menjadi sebesar Rp.2.394 milyar atau 35,86% dari jumlah uang kartal yang masuk (Inflow) pada periode laporan yaitu sebesar Rp.6.676 milyar.

### **3.2.6. Transaksi Jual Beli UKA dan TC Pada PVA Non Bank**

Pedagang Valuta Asing (PVA) bukan bank adalah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang pemberian izin usaha, pengawasan dan pembinaannya dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai PBI No.6/1/PBI/2004 tanggal 6 Januari 2004 tentang Pedagang Valuta Asing dan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/13/DPM tanggal 11 Maret 2004 tentang Tata cara perizinan, penerapan prinsip mengenal nasabah, pengawasan, pelaporan dan pengenaan sanksi bagi pedagang valuta asing bukan bank. Maksud dan tujuan usaha PVA adalah melakukan kegiatan usaha jual beli Uang Kertas Asing (UKA) dan Pembelian Traveller's Cheque (TC).

Perkembangan transaksi PVA di Sumatera Utara sampai dengan periode triwulan II tahun 2006 mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, baik dalam jumlah PVA maupun jumlah transaksi. Jumlah PVA hingga periode triwulan II tahun 2006 sebanyak 40 PVA, naik 8,11% dibanding periode tahun lalu yang hanya tercatat sebanyak 37 PVA, dengan daerah lokasi usaha di Kota Medan, Tanjung Balai dan Pematang Siantar.

Transaksi penjualan dan pembelian UKA dan TC (y-o-y) melalui Pedagang Valuta Asing (PVA) Non Bank di wilayah Sumatera Utara pada periode triwulan II tahun 2006 tercatat sebesar 18.846 USD atau meningkat 14% dibanding periode tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 16.537 USD.

Jumlah Pembelian UKA dan TC pada triwulan II sebesar US\$ 9.451 ribu, naik 14,74% dibanding periode tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US\$ 8.237 ribu. Sementara jumlah Penjualan UKA dan TC pada triwulan II sebesar US\$ 9.395 ribu, naik 13,19% dimana pada periode tahun sebelumnya tercatat sebesar US\$ 8.300.

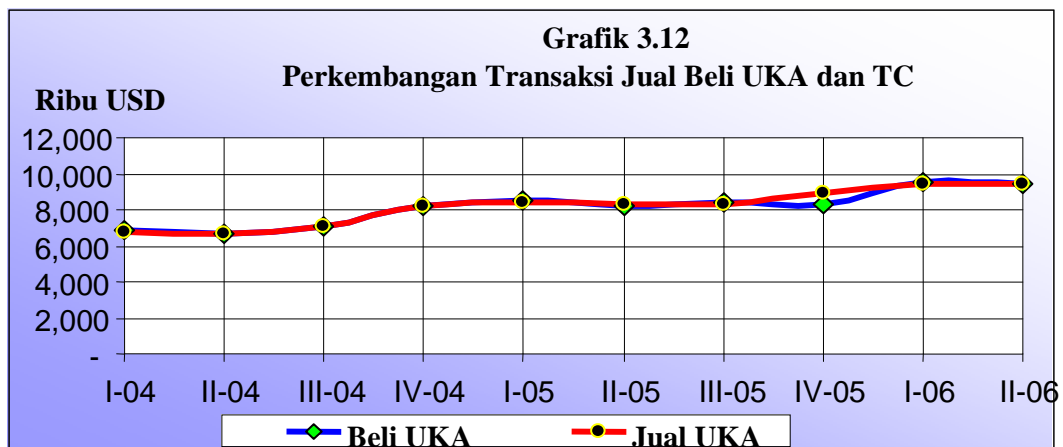
Meningkatnya jumlah transaksi PVA ini, dipengaruhi oleh semakin dinamis dan berkembangnya transaksi perdagangan dan perekonomian di Kota Medan sekitarnya, biaya berobat/medis ke luar negeri (Penang dan Singapura), transaksi keuangan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan pariwisata.

Tabel 3.14  
Perkembangan Transaksi Jual Beli UKA dan TC

Nominal (000 US \$)

No.	Uraian	2004	2005				2006		Growth (y-o-y)
			I	II	III	IV	I	II	II-05 to II-06
1	Pembelian	28,886	8,478	8,237	8,375	8,349	9,550	9,451	14.74%
2	Penjualan	28,859	8,360	8,300	8,307	8,949	9,388	9,395	13.19%
3	Jumlah KP	32	33	37	39	39	39	40	8.11%

Dari data statistik tercermin bahwa transaksi jual beli UKA masih merupakan produk utama dari PVA (lebih dominan), sedang volume pembelian/pencairan TC masih relatif kecil. Jenis UKA yang dominan dalam transaksi jual dan beli masih didominasi oleh mata uang US Dollar (USD), Malaysia Ringgit (MYR) dan Singapura Dollar (SGD).



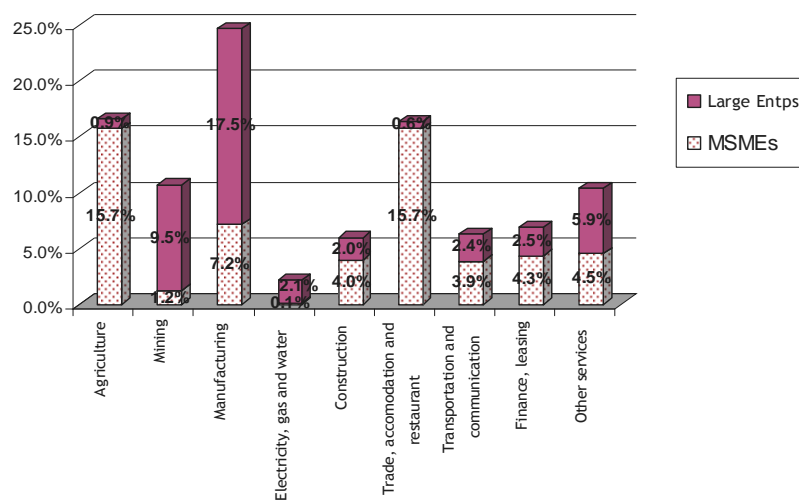
## **BOKS - 9**

# **AGENDA PENGEMBANGAN UMKM DI SUMUT**

### **Pengertian**

Pengusaha mikro dan kecil di Sumatera Utara mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengatasi angka kemiskinan dan pengangguran di daerah. Hal ini dikarenakan pelaku usaha mikro dan kecil di Sumatera Utara jumlahnya cukup besar dan memiliki daya serap tenaga kerja yang cukup signifikan. Namun demikian dibalik peranannya yang cukup strategis tersebut, terdapat kesenjangan pendapatan yang cukup besar antara pengusaha mikro dan kecil dengan pengusaha skala besar. Berdasarkan data BPS, jumlah pengusaha besar hanya 0,2% jika dibandingkan dengan jumlah pengusaha mikro kecil dan menengah sejumlah 99,8%. Sedangkan dari sisi kontribusinya, pengusaha mikro kecil dan menengah memberikan kontribusi sebesar 16,4% terhadap total pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini berarti, walaupun secara mayoritas jumlahnya cukup besar namun dari sisi kualitas peranannya masih jauh dari apa yang diharapkan. Begitu pula dari sisi pemasaran, pengusaha mikro dan kecil hanya memiliki pangsa pasar yang relatif kecil yaitu sebesar 20%. Artinya posisi daya saing pengusaha mikro dan kecil masih sangat lemah jika dibandingkan dengan pengusaha besar, padahal jenis usaha ini merupakan tulang punggung ekonomi bagi rakyat kecil dalam mengatasi angka pengangguran dan kemiskinan.

**Tabel 1. Persentase Pengusaha Kecil per Sektor Ekonomi**



Sumber: Bank Indonesia

Sebagian besar kemakmuran tersebut hanya dinikmati oleh 0,2% pengusaha besar. Dapat dibayangkan, betapa besarnya angka kesenjangan sosial antara

yang kaya dengan yang miskin. Program pemerataan hasil-hasil pembangunan belumlah mencapai sasaran yang diharapkan. Oleh karena itu keberadaan pelaku usaha mikro dan kecil di Sumatera Utara perlu mendapat perhatian khusus baik oleh pemerintah daerah, Departemen, non Departemen, BUMN, Perbankan, Dinas-Dinas dan berbagai stakeholders terkait lainnya. Menurut Pimpinan Bank Indonesia Medan, mereka adalah saudara kita yang terbiarkan dan terzolimi. Oleh karena itu upaya yang serius untuk mengangkat keberadaan pengusaha ini harus segera dilakukan. Dalam hal ini, Bank Indonesia Medan, dibawah komando dari Bpk Romeo Rissal telah mencanangkan program untuk "Lebih Bersungguh Dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)".

### **Persoalan Utama**

Walaupun secara kuantitas, jumlah pelaku UMK cenderung meningkat, namun dari sisi kualitasnya masih jauh dari yang diharapkan. Walaupun usaha mikro dan kecil ini memiliki peranan sebagai tulang punggung ekonomi yang dielu-elukan, namun kenyataannya kurang nutrisi (*calcium*). Bahkan kondisinya sudah mulai dirusak oleh bunga tinggi. Walaupun kredit perbankan konvensional untuk UMK yang cukup tinggi, namun belum berdampak signifikan terhadap pengembangan usaha rakyat bahkan sebagian bersifat konsumtif dan tidak didukung dengan sistem pengembangan usaha rakyat.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini dirasa kurang berhasil dalam mendukung keberadaan jenis pengusaha ini. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program tersebut. Banyak pihak yang telah berupaya untuk mengangkat keberadaan UMK seperti dinas-dinas, departemen maupun BUMN namun upaya tersebut hanyalah dilakukan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi yang baik antara mereka sehingga hasilnya juga belum optimal bahkan bisa merusak. Banyak dari kredit yang disalurkan tersebut menjadi macet. Bahkan telah berkembang paradigma di masyarakat bahwa kredit yang mereka terima dari Badan atau lembaga non bank tersebut merupakan program bantuan dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan.

Pelaku usaha mikro dan kecil di Sumatera Utara mayoritas memiliki kualitas sumber daya yang relatif rendah akibat minimnya tingkat pendidikan. Minimnya tingkat pendidikan juga mengakibatkan sebagian besar aktivitas operasional usahanya tidak didukung dengan administrasi dan laporan keuangan yang memadai. Berdasarkan data dari dinas koperasi, jumlah pengusaha mikro dan kecil yang memiliki laporan keuangan hanya sebanyak 28,81%.



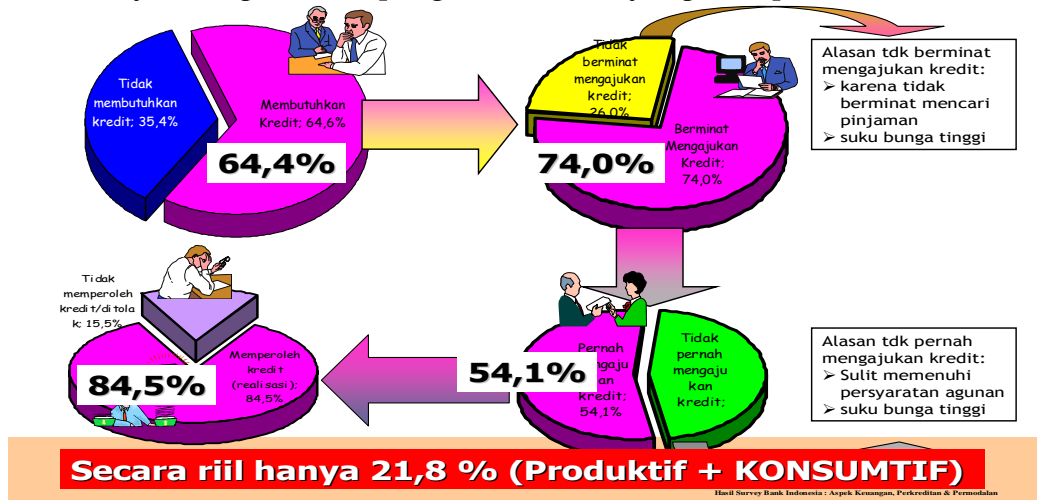
Disamping itu, tingkat pemanfaatan teknologinya juga masih sangat rendah sehingga menyulitkan pelaku UMK dalam melakukan pengembangan produk (*product development*). Kurangnya penguasaan teknologi dalam proses produksinya pada akhirnya juga mengakibatkan kualitas produk yang dihasilkan masih relatif rendah sehingga daya jualnya di pasaran kurang memiliki daya saing.

Begitu juga dari sisi pemasaran, mayoritas dari mereka belum memiliki strategi pemasaran yang dapat diandalkan. Kemampuan mereka untuk melakukan terobosan pasar apalagi penciptaan pasar baru bisa dibilang sangat lemah. Begitu pula dengan peran pemerintah daerah dalam upaya mendorong pemasaran produk-produk dari pengusaha mikro dan kecil di Sumatera Utara dirasa masih sangat kurang. Peran pemerintah daerah untuk secara kreatif memberikan insentif bagi pengusaha ini untuk mendorong upaya pemasarannya dirasa masih sangat minim. Misalnya dengan penciptaan pasar baru yang bersifat unik dan spesifik antara lain pengadaan pasar pagi, pasar malam, pasar festival, pasar mingguan atau jenis pasar musiman lainnya yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Pengusaha UMK juga memiliki kendala dalam hal permodalan akibat rendahnya akses terhadap dunia perbankan. Mayoritas pengusaha UMK tidak *bankable* (tidak memenuhi syarat memperoleh kredit). Sebagian mereka merupakan pengusaha pemula tanpa pengalaman bahkan tanpa pembukuan dan adm usaha yang jelas. Mereka juga tidak memiliki konsep usaha yang jelas akibat kurangnya pengetahuan mereka tentang ilmu manajemen sehingga sebagian mereka menjalankan usahanya tanpa didukung oleh adanya visi dan misi yang jelas. Disamping itu keterbatasan mereka dalam memperoleh kredit perbankan juga disebabkan oleh adanya permasalahan jaminan kredit (*collateral*).

# Grafik 1. Pemetaan Pembiayaan Perbankan Terhadap Pengusaha Mikro

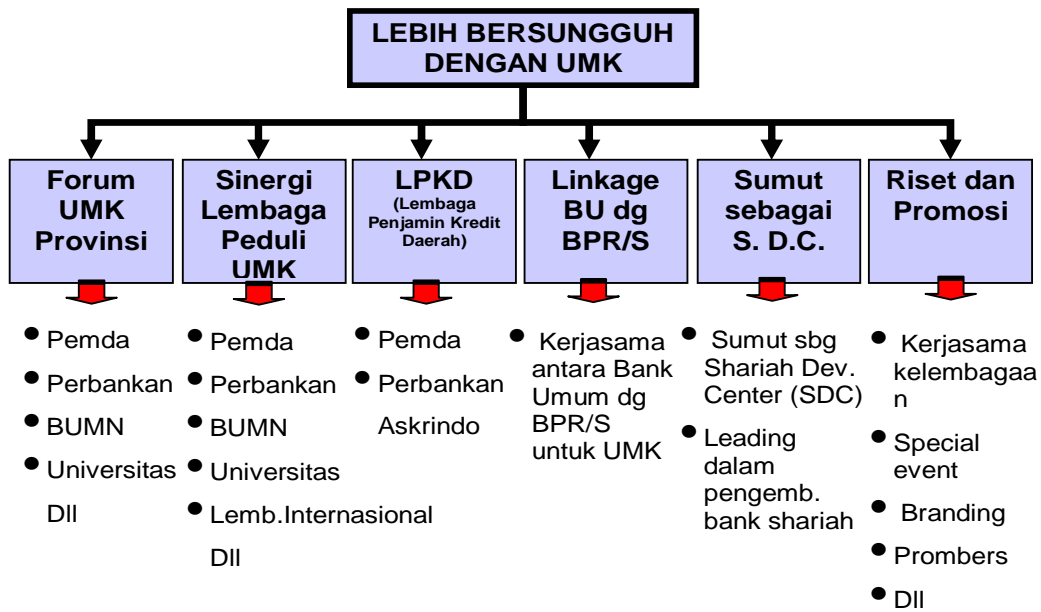
Hanya sebagian kecil pengusaha mikro yang memperoleh kredit



Sumber : Hasil Survey Bank Indonesia

## ARAH KEBIJAKAN.

Dalam rangka pengembangan daya saing UMK, Bank Indonesia Medan telah merumuskan beberapa kerangka strategis yang dituangkan ke dalam 6 (enam) pilar dengan motto "Lebih Bersungguh Dengan UMK."



Ke 6 (enam) pilar tersebut antara lain adalah:

1. Pembentukan forum UMK Provinsi; pembentukan forum tersebut bertujuan untuk memperluas wawasan pelaku UMK dan pihak terkait lainnya dalam kerangka pengembangan daya saingnya dimasa datang. Peningkatan wawasan tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari pelaku UMK itu sendiri tapi juga bertujuan untuk mendorong tumbuhnya pelaku wirausaha yang baru. Pada pilar pertama ini juga akan diupayakan agar lingkungan berusaha dikalangan pelaku UMK dapat lebih baik dengan jalan melakukan penyederhanaan dalam prosedur perijinan.
2. Mensinergikan Lembaga yang peduli UMK; hal ini dilakukan dengan jalan Mengefektifkan proses dan prosedur koordinasi pada tingkat provinsi terhadap penyaluran dana dan bantuan teknis kepada UMK. Disamping itu juga akan diupayakan untuk meningkatkan kerja sama yang sinergis antar lembaga dan instansi terkait dalam penyediaan dana murah bagi pengembangan UMK
3. Pada pilar yang ketiga, Bank Indonesia Medan akan berupaya agar akses pelaku UMK terhadap kredit perbankan dapat meningkat. Langkah kongkrit ke arah tersebut adalah dengan mendorong pembentukan LPKD di seluruh Pemkab dan Pemko di Sumut dan mendorong pemberian kredit kepada UMK melalui mekanisme LPKD.
4. Untuk menstimulus pihak perbankan dalam menyalurkan kreditnya kepada pelaku UMK maka sebagai pilar ke empat Bank Indonesia Medan akan membentuk jaringan kerjasama (*linkage*) antara BPR dengan bank umum.
5. Pada pilar ke lima akan dicanangkan "*Sumut sebagai Shariah Development Centre (SDC)*"
6. Sebagai pilar terakhir, untuk menopang jalannya ke lima pilar tersebut maka pada pilar ke enam akan dilakukan aktivitas riset dan promosi. Kegiatan riset dan promosi tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus agar ke lima pilar sebelumnya dapat berjalan secara berkesinambungan.

## **BOKS - 10**

# **PERKEMBANGAN PERBANKAN SHARIAH DI SUMATERA UTARA**

### **LATAR BELAKANG**

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu refleksi adanya kebutuhan masyarakat akan sistem perbankan yang dapat memenuhi tuntutan sektor riil dan dunia usaha dalam mendukung aktivitas keuangan dan pembiayaan lainnya. Sebagaimana kita ketahui, tingginya suku bunga perbankan telah membawa dampak buruk bagi perkembangan sektor riil. Dengan sistem perbankan syariah, kendala suku bunga tinggi tersebut dapat diatasi, dan sektor riil dapat segera kembali meningkatkan aktivitas usahanya. Karena pada prinsipnya aktivitas perbankan syariah tersebut lebih menitik beratkan penyaluran dananya berdasarkan prinsip bagi hasil. Salah satu perbedaan mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah dalam hal bantuan teknis dan manajemen usaha nasabahnya. Bank syariah dengan prinsip bagi hasil tersebut sangat peduli pada kelancaran usaha nasabahnya. Oleh karena itu, kelompok bank ini tidak hanya memberikan bantuan modal sebagai tujuan utamanya, tetapi juga turut memberikan bantuan teknis dan hal-hal lainnya yang terkait dengan manajemen sehingga kelancaran jalannya usaha nasabah dapat lebih terjamin.

Dasar hukum operasional perbankan syariah adalah melalui UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dalam UU No.10 tahun 1998, serta UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Namun pada prakteknya, sistem perbankan syariah tersebut telah ada jauh sebelum pemerintah mengukuhkan dasar hukumnya. Sejak dikukuhkan tersebut, jumlahnya berkembang sangat pesat dengan rata-rata pertumbuhan asset sekitar 74% pertahun sepanjang kurun waktu 1998 sampai dengan 2001 dengan nominal Rp 479 milyar di tahun 1998 menjadi 2.718 milyar di tahun 2001. Keberadaan perbankan syariah semakin diperkokoh dengan adanya "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia" yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada bulan September 2002. Cetak biru tersebut diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dimasa yang akan datang. Adapun visi dari kegiatan pengembangan perbankan syariah yang tertuang dalam cetak biru tersebut adalah "Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat".

**Tabel 1. Perkembangan Jumlah Kantor Bank Syariah**

Tahun	Bulan	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembant	Kantor Kas	Kas Mobil	Payment Point	ATM
2001	Des	3	0	2	1	2	1
2002	Des	4	1	3	0	2	1
2003	Des	5	3	7	0	4	4
2004	Des	11	4	8	0	7	4
2005	Des	12	9	8	0	5	7
2006	Jul	14	9	8	0	7	8

Sumber: Bank Indonesia

Sementara itu, di Sumatera Utara perbankan syariah secara kelembagaan mencatat perkembangan yang cukup baik. Jumlah kantor cabang dan kantor cabang pembantu perbankan syariah sampai dengan Juli 2006 tercatat sebanyak 23 kantor atau naik tajam jika dibandingkan dengan Desember 2001 yang hanya sebanyak 3 kantor. Namun angka ini jauh lebih kecil atau belum sebanding dengan jumlah bank konvensional yang pada bulan Juli 2006 tercatat sebanyak 447. Total Aset perbankan syariah per Juli 2006 tercatat sebesar Rp 1,30 triliun, atau hanya sebesar 1.99% dari total aset bank konvensional yang tercatat sebesar Rp 65,42 triliun. Kondisi ini disatu sisi menunjukkan bahwa perkembangan bank syariah di Sumatera Utara masih sangat lambat. Namun disisi lain, hal ini dapat merupakan refleksi adanya peluang yang sangat besar bagi pengembangan perbankan syariah di Sumatera Utara. Dengan berbagai upaya pengembangan yang proaktif, pangsa pasar yang masih demikian kecil diharapkan dapat semakin berkembang di masa yang akan datang.

Jumlah dan kapasitas personel perbankan syariah yang masih sangat terbatas merupakan kendala utama yang dihadapi oleh perbankan ini.. Kelangkaan informasi (*lack of information*) mengenai fungsi dan keberadaan perbankan syariah di masyarakat merupakan kendala utama yang dihadapi. Oleh karena itu, upaya yang proaktif dari petugas bank syariah dan *stakeholder* lainnya dalam memasyarakatkan keberadaan perbankan syariah tersebut sangat diharapkan.

## **ANALISIS**

Secara umum *demand* terhadap perbankan syariah tergolong cukup prospektif.. Hal ini terlihat dari tingkat espansinya yang cukup tinggi. Kondisi moneter dan kebijakan perbankan yang kondusif turut mendukung perkembangannya hal ini tercermin dari pertumbuhan yang signifikan pada sejumlah indikator seperti jumlah bank, jaringan kantor, dana pihak ketiga, dan pembiayaan yang diberikan. Rincian perkembangannya dipaparkan pada bagian berikutnya.

## ASPEK KEUANGAN

Kebijakan *office channelling* terbukti telah membawa dampak yang cukup besar bagi perkembangan perbankan syariah baik dari sisi volume usaha maupun dari jumlah jaringan kantornya yang terus meningkat drastis. Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan rekening haji juga telah memberikan kontribusi positif dan menjadi akseleratif bagi peningkatan kinerja perbankan syariah. Begitu pula dengan program jaminan pemerintah untuk pembiayaan usaha sektor pertanian dengan pola syariah, serta hadirnya investor baru untuk memperkuat permodalan maupun pendirian bank baru semakin memperkokoh kondisi perbankan syariah.

**Tabel 2. Perkembangan Usaha Perbankan Syariah  
Di Sumatera Utara periode 2001 – 2006 (juta rupiah)**

Tahun	Bulan	ASSET	Pembiayaan	DPK	LABA/RUGI
2001	Des	193.408	104.841	184.056	3.259
2002	Des	12.928	109.893	117.150	4.590
2003	Des	314.966	282.096	285.412	12.749
2004	Des	967.416	1.001.726	586.185	37.783
2005	Des	1.220.866	1.241.717	631.093	54.981
2006	Jul	1.295.032	1.462.820	646.706	45.072

Sumber : Bank Indonesia

Dalam pada itu, di Sumatera Utara , total aset perbankan syariah dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah menunjukkan perkembangan. Total aset perbankan syariah pada bulan Juli 2006 tercatat sebesar Rp 1.295.032 juta atau telah naik tajam jika dibandingkan dengan posisi Desember 2001 yang hanya sebesar Rp 193.408 juta.

Perbankan syariah di Sumatera Utara menggunakan strategi pengembangan usaha dengan jalan menyalurkan pembiayaan yang lebih diprioritaskan untuk usaha kecil dan menengah (*retail banking*) yang kondisi usaha dinilai cukup prospektif. Disamping itu, sesuai dengan misinya dalam program pengentasan kemiskinan dan mengangkat keberadaan rakyat kecil, bank syariah di Sumatera Utara juga memprioritaskan program pembiayaannya untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi rakyat. Sampai dengan pertengahan tahun 2006, pembiayaan yang disalurkan telah meningkat tajam dari Rp 104.841 juta per Desember 2001 menjadi Rp 1.462.820 juta per Juli 2006. Cukup pesatnya perkembangan kegiatan pembiayaan tersebut mengakibatkan profitabilitasnya juga naik tajam dan mencatat keuntungan sebesar Rp 45.072 juta per Juli 2006 atau naik tajam jika dibandingkan posisi laba per Desember 2001 yang hanya sebesar Rp 3.259 juta. Dilihat dari non performing loan juga

menunjukkan masih relative rendahnya angka NPL perbankan Syariah yaitu masih dibawah 5%.

**Tabel 3. Perkembangan Rasio Perbankan di Sumatera Utara periode 2001 - 2006**

Tahun	Bulan	ROA	LDR	Likwiditas	BOPO	NIM	KAP	NPL	
								Gross	Neto
2001	12	1.69%	56.96%	5.08%	78.91%	0.06%	1.49%	0.94%	0.92%
2002	12	3.55%	93.81%	5.62%	76.93%	0.05%	0.12%	0.09%	0.08%
2003	12	4.05%	98.84%	3.75%	71.44%	0.09%	0.02%	0.03%	0.03%
2004	12	3.91%	170.89%	2.93%	53.66%	0.25%	0.75%	0.38%	0.37%
2005	12	4.50%	196.76%	3.84%	66.88%	0.27%	3.43%	3.52%	3.09%
2006	7	3.48%	226.20%	4.92%	59.49%	0.16%	4.54%	4.75%	4.18%

Sumber : Bank Indonesia

### ASPEK PERSONEL

Walaupun dari sisi kinerja keuangannya yang cenderung semakin membaik, namun jika dilihat dari aspek personelnya, masih terlihat bahwa kualitas sumber daya manusianya masih harus ditingkatkan, begitu juga dari sisi kuantitasnya. Hal ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia bank syariah dimasa yang akan datang. Kendala utama dalam pengembangan perbankan syariah disamping disebabkan oleh masih kurangnya tingkat pemahaman masyarakat tentang operasional perbankan syariah, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, dan profesional di bidang perbankan syariah juga turut menjadi kendala bagi perkembangan industri perbankan syariah sehingga pada akhirnya dapat mengurangi proses *check and balance* kepatuhan syariah dalam operasional bank. Kurangnya pengetahuan personel dari sisi prosedur dan regulasi akhirnya turut menjadi kendala dalam melakukan sosialisasi yang efektif dan komprehensif kepada masyarakat.

### ASPEK PASAR

Peluang pasar bagi pengembangan perbankan syariah di masa yang akan datang masih terbuka sangat lebar dan memiliki prospek yang cerah. Hal ini didasarkan atas pertimbangan kinerja ekonomi regional Sumut yang terus membaik, pertumbuhan kinerja perbankan syariah yang menunjukkan trend yang meningkat baik dari sisi pengelolaan aset, pembiayaan, pendanaan maupun profitabilitasnya. Pangsa pasarnya yang relatif kecil jika dibandingkan dengan perbankan konvensional sekaligus dapat merupakan sinyal bahwa betapa besarnya potensi pasar yang bisa dikembangkan di masa mendatang. Sebagaimana kita ketahui target pasarnya tidak hanya masyarakat yang belum menyadari keberadaan bank syariah, tetapi juga nasabah bank konvensional lainnya.

Dari aspek ekonomi, industri perbankan secara umum memiliki prospek yang cukup baik. Tingkat pertumbuhan PDRB Sumatera Utara dalam kurun

waktu lima tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan. Artinya kapasitas ekonomi regional Sumut yang cenderung meningkat, telah mendorong bagi berkembangnya aktivitas perbankan secara umum di Sumut. Hal ini dapat terlihat dari berbagai indikator perbankan yang terus mengalami perbaikan baik dari sisi aset, permodalan maupun pembiayaan. Selain itu, membaiknya indikator perbankan di Sumatera Utara juga terlihat dari terus meningkatnya jumlah jaringan kantor bank sejak lima tahun terakhir.

## **PELUANG DAN TANTANGAN**

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir perbankan syariah telah mencatat perkembangan yang cukup berarti. Namun demikian, jika dibandingkan dengan perbankan konvensional skala usahanya masih tergolong sangat marginal sehingga dengan demikian hal ini dapat merefleksikan adanya permintaan potensial yang cukup besar dari masyarakat akan keberadaan perbankan syariah. Masih terdapat keterbatasan informasi dan kurangnya taraf pemahaman masyarakat akan fungsi dan existensi perbankan syariah di Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan lembaga penelitian IPB dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman masyarakat Sumatera Utara terhadap prinsip, sistem dan operasional bank syariah masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya sosialisasi sistem perbankan syariah kepada masyarakat. Kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi dan fasilitas yang disediakan oleh perbankan syariah dipandang masih sangat minim.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa kapasitas sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah masih belum memadai jika dibandingkan dengan bank konvensional baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Oleh karena itu perhatian yang serius untuk pembenahan SDM syariah tersebut perlu diprioritaskan agar berbagai produk, inovasinya dapat lebih melekat di hati masyarakat di masa depan. Begitu pula dengan agenda sosialisasinya agar terus dilakukan secara berkesinambungan. Upaya yang proaktif untuk memasyarakatkan perbankan syariah ini baik dari SDM maupun produk serta inovasinya merupakan agenda yang cukup mendesak, agar perkembangan perbankan syariah dimasa yang akan datang dapat dicapai sebagaimana yang direncanakan.

Keberadaan perbankan syariah memiliki arti yang sangat penting dan strategis. Hal ini dikarenakan oleh fungsinya yang dekat dengan sektor riil dan bebas dari istilah bunga. Begitu pula dengan prospeknya yang diperkirakan cukup baik dimasa yang akan datang. Oleh karena itu perlu disusun langkah-langkah strategis yang diperlukan agar perkembangannya dapat lebih terarah dan lebih terfokus secara sinergis. Terdapat beberapa langkah yang mungkin bisa dilakukan baik dari sisi internal maupun external antara lain:



- Dari sisi peraturan/legalitas; Bank Indonesia bekerja sama dengan Departemen Keuangan maupun instansi terkait lainnya secara bersama-sama membantu dan menjadi stimulus bagi perkembangan perbankan syariah dengan jalan mengeluarkan berbagai peraturan yang bersifat kondusif dan sesuai dengan perkembangan jaman.
- Menjaga kepercayaan masyarakat; hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerjanya baik dari sisi pengelolaan asset, pembiayaan maupun dari sisi kemampulabaannya.
- Menjaga citra; hal ini dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik antar pelaku perbankan syariah. Perbankan syariah haruslah tumbuh dan bekerjasama secara harmonis bukan malah saling bersaing dan mematikan satu sama lainnya.
- Meningkatkan kualitas; inovasi produk dan pelayanan sangat diperlukan agar kualitasnya dapat terus ditingkatkan dimasa depan. Begitu pula dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan sesuai dengan perkembangan terkini agar terus diperbaharui sehingga memenuhi tuntutan dinamika masyarakat yang terus berkembang.
- Sesuai dengan perkembangan jaman; sudah menjadi tantangan bagi perbankan syariah agar dapat menciptakan produk syariah yang sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat yang semakin kritis dan dinamis.
- Upaya pemasaran yang komprehensif; memanfaatkan secara optimal peran media modern sehingga strategi pemasarannya dapat lebih proaktif dan inovatif. Pemanfaatan teknologi informasi dan internet (*webbased marketing strategy*) sudah merupakan keharusan di abad yang semakin modern.

## **BOKS - 11**

### **MENSINERGIKAN UMK -- BANK UMUM SYARIAH**

#### **I. Latar Belakang**

Perkembangan realisasi kredit UMKM di Sumut hingga pertengahan triwulan III-2006 sebesar Rp.16,42 Triliun, sebagian besar berasal dari Bank Umum sebesar 93,83% sedangkan sisanya 6,37% berasal dari Bank Umum Syariah. Angka realisasi ini masih lebih baik dari angka realisasi nasional yang masih berkisar 1,81%.

Realisasi kredit Bank Umum yang diserap oleh UMKM apabila dipilah menurut sektor usaha mikro, kecil dan menengah maka sebagian besar didominasi oleh sektor menengah sebesar 68,17% sisanya sektor 28,77% dan sektor mikro 3,05%. Realisasi alokasi kredit kepada UMKM pada Bank Umum Syariah lebih tinggi dari Bank Umum. Sektor menengah menyerap kredit sebesar 50,9% sedangkan sektor kecil 41,39% dan sektor mikro 7,71%.

#### **POSISI KREDIT UMKM BERDASARKAN BAKI DEBET DI SUMATERA UTARA - JULI 2006**

(Dalam Jutaan Rp)

<b>JENIS SEKTOR UMKM</b>								
<b>BANK</b>	<b>MIKRO</b>	<b>%</b>	<b>KECIL</b>	<b>%</b>	<b>MENENGAH</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
BU	469.560	3,05	4.424.389	28,8	10.481.958	68,17	15.375.907	93,63
BUS	80.762	7,71	433.295	41,4	532.858	50,90	1.046.915	6,37
	550.322		4.857.684		11.014.816		16.422.822	

#### **II. Fokus pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK)**

Sektor menengah menyerap sebagian besar alokasi kredit dari perbankan dibandingkan sektor usaha mikro dan kecil (UMK). Untuk ke depan nampaknya perlu lebih fokus pada pembinaan dan pengembangan sektor UMK mengingat masih banyaknya persoalan yang dihadapi UMK.

Persoalan utama yang dihadapi UMK saat ini adalah: (a) UMK adalah tulang punggung ekonomi yang dielu-elukan, kenyataannya kurang nutrisi (*calcium*), bahkan sudah mulai dirusak oleh bunga tinggi; (b) Definisi kredit UMK dapat dibagi dua yaitu Mikro (0 s/d Rp 50 juta) dan Kecil (Rp 50 juta s/d Rp 500 juta); (c) Kredit perbankan konvensional untuk UMK yang cukup tinggi belum berdampak signifikan terhadap pengembangan usaha rakyat sebagian bersifat konsumtif dan tidak didukung dengan sistem pengembangan usaha rakyat; (d) Berbagai upaya pemerintah yang tak terkoordinasi dengan baik juga belum memperlihatkan hasil optimal bahkan bisa merusak (e) Mayoritas pengusaha UMK tidak *bankable* (tidak memenuhi syarat memperoleh kredit); Pengusaha Pemula tanpa pengalaman, tanpa pembukuan dan adm usaha, Konsep usaha kurang/tidak memiliki jaminan kredit (*collateral*) (f) Modal Ventura, BPR/BPRS dan Lembaga Keuangan Syariah yang sangat berpotensi dan sangat cocok untuk UMK belum diperankan secara baik dan benar.

### **III. UMK Lahannya Bank Umum Syariah**

Berbagai persoalan yang melilit UMK merupakan kesempatan terbaik bagi bank – bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya untuk menunjukkan perannya. Secara mendasar konsep ekonomi syariah adalah bagaimana memberdayakan pelaku UMK (masyarakat) secara bersungguh sepenuh hati sampai mereka mampu mandiri dan menjadi pengusaha yang tangguh.

Lembaga Keuangan Syariah paling cocok membangun dan mengembangkan UMK karena: (a) Fokus utamanya pada pembentukan (*start-up*) dan pengembangan UMK (untuk modal usaha bukan kredit konsumtif); (b) Tidak memberi kredit, tapi memberi pembiayaan (memodali) pengusaha UMK. Resiko usaha ditanggung bersama (bank dan pengusaha); (c) Bentuk usahanya investasi bersama (*partnership*) dengan sistem bagi hasil dan bagi resiko; (d) Membantu peningkatan

kemampuan calon nasabah sebelum, selama dan setelah dimodali oleh bank; (e) Membiayai juga pengusaha pemula (*start-up*) sepanjang Konsep usaha jelas, ada Kemampuan dan Motivasi tinggi (KKM); (f) Memiliki cara untuk meringankan calon nasabah dari keharusan memiliki jaminan kredit (*Collateral*); (g) Mengharamkan kolusi, korupsi dan nepotisme

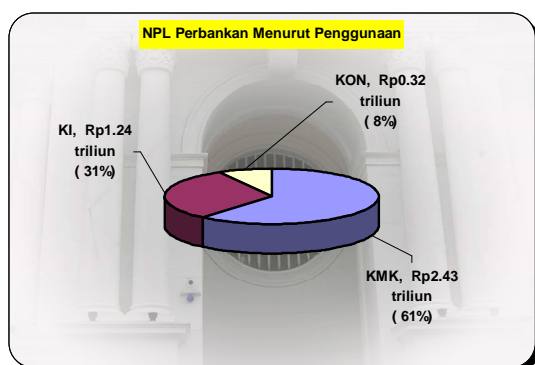
#### **IV. Sinergi Bank Umum Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah dengan UMK**

Persoalan yang dihadapi UMK dapat disinkronkan dengan peran lembaga keuangan syariah dalam bentuk sinergi yang kuat. Dalam sinergi ini diharapkan peran aktif dari berbagai pihak seperti asosiasi perbankan syariah (Asbisindo), konsultan keuangan mitra bank (KKMB), bank syariah, modal ventura syariah, BPR syariah, BMT, Kadin, Universitas, ICMI dan pihak lainnya yang bersungguh dengan UMK. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan realisasi pembiayaan UMK dan lebih jauh mampu memandirikan UMK di daerah Sumatera Utara.

## BOKS 12. RESIKO PERBANKAN

### Resiko Kredit

Kinerja perbankan pada triwulan III/2006 masih diwarnai dengan tingginya resiko kredit. Hal ini tercermin dari rasio NPL masih menunjukkan persentase yang cukup tinggi yaitu sebesar 10,71%. Determinan tingginya rasio NPL tersebut sebgaiian besar ditentukan oleh kinerja perkreditan yang buruk pada sektor industri pengolahan dan perkebunan pada debitur prima dari kelompok bank besar tertentu. Melihat konsentrasi NPL masih bertumpu pada kredit modal kerja dan investasi, maka kedepan tampaknya penyaluran kredit bersifat konsumtif masih akan menjadi motor penggerak pertumbuhan kredit oleh sektor perbankan.



Potensi resiko kredit dari sektor UMKM tampaknya masih rendah, tercermin dari tingkat NPL sektor ini yang masih jauh dari rata-rata sektor industri secara keseluruhan. Namun demikian perlu diwaspadai gejala umum kebijakan perbankan terhadap penyaluran kredit yang terkonsentrasi kepada sektor konsumtif dapat berdampak negatif terhadap kinerja kualitas kredit sektor UMKM tersebut.

### Resiko Likuiditas

Resiko likuiditas perbankan pada triwulan III tahun 2006 masih sangat aman dan cenderung pada posisi overlikuid. Kebijakan pemeliharaan likuiditas yang

berlebihan oleh perbankan merupakan dampak dari permasalahan sektor riil yang kurang mampu menyerap kelebihan dana untuk pembiayaan usahanya. Sehingga bank lebih cenderung menempatkan dananya pada komponen kas dan penempatan pada Bank Indonesia. Kedepan perbankan tampaknya akan masih mempertahankan posisi overlikuid terhadap likuiditasnya sebagai antisipasi berbagai kewajiban yang akan jatuh tempo dalam 3 bulan yang akan datang karena sebagian besar dana simpanan masyarakat berupa simpanan berjangka waktu pendek yaitu sampai dengan 90 hari. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Jatuh Tempo Simpanan	Giro	Tab	Depo	Jml	%
< 3 bulan	11.79	-	23.10	34.89	62.75%
> 3 bulan	-	17.72	2.99	20.71	37.25%
Jumlah	11.79	17.72	26.10	55.61	100.00%

### Resiko Pasar

Resiko pasar yang bersumber dari perubahan suku bunga terhadap kinerja perbankan tampaknya cukup mempengaruhi NPL dan NIM perbankan. Sebagai akibat masih tingginya biaya dana sebagai akibat masih tingginya BI Rate sampai dengan posisi triwulan III/2006 menekan perolehan interest margin yang tercermin penurunan rasio NIM yang cukup signifikan sebesar 21,95% yaitu semula sebesar 4,01% pada triwulan III/2005 menjadi sebesar 3,13% pada triwulan III/2006. Penurunan NIM perbankan ditambah dengan adanya kenaikan biaya-biaya operasional bank sebagai akibat fluktuasi harga-harga dan nilai tukar akhirnya menekan rasio ROA bank untuk turun sebesar 19,08% yaitu semula sebesar 5,10% pada triwulan III/2005 turun menjadi sebesar 4,09% pada triwulan III/2006. Namun demikian kedepan tampak kondisi NIM perbankan akan membaik sehubungan dengan ada kebijakan bank central melakukan penurunan BI rate secara bertahap. Selanjutnya resiko pasar sebagai akibat perubahan nilai tukar terhadap operasional perbankan tampaknya masih aman karena sebagian besar DPK yang dihimpun berupa rupiah. Kedepan tampaknya kondisi tersebut akan terkendali mengingat kecenderungan masyarakat untuk melepas simpanan valasnya sebagai akibat adanya penguatan nilai tukar rupiah.

URAIAN	2005	2006	Pangsa		Mutasi
	T-III	T-III	2005	2006	2006
a. Rupiah	43.91	49.56	87.53%	89.12%	1.59%
- Giro	6.87	9.40	13.69%	16.90%	3.21%
- Tabungan	18.15	17.72	36.17%	31.86%	-4.31%
- Deposito	18.90	22.44	37.66%	40.36%	2.70%
<b>b. Valas</b>	<b>6.26</b>	<b>6.05</b>	<b>12.47%</b>	<b>10.88%</b>	<b>-1.59%</b>
- Giro	2.47	2.40	4.92%	4.31%	-0.61%
- Deposito	3.79	3.65	7.55%	6.57%	-0.99%
<b>Total DPK</b>	<b>50.17</b>	<b>55.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	

antisipasi berbagai kewajiban yang akan jatuh tempo dalam 3 bulan yang akan datang karena sebagian besar dana simpanan masyarakat berupa simpanan berjangka waktu pendek yaitu sampai dengan 90 hari. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Jatuh Tempo Simpanan	Giro	Tab	Depo	Jml	%
< 3 bulan	11.79	-	23.10	34.89	62.75%
> 3 bulan	-	17.72	2.99	20.71	37.25%
Jumlah	11.79	17.72	26.10	55.61	100.00%

### Resiko Pasar

Resiko pasar yang bersumber dari perubahan suku bunga terhadap kinerja perbankan tampaknya cukup mempengaruhi NPL dan NIM perbankan. Sebagai akibat masih tingginya biaya dana sebagai akibat masih tingginya BI Rate sampai dengan posisi triwulan III/2006 menekan perolehan interest margin yang tercermin penurunan rasio NIM yang cukup signifikan sebesar 21,95% yaitu semula sebesar 4.01% pada triwulan III/2005 menjadi sebesar 3,13% pada triwulan III/2006. Penurunan NIM perbankan ditambah dengan adanya kenaikan biaya-biaya operasional bank sebagai akibat fluktuasi harga-harga dan nilai tukar akhirnya menekan rasio ROA bank untuk turun sebesar 19,08% yaitu semula sebesar 5,10% pada triwulan III/2005 turun menjadi sebesar 4,09% pada triwulan III/2006. Namun demikian kedepan tampak kondisi NIM perbankan akan membaik sehubungan dengan ada kebijakan bank central melakukan penurunan BI rate secara bertahap. Selanjutnya resiko pasar sebagai akibat perubahan nilai tukar terhadap operasional perbankan tampaknya masih aman karena sebagian besar DPK yang dihimpun berupa rupiah. Kedepan tampaknya kondisi tersebut akan terkendali mengingat kecenderungan

masyarakat untuk melepas simpanan valasnya sebagai akibat adanya penguatan nilai tukar rupiah.

URAIAN	2005	2006	Pangsa		Mutasi
	T-III	T-III	2005	2006	2006
a. Rupiah	43.91	49.56	87.53%	89.12%	1.59%
- Giro	6.87	9.40	13.69%	16.90%	3.21%
- Tabungan	18.15	17.72	36.17%	31.86%	-4.31%
- Deposito	18.90	22.44	37.66%	40.36%	2.70%
<b>b. Valas</b>	<b>6.26</b>	<b>6.05</b>	<b>12.47%</b>	<b>10.88%</b>	<b>-1.59%</b>
- Giro	2.47	2.40	4.92%	4.31%	-0.61%
- Deposito	3.79	3.65	7.55%	6.57%	-0.99%
<b>Total DPK</b>	<b>50.17</b>	<b>55.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	

--



## BAB IV

# PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH DAN INFLASI

### 4.1 Prospek Ekonomi

Kinerja ekonomi yang cukup tinggi pada triwulan III-2006 ini diperkirakan akan terus berlanjut pada triwulan IV mendatang. Momentum pertumbuhan yang terus meningkat sejak triwulan II tahun 2006 berpotensi untuk kembali mencatat pertumbuhan yang positif di triwulan IV-2006 dengan perkiraan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 – 6,4%. Kondisi tersebut masih lebih kecil dari target pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara tahun 2006 yang sebesar 6,49%, namun masih relatif lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian laju pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan maksimal sebesar 6%. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh jenis pengeluaran, yaitu konsumsi, investasi, ekspor dan impor. Peningkatan konsumsi terutama didorong oleh pemulihan daya beli masyarakat yang berangsur-angsur membaik. Berdasarkan survei penjualan eceran Bank Indonesia, total nilai penjualan secara triwulanan terus penurunan yang cukup besar dan terpuruk hingga triwulan III ini. Namun membaiknya beberapa indikator ekonomi makro yang cukup stabil dan bahkan di bawah target awal akan mendorong pemulihan yang lebih cepat. Dari sisi pemerintah, belanja pemerintah juga diperkirakan akan melonjak seiring dengan peningkatan pengeluaran pembangunan pemerintah daerah yang terakumulasi di akhir tahun.

Berdasarkan sektoral, sektor utama pendorong pertumbuhan ekonomi Sumut seperti Pertanian, perindustrian dan perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan akan kembali mencatat pertumbuhan positif. Sektor pertanian terutama ditunjang hasil panen sub sektor tanaman bahan makanan yang terjadi di awal bulan Oktober. Sub sektor perkebunan juga akan mencapai puncak produksinya di triwulan IV meskipun terkendala tingginya curah hujan yang berakibat pada penurunan produksi karet. Namun tingginya harga jual karet yang masih menguat di pasar internasional cukup mendorong animo masyarakat untuk menanam karet.

Sektor industri pengolahan di Sumut secara umum mencapai puncak produksi pada triwulan III. Namun penurunan harga BBM non Subsidi serta mulai meningkatnya sisi permintaan diperkirakan dapat mendorong

pertumbuhan sektor tersebut. Perincian penurunan harga BBM non subsidi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1.  
Penurunan Harga BBM Non Subsidi Periode Oktober 2006

NO.	BBM NON SUBSIDI	PENURUNAN HARGA
1	Premium	15,20%
2	Minyak Tanah	6,90%
3	Minyak Solar	9,20%
4	Minyak Diesel	4%
5	Minyak Bakar	13,70%

Tren turunnya produk BBM pada periode Oktober 2006 disebabkan penurunan MOPS Migas pada periode September 2006 dibanding periode sebelumnya serta nilai tukar rupiah terhadap USD yang cenderung menguat sebesar 0,16%.

Upaya pembenahan infrastruktur yang cukup memprihatinkan di Sumatera Utara diperkirakan akan mendorong sektor bangunan untuk kembali meningkat. realisasi pengeluaran pemerintah yang terakumulasi di semester akhir tahun 2006 akan menciptakan *multiplier effect* terhadap pembangunan fisik yang dikelola oleh pihak swasta meskipun masih terkendala minat investasi yang relatif masih cukup rendah.

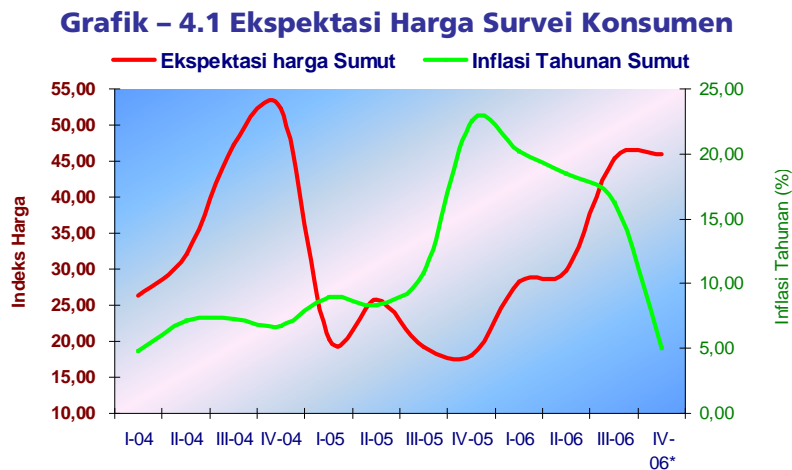
#### 4.2 Prospek Inflasi

Inflasi Provinsi Sumatera Utara pada triwulan IV-2006 diperkirakan tetap stabil dengan level yang sedikit meningkat pada kisaran 1,50-2,00%, lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan III yang sebesar 1,00%. Dengan demikian maka inflasi provinsi Sumatera Utara pada tahun 2006 diperkirakan mampu berada pada kisaran  $5\pm 1\%$ . Kondisi tersebut tentunya baik jika dibandingkan inflasi yang terjadi pada tahun 2005 yang mencapai 22,51%. Bahkan jika dibandingkan inflasi nasional pada tahun 2006 yang berada pada kisaran  $7,5\pm 1\%$  diperkirakan provinsi Sumut akan mencapai level inflasi yang jauh lebih rendah.

Tekanan inflasi pada triwulan IV mendatang terutama di dorong oleh *carry out effect* dari pelaksanaan puasa di bulan September dan perayaan hari raya lebaran yang berlangsung di akhir bulan Oktober. Tekanan akan kembali meningkat mengingat pada akhir tahun 2006 akan kembali dilalui dengan perayaan hari raya Natal dan Tahun Baru. Dengan kondisi tersebut, kontribusi *volatile food* dan inflasi inti diperkirakan akan mengalami peningkatan yang cukup besar.

**Dari sisi fundamental**, tekanan inflasi yang relatif stabil sepanjang tahun 2006 mampu mendorong optimisme yang cukup signifikan terhadap ekspektasi masyarakat yang terus menguat. Kondisi tersebut tercermin dari indeks ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan tingkat harga yang terus meningkat. Penguatan indeks tersebut secara gradual menunjukkan adanya **penurunan** jumlah masyarakat yang meyakini adanya kenaikan tingkat harga secara terus menerus. Hal tersebut sejalan dengan kondisi riil inflasi tahunan Sumatera Utara yang terus menurun dari posisi 22,51% pada tahun 2005 menjadi 2,55% pada posisi triwulan III dan diperkirakan berada pada kisaran  $5\pm 1\%$  di akhir tahun 2006.

Perkembangan ekspektasi konsumen terhadap tingkat harga dapat dilihat pada grafik 4.1 di bawah ini:



### **BOKS - 13**

## **Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UMK) Melalui Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD)**

Dalam rangka implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan upaya dalam pengembangan dan pemberdayaan UMK untuk lebih dapat mengakses sumber dana dari Perbankan, telah dirancang suatu pola pemberian kredit kepada UMK dengan Skim Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD). Pola pemberian kredit ini melibatkan Pemerintah Daerah (Pemkab/Pemko), Perbankan dan Lembaga Penjamin (PT. Askrido).

Pemberian Kredit UMK dengan Skim LPKD ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan 3 pihak tersebut yang dituangkan dalam *Memorandum of*

*Understanding* (MoU), selanjutnya untuk teknis pelaksanaan penyaluran akan dituangkan dalam ketentuan Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Ketentuan Juknis.

Dari tahun 2004 sampai dengan bulan Juli 2006 berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Askrindo Pusat, 33 Pemkab/Pemko telah menandatangani MoU di kantor Pusat Bank Indonesia yang difasilitasi Oleh Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPnP) .Dari ke 33 yang telah menandatangani MoU tersebut, hanya 3 yang telah menuangkan ke Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk selanjutnya dapat merealisasikan kredit, yaitu Pemprop. Riau, Pemprop Gorontalo dan Pemkab tapanuli Utara ( umatera Utara)

Khusus untuk Sumatera Utara, telah dilakukan 2 penandatanganan MoU yaitu sebagai berikut :

1. Pemkab Tarutung – PT. Bank Sumut – PT. Askrindo pada tanggal **17 Mei 2006**. Penandatanganan Mou ini dilaksanakan di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, disaksikan oleh Gubernur BI. Menindaklanjuti MoU telah dibuat suatu Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Juknis penyaluran Kredit kepada UMK. Dalam MoU tercantun bahwa Pemkab Tapanuli Utara akan menempatkan dananya sebesar Rp. 1,4 M di PT. Bank Sumut untuk selanjutnya akan diteruskan kepada calon debitur UMK.
2. Pemko Medan – PT. Bank Sumut – PT. Askrindo telah menandatangani MoU di Kantor Pusat Bank Indonesia pada tanggal **26 Juli 2006**. Saat ini Perjanjian Kerjasama dan Juknis telah dalam tahap pembahasan akhir. Proses pembahasan kerjasama pemberian kredit dengan skim LPKD ini dari awalnya difasilitasi oleh Bank Indonesia Medan. Secara aktif Bank Indonesia Medan memfasilitasi pertemuan-pertemuan dalam rangka pembahasan konsep kerjasama ini sampai ditandatanganinya MoU. Tidak hanya sampai di sini Bank Indonesia Medan juga aktif mendorong pihak-pihak tersebut untuk segera membuat Perjanjian Kerjasama dan Juknis selanjutnya segera merealisasikan kredit kepada UMK.
3. Sejalan dengan pola pemberian kredit UMK dengan skim LPKD di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada minggu kedua November 2006 akan mengundang seluruh bupati dan walikota se-Sumatera Utara untuk menghadiri pertemuan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan pemberdayaan UMK di masing-masing PemKab/Kota dengan pemberian kredit melalui pola yang serupa.

#### **POLA KREDIT UMK DENGAN SKIM LPKD.**

Secara spesifik terdapat perbedaan pemberian kredit kepada UMK dengan Skim LPKD dibandingkan dengan kredit umum yang ada di perbankan.

Beberapa ketentuan yang disepakati masing-masing pihak dalam pemberian kredit UMK Skim LPKD :

- a. *Gearing Ratio* atas besarnya kredit yang akan disalurkan ke UMK sebanyak 5 kali penempatan dana Pemko Medan/Pemkab tapanuli Utara di PT. Bank Sumut. Misalnya Pemko Medan menempatkan dana Rp. 1 M di PT. Bank Sumut, maka bank Sumut minimal harus menyalurkan kredit kepada UMK sebanyak 5 kali penempatan dana tersebut yaitu Rp. 5M.
- b. Tingkat suku bunga yang berlaku untuk skim kredit ini adalah 2 % di bawah suku bunga kredit umum di PT. Bank Sumut.
- c. Pembagian Risiko (Risk Sharing) dalam penjaminan kredit adalah 25 % ditanggung oleh Pemko Medan, sedangkan 75% ditanggung bersama oleh PT. Bank Sumut dan PT. Askindo.

## **BOX-14**

### **Penukaran Uang Kecil Menjelang Lebaran**

Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri pada bulan Oktober 2006, diperkirakan transaksi perbankan (penarikan tunai) oleh nasabah di wilayah Sumatera Utara akan mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam menyambut perayaan Idul Fitri. Mengantisipasi meningkatnya transaksi perbankan pada Hari Raya Idul Fitri, Bank Indonesia Medan menambah jumlah persediaan uang tunai yang dapat ditarik oleh perbankan dan masyarakat sebesar Rp.2 trilyun dari kebutuhan normal perbankan di Sumatera Utara. Dengan penambahan tersebut, diharapkan pelayanan perbankan terhadap masyarakat di Sumatera Utara dapat dilakukan dengan baik. Untuk memperlancar dan mengoptimalkan penarikan uang tunai oleh perbankan dari Bank Indonesia, dalam penyediaannya kepada masing-masing perbankan yang melakukan penarikan uang tunai di Bank Indonesia Medan diwajibkan untuk menyampaikan Rencana Penarikan Uang Tunai kepada Bank Indonesia Medan satu hari sebelum jadwal penarikan yang dimaksudkan agar penyediaannya lebih tertib dan tepat waktu.

Berkaitan dengan penukaran uang pecahan kecil, Bank Indonesia Medan juga telah mengantisipasi kondisi tersebut dengan menyediakan dana pecahan kecil yang dalam penyalurannya bekerjasama dengan 5 Perusahaan Penukaran Uang Pecahan Kecil (PPUPK) sebagai mitra kerja. Jumlah yang disediakan adalah sebesar Rp.1 milyar untuk masing-masing PPUPK atau sebesar Rp.5 milyar setiap harinya terhitung sejak tanggal 10 s/d. 20 Oktober 2006. Sehingga jumlah uang pecahan kecil yang disediakan selama 10 hari penyaluran adalah sebesar Rp.50 milyar, dengan rincian uang pecahan Rp.1.000,- sebesar Rp.200 juta, pecahan Rp.5.000,- sebesar Rp.300 juta dan pecahan Rp.10.000,- sebesar Rp.500 juta.

Dalam upaya mengoptimalkan dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat tersebut, pelaksanaannya dilakukan dengan membuka loket-loket pelayanan di daerah-daerah sesuai wilayah kerja penyaluran uang pecahan kecil dari masing-masing PPUPK sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK). (Lihat tabel 1). Selain di wilayah kerja masing-masing PPUPK, juga dibuka loket-loket pelayanan yang ditempatkan di 15 (lima belas) areal Instansi Pemerintah yang ada di kota Medan, 1 (satu) di kantor PWI Medan serta 5 (lima) loket pelayanan di areal Lapangan Merdeka Medan.

No	Nama PPUPK	Alamat	Wilayah Kerja
1	PT. Citra Inti Garda Artha	Jl. Sei Besitang No.6 Medan	Medan sekitarnya, Kawasan KIM, Belawan, Binjai dan Stabat
2	PT. Bina Artha Pratama	Jl. Murai II Komp. Tomang blok I No.186 Medan	Medan sekitarnya, Diski, Pancur Batu, Deli Tua, Tj. Morawa dan Lubuk Pakam.
3	PT. Bintang Indonesia Cemerlang	Jl. Brigjend. Katamso No.365 Medan	Medan sekitarnya, Tanjung Morawa, Lubuk Pakam, Perbaungan dan Deli Tua.
4	PT. Cendana Karya Graha	Jl. Kirana No. 19 Medan	Medan sekitarnya, Binjai dan Stabat.
5	PT. Citra Lestari Agung Persada	Jl. Asrama Komp. Bumi Asri blok C No.43 Medan	Medan sekitarnya, Diski, Titipapan dan Belawan.

## BOKS - 15

### Rekomendasi Kebijakan

#### **KESIMPULAN**

Menginjak triwulan III tahun 2006, perkembangan indikator ekonomi makro Sumatera Utara mengalami perkembangan yang cukup baik yang ditandai dengan kinerja positif pada perkembangan tingkat harga secara umum (inflasi) serta pertumbuhan ekonomi (PDRB), sementara kinerja sektor perbankan belum menunjukkan peningkatan yang berarti.

Kinerja positif pada indikator ekonomi makro tersebut sayangnya belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan daya beli masyarakat dan kesejahteraan secara umum. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya distorsi kebijakan di sektor moneter terhadap sektor riil, adanya jeda waktu (*time lag*) antara daya dukung sektor moneter dengan implementasi di sektor riil, dan fokus kebijakan pembangunan yang belum mampu memberdayakan masyarakat pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sumatera Utara.

Karena itu mencermati perkembangan kondisi di atas, serta dalam rangka mendorong terbukanya peluang usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, Bank Indonesia Medan berupaya untuk memfokuskan beberapa kegiatannya, khususnya di triwulan III ini, untuk mencanangkan langkah-langkah strategis yang memposisikan Usaha Mikro dan Kecil menjadi ujung tombak pembangunan provinsi Sumatera Utara ke depan.

#### **LEBIH BERSUNGGUH DENGAN UMK**

Selama ini konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat lebih ditekankan pada sektor **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**. Namun demikian, skala usaha Menengah merupakan skala usaha yang memiliki klasifikasi kredit di atas Rp.500 juta, sehingga di anggap kurang tepat untuk diposisikan sebagai bagian dari sektor usaha yang memberdayakan masyarakat kecil secara riil. Pada kenyataannya sektor Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi nadi ekonomi rakyat hanya menyerap 14,60% dari total penyaluran kredit di Sumatera Utara (Agustus 2006), sehingga dengan melihat karakteristik masyarakat Sumut yang lebih dekat pada sektor usaha berskala mikro dan kecil tersebut, Bank Indonesia Medan lebih memfokuskan diri untuk menempatkan skala **Usaha Mikro dan Kecil (UMK)** sebagai tonggak pemberdayaan ekonomi rakyat.



Dalam rangka pengembangan UMK, BI Medan telah merumuskan beberapa kerangka strategis yang dituangkan ke dalam 6 (enam) pilar dengan motto "Lebih Bersungguh Dengan UMK", yaitu :

1. Pembentukan forum UMK Provinsi yang melibatkan Dinas, Perbankan, Pelaku usaha, KKMB, BUMN, Universitas, serta Lembaga pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk mensinkronkan dan mensinergikan seluruh program kerja yang dimiliki anggota forum UMK. Pada pilar pertama ini juga akan diupayakan agar lingkungan berusaha di kalangan pelaku UMK dapat lebih baik dengan jalan melakukan penyederhanaan dalam prosedur perijinan.
2. Mensinergikan Lembaga yang peduli UMK; hal ini dilakukan dengan jalan Mengefektifkan proses dan prosedur koordinasi pada tingkat provinsi terhadap penyaluran dana dan bantuan teknis kepada UMK serta meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan pasar bagi UMK. Disamping itu juga akan diupayakan adanya peningkatan kerja sama yang sinergis antar lembaga dan instansi terkait dalam penyediaan dana murah bagi pengembangan UMK
3. Pada pilar ketiga, BI Medan akan berupaya agar akses pelaku UMK terhadap kredit perbankan dapat meningkat. Langkah kongkrit ke arah tersebut adalah dengan mendorong pembentukan Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) di seluruh kabupaten dan kotamadya di Sumut sehingga akselerasi pemberian kredit kepada UMK mengalami peningkatan melalui mekanisme LPKD.
4. Untuk menstimulus pihak perbankan dalam menyalurkan kreditnya kepada pelaku UMK maka sebagai pilar keempat Bank Indonesia Medan akan membentuk jaringan kerjasama (*linkage*) antara BPR/BPRS dengan bank umum. Dalam kaitan ini akan diupayakan peningkatan kualitas BPR/BPRS.
5. Pada pilar kelima akan dicanangkan "*Sumut sebagai Shariah Development Centre (SDC)*" dengan proyek percontohan kerjasama antara ASBISINDO dengan Pemkab/kota setempat, mengekspos syariah yang telah berhasil (*Shariah success story*) serta kerjasama antara lembaga lokal, nasional dan internasional.
6. Sebagai pilar terakhir, untuk mendukung keberhasilan kelima pilar tersebut maka pada pilar keenam akan dilakukan riset dan promosi. Dalam pilar ini perlu dikampanyekan secara lebih intensif motto "Lebih Bersungguh dengan UMK Sumut", mengembangkan *Website* UMK Sumut yang *link* ke seluruh anggota Forum UMK, membangun pusat informasi/data keuangan dan perbankan yang bermanfaat bagi pelaku UMK dalam mencari pendanaan, serta menciptakan *blueprint* bagi pengembangan UMK Sumut, yang didukung oleh setiap instansi, dinas, departemen dan seluruh *stakeholders*. Kegiatan riset dan promosi tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus agar kelima pilar sebelumnya dapat berjalan secara berkesinambungan.

### **REKOMENDASI KEPADA KANTOR PUSAT BANK INDONESIA:**

1. Mendorong percepatan penyelesaian jumlah kredit bermasalah, terutama yang bersifat struktural yang dapat mengancam kesinambungan pembangunan dan berpotensi menimbulkan resiko sistemik (*systemic risk*) sektor keuangan di daerah. Tingginya jumlah kredit bermasalah di Sumatera Utara merupakan salah satu kendala terbesar sektor perbankan dalam melakukan ekspansi kredit sehingga perbankan tidak dapat secara optimal menjalankan perannya sebagai fungsi intermediasi yang akan memberikan stimulus di daerah.
2. Memfasilitasi koordinasi perbankan dengan departemen dalam negeri yang akan mendorong terealisasinya program Lembaga Penjaminan Kredit Daerah. Penguatan formal kelembagaan yang terpusat (*top down*) secara nasional akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih bersungguh-sungguh dalam memberikan dukungan terhadap pembentukan LPKD, sehingga kerja sama antara pemerintah daerah tidak saja dituangkan secara formal ke dalam MOU, namun dapat segera dimanfaatkan secara riil untuk mendorong pemanfaatan kredit oleh masyarakat secara sistematis, terpadu, dan terbina dengan baik.
3. Mendorong pembentukan lembaga koordinasi Usaha Mikro dan Kecil secara generik di seluruh KBI sehingga Bank Indonesia dapat berperan aktif dalam mendorong terciptanya wadah bersama seluruh pelaku ekonomi yang peduli terhadap UMK dan meningkatkan akses perbankan oleh UMK secara riil.

### **REKOMENDASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH:**

1. Memfasilitasi upaya koordinasi pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam mendorong terbentuknya LPKD di seluruh provinsi Sumatera Utara sehingga potensi pembiayaan meningkat dan pada gilirannya meningkatkan aktivitas ekonomi yang memberdayakan usaha mikro dan kecil di daerah.
2. Berperan aktif dalam mendorong pembentukan lembaga koordinasi Usaha Mikro dan Kecil di daerahnya masing-masing serta berkoordinasi dengan lembaga serupa di tingkat provinsi sehingga dapat menjembatani antara pemilik dana dengan pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan.
3. Sebagai upaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif di Sumatera Utara melalui budaya kompetitif yang sehat, perlu dipertimbangkan adanya *North Sumatera Infrastructure Summit* yang akan memberikan akses informasi peluang usaha dan investasi di seluruh daerah di Sumatera Utara secara terbuka.